P-ISSN 2776-4982
E-ISSN 2776-4354

InVest

Journal of Sharia and Economic Law

Vol.2 No.2, December 2022

THE INFLUENCE OF HALAL KNOWLEDGE AND LABELING ON FOOD PRODUCT PURCHASE DECISIONS
CHANDRA FEBRILYANTRI | 106-133 |

THE RELEVANCE OF IBN KHALDUN'S ECONOMIC THOUGHT ON THE PRICES MECHANISM IN THE MODERN ECONOMY
KHOIRUN NISAK | 134-151 |

IMPLEMENTATION OF THE MSME EMPOWERMENT PROGRAM SUPERVISION SYSTEM AT THE INFAQ MANAGEMENT FOUNDATION
SYAMSIYAH SYAMSIYAH, MUTTAQIN CHOIRI | 152-175 |

MAQĀSHID SHARIA-BASED ZAKAT DISTRIBUTION MODEL: ZAKAT DISTRIBUTION PROGRAM IN NATIONAL ZAKAT AGENCY DKI JAKARTA
SITI NUR MAHMUDAH, MOH ABDUL AZIZ ALWA | 176-195 |

INFLATION IN INDONESIA: IBN KHALDUN AND AL-MAQRIZI WORD VIEW
MOH. ABDUL AZIZ ALWA, AMIN WAHYUDI | 196-211 |

THE INFLUENCE OF PLAFOND, TENOR, APPLICATION PROCESS, AND LOAN FREQUENCY ON THE GROWTH OF BANK SYARIAH INDONESIA'S MSMES CUSTOMERS
ANISA LIA VIANTINA, RATIH PURBOWISANTI, DHIDHIN NOER ADY RAHMANTO, DUNYATI ILMIAH, NOVI FEBRIYANTI | 212-234 |

LEGAL FRAMEWORK TO SUPPORT ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN THE UNITED ARAB EMIRATES
MAHMOUD ISMAEIL MOHAMED MASHAL | 235-286 |

Vol.2 No.2, December 2022

FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

INVEST Journal of Sharia & Economic Law, E-ISSN: 2776-4354; P-ISSN: 2776-4982 published by the IAIN Ponorogo, Indonesia, organized by Sharia Faculty. This journal is published every July and December. The Invest Journal focuses on the results of field studies and literature studies in Islamic economics, especially the integrative study of Islamic economic law, Islamic Finance, and Halal Studies in Southeast Asia. This journal publishes original articles on the latest international issues and trends in Islamic Economic instruction, learning, and policy to advance our knowledge of Islamic Economic Law, Islamic Finance, and Halal Studies theory and practice.

EDITORIAL TEAM

EDITOR IN CHIEF

1. M Ilham Tanzilulloh, (Sinta ID: 6039543), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

FIELD EDITOR IN CHIEF

1. Prof. Toseef Azid, Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, Qassim University, Saudi Arabia

EDITOR

1. Sholeh Hasan Wahid, (Sinta ID: 6719258); Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
2. Anjar Kususiyanah, (Sinta ID: 6675644); Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
3. Khairil Umami, (Sinta ID: 6773025), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
4. Wahyu Saputra, (Sinta ID: 6751102), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
5. Moh Mukhlas, (Sinta ID: 6037404), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

REVIEWER

1. Prof. Necmeddin Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Turkey
2. Prof Adis Duderija, Senior Lecturer in the Study of Islam and Society, School of Humanities, Languages and Social Science ; HEA Fellow. Griffith University, Australia

3. Dr. Mohd Adib bin Abd Muin, Universiti Utara Malaysia, College of Business, School of Islamic Business, Malaysia
4. Prof. Mansur Lubabah Kwanbo, (Scopus ID 57191345500) Associate Professor of Accounting and Finance, Kaduna State University, Nigeria
5. Nor Hafizah Zainal Abidin, International Islamic University Malaysia (IIUM), Kulliyyah of Economics and Management Sciences, Malaysia
6. Michal Radvan, Ph.D., Department of Financial Law and Economics, Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic
7. Khairil Husaini Bin Jamil, International Islamic University Malaysia, Malaysia
8. Dr Nik Herda Binti Nik Abdullah, Taylor's Centre for Accountancy Studies (TCAS) School of Accounting and Finance Taylor's University, Lakeside Campus., Malaysia
9. Muhammad Chairul Huda, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
10. Muhammad Sibt e Ali, School of Economics, Bahauddin Zakariya University Multan, Pakistan
11. Ahmad Furqon, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
12. Abid Rohmanu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
13. Khusniati Rofiah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
14. Abdul Mun'im, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
15. Umi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
16. M. Zidny Nafi' Hasbi, Universitas Alma Ata, Indonesia

17. Mohamad Hidayat Muhtar, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

1. Ibrahim Dahiru Idriss, PhD In-view at the Department of Usul al-Din and Comparative Religion, International Islamic University Malaysia, Nigeria
2. Dr Ahmad Syukran Baharuddin, Senior Lecturer at the Faculty of Syari'ah and Law, USIM, Malaysia
3. Prof Muhammad Akram Rana, Department of Islamic Studies, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan
4. Dr. Rajaa Hussein Abdulameer, Department of Law, Hilla university college, Babylon, Iraq

AUTHOR GUIDELINES

Invest Journal of Sharia & Economi Law memiliki ruang lingkup artikel ilmi- ah, artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang studi integratif Hukum Ekonomi Syariah di Asia Tenggara. Isu-isu khusus terkait Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah. Jurnal ini men- yambut baik kontribusi cendekiawan dari disiplin ilmu terkait;Semua artikel yang di submit di Invest harus mengikuti pedoman sebagaimana diuraikan di bawah ini:

SUBMISSIONS

- Naskah yang dikirimkan merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi di jurnal lain;
- Semua manuskrip yang dikirimkan harus menjalani penilaian awal oleh Editor, dan, jika dianggap cocok untuk pertimbangan lebih lanjut, akan ditinjau oleh ahli independen dan anonim. Semua peer review bersifat double-blind;
- Naskah harus diserahkan oleh penulis melalui pengiriman online atau email;

BAGIAN UTAMA DARI NASKAH

- Setiap artikel harus mencantumkan judul, nama penulis, institusi, alamat email, abstrak, kata kunci, konten dan referensi;
- Ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan/atau Arab sesuai dengan standar karya tulis ilmiah;
- Judul harus sederhana, ringkas dan informatif dan tidak lebih dari 14 kata;
- Abstrak harus dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;

- Abstrak ditulis secara singkat, ringkas dan jelas antara 150-250 kata yang mencerminkan: masalah (Issue), tujuan penelitian, metode, dan temuan penelitian. Harap berikan juga 3-5 kata kunci yang dipilih (kata atau frasa);
- Naskah yang ditulis dalam bahasa Arab harus selalu disertai dengan abstrak dan judul dalam bahasa Inggris;
- Panjang naskah antara 3000 - 7000 kata; Kertas ukuran A4 dengan spasi 1,15, ditulis dengan font gaya Book Antiqua;
- Isi dari heading terdiri dari: pendahuluan, pembahasan (heading dan sub heading disesuaikan dengan kebutuhan tiap naskah), dan kesimpulan;
- Heading bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian harus dicetak tebal dan menggunakan huruf besar. Subbagian harus dicetak tebal;
- Apapun ejaan yang Anda pilih harap diterapkan secara konsisten;
- Font Latin, seperti, misalnya, mis., Et al., Versus (vs.) harus ditulis dalam huruf miring.
- Semua istilah atau judul dalam bahasa Arab harus ditransliterasi dengan mengikuti panduan Library of Congress. Nama orang tidak boleh ditransliterasi;
- Semua referensi artikel (catatan kaki dan referensi) harus mengikuti gaya Chicago Manual Style (CMS). Template atau format artikel telah disiapkan untuk Anda unduh dan gunakan.

CATATAN KAKI DAN REFERENSI

Catatan kaki dan referensi menggunakan gaya referensi ke-17 CMS (Chicago Manual Style). Kami menyarankan Anda untuk menggunakan aplikasi manajer referensi seperti Zotero, Mendeley, atau Endnote.

CATATAN KAKI

- Catatan kaki untuk bahan teks, yang harus dijaga seminimal mungkin, dan yang harus ditunjukkan dengan superskrip numerik: 1, 2, 3, dll.
- Catatan kaki harus ditempatkan di bagian bawah halaman yang relevan.
- Referensi harus dalam urutan abjad. Persyaratan minimal 20 referensi. Harus memuat referensi yang diperoleh dari sumber primer (terdiri dari sebesar 80% dari keseluruhan daftar pustaka meliputi jurnal, tesis, disertasi, dan penelitian lainnya) yang telah diterbitkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. 20% sisanya mungkin termasuk sumber-sumber sekunder (buku dan publikasi terkait lainnya). Disarankan untuk menerapkan perangkat lunak referensi seperti Zotero, Mendeley atau Endnote, dll.

TAHAP PROOFREADING

- Setelah bukti siap, email akan memberi tahu penulis dan melampirkannya dalam format pdf.
- Penulis diminta untuk memeriksa buktinya dengan cermat. Mereka harus ingat bahwa tujuan dari proofreading adalah untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama produksi. Oleh karena itu mereka harus memeriksa secara khusus kelengkapan teks, pemisah persamaan, gambar, tabel, dan referensi.
- Hanya koreksi penting yang diterima.
- Penulis memiliki tanggung jawab akhir untuk koreksi tersebut.
- Hasil koreksi harus dikembalikan dalam waktu 48 jam dan dapat dikirim kembali baik sebagai daftar rinci melalui email (mengutip lokasi perubahan dengan halaman, kolom, dan

nomor baris). Harap jangan mengubah file bukti PDF, menambahkan penjelasan, atau mengirim kembali file naskah yang telah diubah.

- Segera setelah paper hasil proofreading dikembalikan, paper akan dikoreksi dan diposting untuk publikasi online.

TRANSLITERASI

Transliterasi bahasa Arab harus ditulis dengan pedoman sebagai berikut:

Arab	English	Arab	English
ء	‘	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	`
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	ه	h
ش	sh	و	w
ص	ṣ	ي	y

Vokal pendek: a, i, u. vokal panjang: ā, ī, ū. Diftong: aw, ay. Tā marbūṭā: t. Artikel: al-. Untuk informasi rinci tentang Transliterasi Arab, silakan merujuk ke sistem transliterasi di Pedoman Jurnal Invest.

TABLE OF CONTENTS

EDITORIAL TEAM II

AUTHOR GUIDELINES III

TRANSLITERASI VII

TABLE OF CONTENTS VIII

THE INFLUENCE OF HALAL KNOWLEDGE AND LABELING ON FOOD PRODUCT PURCHASE DECISIONS 106

THE RELEVANCE OF IBN KHALDUN'S ECONOMIC THOUGHT ON THE PRICES MECHANISM IN MODERN ECONOMY 134

IMPLEMENTATION OF THE MSME EMPOWERMENT PROGRAM SUPERVISION SYSTEM AT THE INFAQ MANAGEMENT FOUNDATION 152

MAQĀSHID SHARIA-BASED ZAKAT DISTRIBUTION MODEL: ZAKAT DISTRIBUTION PROGRAM IN NATIONAL ZAKAT AGENCY DKI JAKARTA 176

INFLATION IN INDONESIA: IBN KHALDUN AND AL-MAQRIZI WORD VIEW 196

THE INFLUENCE OF PLAFOND, TENOR, APPLICATION PROCESS, AND LOAN FREQUENCY ON THE GROWTH OF BANK SYARIAH INDONESIA'S MSMEs CUSTOMERS 212

LEGAL FRAMEWORK TO SUPPORT ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN THE UNITED ARAB EMIRATES 235

Journal of Sharia and Economic Law
Vol. 2, No. 2, December 2022 (pp. 106-133)

THE INFLUENCE OF HALAL KNOWLEDGE AND LABELING ON FOOD PRODUCT PURCHASE DECISIONS

***Candra Febrilyantri*[1]**
[1]Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id [1]

DOI: 10.21154/invest.v2i2.3946

Received: 2021-12-27	*Revised: 2022-04-06*	*Approved: 2022-06-11*

Abstract: The food and beverage industry is currently more concerned about the manufacture and procurement of halal food products because the level of public knowledge is increasing with social media and is supported by data on the development of Muslims worldwide. For Muslims, the essential thing to do when buying products is halalness. This study examines the level of knowledge and halal labeling on purchase decisions of food products for IAIN Ponorogo students. The number of samples in this study was 100 people, with multiple linear regression analysis methods and using the SPSS for Windows v25. Based on the result of the SPSS test, the result was: (i) Based on the simulation test, knowledge variables and halal labeling affected food purchasing decisions. (ii) Based on a partial test, the knowledge variable does not affect food purchasing decisions, but the halal labeling variable affects food purchasing decisions.

Keywords: *Halal Food; Halal Labeling; Knowledge*

Abstrak: Industri makanan dan minuman saat ini lebih peduli tentang pembuatan, dan pengadaan produk makanan halal, dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat semakin maju dengan adanya media sosial, serta didukung dengan data perkembangan umat Islam yang semakin banyak di dunia. Bagi muslim, hal mendasar yang dilakukan saat membeli produk makanan adalah tentang status halalnya. Penelitian ini menguji mengenai tingkat pengetahuan serta Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan pada Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 orang, dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu program SPSS for windows 25. Berdasarkan hasil uji SPSS di dapatkan hasil (i) secara simultan atau Bersama-sama, variabel pengetahuan dan labelisasi halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian (ii) secara parsial, variabel pengetahuan tidak berpengaruh dalam keputusan pembelian

makanan namun variabel labelisasi halal berpengaruh dalam pembelian produk makanan.

Kata kunci**:** *Makanan halal; Label halal; Pengetahuan*

INTRODUCTION

The *Qur'ān* has regulated the way of fulfilling food needs according to Islamic law in *Suraṭ Al-Mā'idah* verse 88. The letter states that halal food is any food, except those specifically mentioned as haram, which is prohibited or violates Islamic law as described in the *Qur'ān Suraṭ Al-Mā'idah* verse 3. Therefore, the halalness of a food product is essential for Muslims and is legally obligatory in fulfilling consumption in a halal way and material. [1]

The number of Muslim population in the world is the primary support for the consumption of halal products. The Muslim population in the world is about 1.6 billion people, equivalent to 23 percent of the world's population. Data from[2] The State of The Global Islamic Economy 2014-2015, stated that halal business trend indicators in five industrial fields continue to show progress. Among others, Islamic Finance services, halal food, Muslim fashion, halal media and recreation, and halal pharmaceuticals and cosmetics.[3]

Halal products have become one of the most prominent and fastest-growing markets. As a result, the food industry is becoming more concerned about manufacturing and procuring halal

[1] Anggit Listyoningrum and Albari Albari, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2017, 40–51, https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art4.

[2] John Ireland and Soha Abdollah Rajabzadeh, "UAE Consumer Concerns about Halal Products," *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 3 (September 20, 2011): 274–83, https://doi.org/10.1108/17590831111164796.

[3] Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015), https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864.

products. Research conducted by the Halal Industry Development Corporation in 2014 and the Halal Research Council in 2010 estimated that the global halal product market is worth USD 2.3 trillion (excluding Islamic finance and banking), which means that the halal industry is a profitable business. In this trade, kosher food and beverages represent USD 1.4 trillion, with a 67% share of the marketing market. Product knowledge is consumer knowledge related to knowledge of the traits or characteristics of the product, the consequences of using the product, and the value (level) of satisfaction the product will achieve.[45]

One of the problems for halal food products is the competition with non-halal products produced. In addition, with the changing lifestyles of non-Muslims that dominate the trade in meat and processed food products as they are today, to ensure the halalness of a product, a halal certification is provided, which can be issued by one of more than one hundred halal certification bodies around the world. [6] In Indonesia, it is known as the Indonesian Ulema Council (MUI). The MUI institution supervises products circulating in the community by providing halal certificates, products that already have a certificate can include a halal label to process the product. Its content has passed the inspection and is free from elements prohibited by Islamic religious

[4] Abdalla M. Bashir et al., "Factors Affecting Consumers' Intention towards Purchasing Halal Food in South Africa: A Structural Equation Modelling," *Journal of Food Products Marketing* 25, no. 1 (January 2, 2019): 26–48, https://doi.org/10.1080/10454446.2018.1452813.

[5] Bayu Al Rochmanto, "Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Norma Religius Tehadap Sikap Konsumen Dalam Niat Mengkonsumsi Produk Makanan Dan Minuman Halal," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014).

[6] Kashif Farhat, Wajeeha Aslam, and Bin Mohd Mokhtar Sany Sanuri, "Predicting the Intention of Generation M to Choose Family Takaful and the Role of Halal Certification," *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 3 (January 1, 2019): 724–42, https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2017-0143.

teachings. Therefore, the product has become a halal category, does not contain haram elements, and can be consumed safely by Muslim consumers. Based on these criteria, a product with a high guarantee of halalness can likely cause consumer interest in buying a product at some point.[7]

Based on the Theory of Planned Behaviour (TPB), individual behavior is influenced by behavioral interests. Behavioral interest is a function of an individual's attitude toward behavior (Attitude Toward Behaviour / ATB), subjective norms (Subjective Norms / SN), and perception of behavioral control (Perceived Behavioral Control / PBC). [8] Consumer behavior is closely related to the problem of decisions made by a person in competition and the determination to obtain and use goods and services. Consumers make many kinds of considerations to make decisions in purchasing. Many large companies research consumers' purchasing decisions in detail to answer questions about what consumers buy, where consumers buy, how and how much consumers buy, and why consumers buy. A purchasing decision is a consumer's action to buy or not a product.

Factors that influence the behavior of consumers' purchasing decisions are cultural, social, personal, and psychological. Cultural factors are the most basic cause of a person's desires and behavior. Social factors influence consumer behavior, including small group, family, and consumers' roles and social status. Personal characteristics such as age and stage of the buyer's life cycle are also influenced by personal factors. Psychological factors influencing consumer purchases are motivation, perception, learning, and

[7] Listyoningrum and Albari, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya."

[8] Gerd Bohner and Michaela Wanke, *Attitudes Attitude Change*, *Attitudes and Attitude Change* (Psychology Press, 2014), https://doi.org/10.4324/9781315784786.

beliefs and attitudes. In Islam, the behavior of a Muslim is a consumer.[9]must reflect his relationship with Allah Almighty. A person's worship and faith in Allah Almighty, either by spending income for his benefit or charity for others.[10][11]

Ponorogo is a regency in East Java Province whose community is developing, with many packaged food products introduced among the public and the level of consumption that increases every year, supported by data from the Central Statistics Agency, which states that the Consumer Price Index (CPI) in 2021 is at 105.41. The author is interested in conducting research among the younger generation because individuals who enter the stage of young adulthood (between the ages of 18 to 35 years) are consumers with a more consumptive lifestyle level compared to the previous generation. The younger generation, or *digital native* generation, that is, the generation that grew up in an all-digital environment. According to Hilman Fajrian, millennials are optimistic, *goal-oriented,* independent, hopeful, obsessed with success, confident, lifestyle-conscious, and dependent on technology. In addition, 58% of millennials like to shop, 65% like culinary, and 20% love to travel. [12] With digitalization and science that is easy to get in, this changes the pattern of consumer behavior in this *digital native* generation so that they become potential targets for service or product providers. Students are included in this *digital native* generation; based on

[9] Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2014).

[10] Suharyono Suharyono, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 4 (RajaGrafindo Persada, 2018), https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1216.

[11] Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2016).

[12] Lucky Radi Rinandiyana, Ane Kurniawati, and Dian Kurniawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Oleh Generasi Milenial Pada Industri Kuliner Di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 3, no. 1 (2017): 18–27, http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jem/article/view/322.

several interviews conducted before the survey, it was found that they were interested in buying food products due to various *reviews* on social media, as well as the assumption that if they had tried it first compared to their peers, then they would feel more contemporary and follow trends. Therefore, the author chose the population of FEBI IAIN Ponorogo students because of the supporting data above and the phenomenon of *lifestyle* shifts among young people who consume many contemporary food products.

Previous research on knowledge has been carried out by Sumarsono and Yayat Giatno with the belief[13]that there is no positive influence of consumer knowledge on the purchase decision of environmentally friendly halal products because consumers in their purchasing decisions are still driven by factors such as price, quality, and product benefits only, for environmentally friendly knowledge has not been a consideration for consumers in purchasing a product.

The second research related to knowledge is a study conducted by Tri Nur Fadhilah et al.,[14] mentioning that knowledge simultaneously and partially has a positive effect on the decision to buy halal food because, according to the theory, the level of knowledge, namely, the dominant knowledge, is essential for forming consumer behavior (*event behavio*r).

In addition to research on this knowledge, there is also research on halal labeling. Saleh Sitompul has carried out previous research on halal labeling.[15] With the result, the halal label has a

[13] Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia Dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=642529.

[14] Tri Yuniarti et al., "Pengaruh Pengetahuan Kesehatan Lingkungan Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 9, no. 2 (2020): 78–82, https://doi.org/10.52657/jik.v9i2.1233.

[15] Saleh Sitompul, "The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks," *Journal of Economics, Finance*

negative effect and is not significant on the decision to purchase Emina cosmetic halal products in Medan City. Meanwhile, there is also research that has been conducted by Eri Agustian with the result that there is a significant influence on the purchasing decision of Wall's food products. [16]

Based on data on the condition of changing consumer behavior patterns in the *digital native* generation, as well as the inconsistency of previous research, the author is interested in conducting a study entitled "The Influence of Halal Knowledge and Labeling on Food Product Purchase Decisions on Students of the Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Ponorogo."

This study aims to determine the behavior patterns of *the digital native* generation in the region towards the phenomenon of *lifestyle* shifts that consume many contemporary food products. The difference with the previous one is that this study focused on contemporary food products known through social media that have a large following among young people aged 18-35 years, such as noodle products, ramen, coffee, and *all-you-can-eat* products in the Ponorogo area. The results of this research are intended to see the influence of young people's knowledge on products and whether they pay attention to the importance of halal labeling in buying products. The impact of this research can be used as a reference for culinary entrepreneurs in Ponorogo to include halal labeling in product promotion and not just follow *trends*.

The approach used in this study is a quantitative, quantitative analysis tool where the results of the analysis are

and Management Studies 04, no. 03 2021, https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i3-05.

[16] Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya," *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (2013): 205, https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516.

presented in the form of numbers which are then explained and interpreted in a description.[17]

The data source used is the primary data. Primary data is raw data taken by the researcher from the primary source for his research, and the data did not previously exist. Primary data were obtained through[18] e questionnaires and direct interviews with respondents.

The total population in this study was 3,730 active students of FEBI IAIN Ponorogo. The number of samples in this study can be obtained based on the following Slovin formula reference:

$$n = \frac{3{,}730}{1 + 3{,}730\ (10\%)^2} = 98 \text{ people rounded up by 100 people.}$$

This sampling technique is known as *Purposive Sampling*, a sampling technique with a specific purpose, both expert and scientific considerations. This study used 100 samples with [19]*Purposive sampling* techniques / conditional samples, namely: (1) Diverse Muslims, (2) Domicile in Ponorogo, (3) Aged more than 18 years - 25 years.

According to Sugiyono, the dependent variable is a bound variable influenced by a free variable. Meanwhile, an independent variable is a variable that affects or causes a change in the value of the dependent variable. The variables in this study are as follows.[20]

1. Purchasing decision as an independent variable (Y): A purchase decision is a concrete action by underarm

[17] Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005," *Pokok-Pokok Materi Statistik* 2 (2001).

[18] Azuar Juliandi, Irfan Irfan, and Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Umsu Press, 2014).

[19] Juliandi, Irfan, and Manurung.

[20] Sugiyono., . . *Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta* (Bandung: Alfabeta, 2010).

consumers interested in a product. Consumers are moved to buy and eat products that race against the teachings of Islam.

2. Influence of Knowledge as a dependent variable (X1): The reason for this case is consumer knowledge related to halal and haram laws in Islam as well as knowledge related to food ingredients listed in the packaging under Islamic law.
3. Labeling Halal as a dependent variable (X2): Information about the halalness of a product will usually be listed on the packaging. This label is for consumers to know whether the production process and the materials used are under Islamic law.

The formulation of the problem in this study is (1) the influence of knowledge on decisions both simultaneously and partially and (2) the influence of halal labeling on decisions both simultaneously and partially.

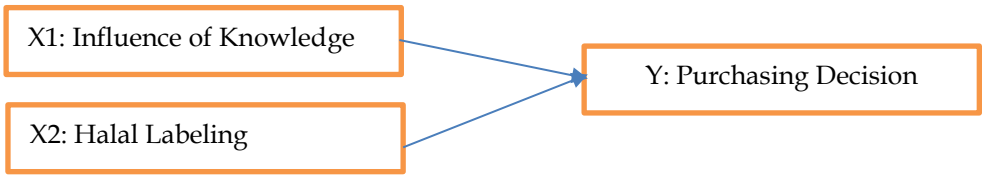

Figure 1. Research Design
Source: Data processed by researchers

PRODUCT KNOWLEDGE

Product knowledge is a collection of various kinds of information about the product. Product Knowledge refers to all information that can be accounted for in the minds of consumers that matches the knowledge of halal products. Higher knowledgeable consumers will be more realistic in the selection, as expected. A person's knowledge of halal products is crucial for determining consumer behavior. The ease of consumers knowing the information about food product ingredients that show the halalness of a product can

affect consumers' interest in buying. Two kinds of thinking are distinguished; the first is objective knowledge, information that can be accounted for and stored for an extended period. While the second [2122]*Self-assessed* concerns how a person thinks about how far he knows about the knowledge of halal food products.[23]

Product knowledge is an intrinsic clue that is essential for consumers to consider when evaluating the product before making a purchase. Consumers use intrinsic instructions first in assessing a product, such as product function or quality. However, if intrinsic instructions need to be obtained correctly, consumers will use extrinsic instructions, such as a brand image. [24] Another study states that a consumer needs to know the product before liking it and then buying it.[25]

The knowledge indicators, according to Engel, Blackwell, and Minard, are divided into three, namely:[26]

1. Product knowledge. Product knowledge is a collection of various information regarding the product. This knowledge includes the product category, brand, product terminology,

[21] Sutisna and Miftah F Rakhmat, *Perilaku konsumen & komunikasi pemasaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

[22] Fauzia Edriana Pangestuti Aniesa Samira Bafadhal Diah Retno Sufi, "Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian (Survei Pada Gen-M Konsumen Cadbury Dairy Milk Di Kota …," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB* 66, no. 1 (2018): 37–46, http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2776%0Ahttp://repository.ub.ac.id/165515/.

[23] Dewi Nabila Achmad and Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Di Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 215–29.

[24] J. Grosset et al., "Activite De La Rifampicine Administree Quotidiennement Et D'Une Maniere Intermittente Sur La Tuberculose Experimentale De La Souris," *Pathologie Biologie* 31, no. 5 (1983): 446–50.

[25] James Engel, "F, Roger. D, Black Well And Paul, W. Miniard, 1995," *Perilaku Konsumen*, n.d.

[26] Engel.

product attributes or features, product prices, and beliefs regarding the product.

2. Purchasing knowledge. Purchasing knowledge includes various information processed by consumers to obtain a product. For example, product knowledge consists of where to buy a product and when to buy the product.
3. Knowledge of usage. A product will benefit consumers if the product has been used or consumed by consumers so that the product can provide maximum benefits and high satisfaction to consumers; then, consumers must be able to use or consume the product correctly.

The author's initial hypothesis regarding the level of knowledge influenced the purchase decision because the higher the level of knowledge a person will be, the more concerned with complicated things. This finding is in line with previous research conducted by Yuniarti.[27] This finding produced knowledge conclusions simultaneously and partially positively affects the decision to purchase halal food because, according to the theory, the level of knowledge, namely the dominant knowledge, is essential for forming consumer behavior (*event behavior*).

HALAL LABELING

A label is a part of a product that conveys information about the product and the seller. A regular label is part of the packaging or can be an etiquette (identification) associated with the product. Halal, according to the Ministry of Religion contained in the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, No. 518 of 2001, concerning the examination and determination of halal food is: Halal is a food product, medicine, cosmetics, and other products that do not contain elements or ingredients that are haram

[27] Yuniarti et al., "Pengaruh Pengetahuan Kesehatan Lingkungan Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan."

or prohibited for consumption by Muslims, and its processing or production process does not conflict with Islamic law.[28]

A halal label is a label that contains halal information with halal standards according to the Islamic religion. Based on the Indonesian Government Regulation Number 69 of 1999 concerning food labels and advertisements, a label is any information about a product in the form of an image, writing, combination of both, or other forms that are included in the product, inserted into, pasted on, or are part of the product packaging:

1. Images, which result from imitations of shapes or patterns (animals, people, plants), are made with stationery scribbles.
2. Writing is the result of writing that is expected to be read.
3. The combination of images and writing combines the results of the image and writing that is made into one part.
4. Sticking to the packaging can be interpreted as being attached (intentionally or unintentionally) to the packaging (protective product).

Halal labeling is not only a means of meeting outward needs but, at the same time, a spiritual God. [29] According to the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2012 concerning Food in origin 96, it is explained that providing labeling aims to provide accurate information and explain to the public before buying and consuming. Furthermore, with this halal labeling, it is helpful to provide a sense of security for consumers and provide guarantees that the food consumed is safe from non-halal elements and is produced ethically.

[28] Hari Winarto, "Strategi Pemasaran," *Makalah Ilmiah Ekonomika*, 2011.

[29] Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, and Singkeru Rukka, "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 282, https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.84.

The initial hypothesis of this study regarding halal labeling affects purchasing decisions because halal labeling increases confidence in product safety. This result is in line with the research conducted by Dini Moneta, who instigated the conclusion that halal labels affect the purchase decision of packaged food products.[30]

PURCHASING DECISION

Buying interest is something related to the consumer's plan to buy. Therefore, buying interest is a mental statement from consumers that reflects on the purchase plan of several products with a specific brand. Therefore, purchasing decisions made by consumers to buy halal food products are essential for companies to pay attention to because, in addition to increasing company profits, the number of purchases can increase the market share of products.[3132]

1. Buying Decision Theory

According to Kotler, the theory of purchasing decisions is the buyer's decision about the goods purchased. Consumers make purchasing decisions when they are interested in a product. In order to meet their daily needs and desires, consumers must decide to purchase a product.[33]

2. Buying Decision Indicator

The consumer will be faced with the decision to buy a product in order to meet his daily needs and desires. Consumers will go through five stages in purchasing a product. The indicators of each

[30] Era Susanti, Sari Nilam, and Amri Khairul, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2018).

[31] dan Liana. C D. Durianto, "Analisi Efektivitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh Di Jakarta Dan Sekitarnya Dengan Menggunakan Consumen Decision Model," *Jurnal Ekonomi Perusahaan* 11, no. 1 (2004): 55.

[32] Philip Kotler et al., "Marketing Management," 2019.

[33] Kotler et al.

consumer's purchasing decision will vary; in more regular purchases, consumers often omit or reverse the order of several stages:[34]

1. Introduction to Needs. This result is the first stage consumers go through in the purchase decision process, where they realize a problem or need.
2. Information Search. This stage is the buyer's decision process, where consumers seek more information about their needs. Consumers can obtain information from various sources. These sources include private sources (family, friends, neighbors, associates), commercial sources (advertising, salespersons, websites, dealers, packaging, displays), public sources (mass media, organizations, consumer ratings, internet searches, and sources of experience (handling, inspection, product usage).
3. Alternative Evaluation. This stage is the buyer's decision process, where consumers use the information to evaluate alternative brands in a group of options. How consumers evaluate alternatives depends on personal consumers and specific purchasing situations.
4. Purchasing Decisions. A consumer's purchasing decision is that the consumer buys the most preferred brand, but two factors can be between the purchase intention and the purchase decision.
5. Post-purchase Behavior. The buyer's decision process is the stage in which the consumer takes the following action after the purchase, based on their satisfaction or dissatisfaction.

HYPOTHESIS TESTING

1. Test of Classical Assumptions

a. Normality Test

The normality test aims to determine the variables X1, X2, and Y and whether they are typically distributed. The Normality Test in this study uses the standard statistical test method of P-Plots. According to Imam Ghozali, the

[34] Kotler et al.

regression model is usually distributed when the plotting (dots) depicting the actual data follows a diagonal line.[35]

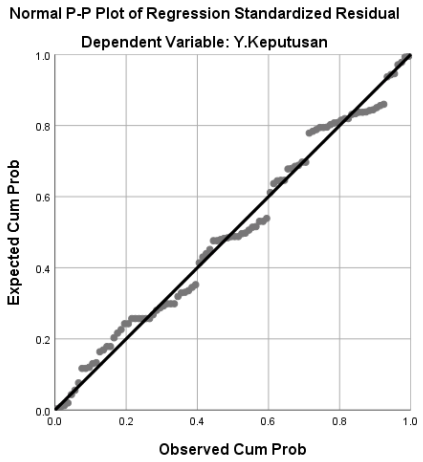

Figure 2. Normality Test Results
Source: Primary Data that has been processed

Based on the standard probability plot graph image, it can be seen that the distribution of points around the diagonal line means that the data is standard so that the regression model can be used for probability prediction.

b. Multicollinearity Test

Multicollinearity is a test used to determine whether, in a regression model, a correlation between independent variables is found. If there is a correlation, a multicollinearity problem must be overcome. The data is said not to occur multicollinearity if the tolerance value > 0.1 and the VIF value < 10.[36]

Based on the data processing results, the tolerance value of the two independent variables is 0.822 > 0.1, and

[35] Ghozali Imam, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV," *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*, 2011.

[36] Imam.

the VIF value of the two independent variables is 1.217 < 10. So it can be concluded that the regression model of this study does not occur multicollinearity.

c. Heteroscedasticity test

The Heteroskedasticity test is a test that aims to determine whether a regression model occurs in the inequality of variation from the residual of one observation to another. This test looks at a plot graph between the predicted value of the dependent variable (zpred) and its residual value (stressed). Heteroskedasticity occurs if the plot graph shows a specific pattern (wavy, widens and narrows).[37]

The SPSS test result image shows that the resulting points are spread randomly and do not form a specific pattern or trend line. The results of this test show that this regression model is free from heteroskedasticity problems.

2. Data Analysis Techniques

a. Multiple Linear Regression Analysis Test

The multiple linear regression analysis tests aim to determine the relationship and influence of the independent variable on the dependent variable in this study.

[37] Imam.

Coefficients

Type	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 **(Constant)**	4.773	1.917		2.490	.014
X.1.Knowledge	.087	.081	.077	1.083	.281
X.2.Labeling	.960	.093	.736	10.348	.000

a. Dependent Variable: Y.Decision

Table 2. Coefficient Table
Source: Primary Data that has been processed

Based on the results of the SPSS process above, we can get the equation of the multiple linear regression formula as follows:

Y = 4.773 + 0.087 (x1) + 0.960 (X2) + e

The explanation of the formula above is as follows:

1) The value of the constant (a) of 4.773 means that if the variable of knowledge and halal labeling is constant (0), it will increase the buying decision by 4,773.
2) The regression coefficient of the knowledge variable (X1) is positively valued at 0.087, meaning that if the knowledge is increased by one unit with a record of a constant halal labeling variable, it will increase the buying decision by 0.087.
3) The regression coefficient of the knowledge variable (X2) is positively valued at 0.960, meaning that if the halal realization is increased by one unit with a record of the

constant knowledge variable, it will increase the buying decision by 0.960.

b. Test hypothesis partially (t-test)

The t-test aims to determine the individual (partial) variables X1 and X2 with varied Y. The results of the t-test can be seen in Table 2:

1) Knowledge does not affect purchasing decisions because the calculated value < t-table or 1.083 < 1.984.
2) Halal labeling significantly affects purchasing decisions because the calculated value > t-table or 10.348 > 1,984.

c. Simultaneous Hypothesis Test (F)

The F aims to determine the influence of independent variables simultaneously or together with dependent variables.

From the results of the SPSS test, it is known that halal knowledge and labeling simultaneously have a significant effect on purchasing decisions because the significance value is 0.000 < 0.05 and the calculated F value > a from the F table or 71.645 > 3.09. This result means that the variables X1 and X2 together affect Y.

d. Coefficient of Determination Test

The coefficient of determination aims to calculate the magnitude of the independent variable (Halal Knowledge and Labeling) against the dependent variable (buying decision). Based on the table above, R Square is 0.596, meaning that 59.6% of knowledge variables and halal labeling affect purchasing decisions. The remaining 40.4% is influenced by other factors outside knowledge and halal labeling.

THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE VARIABLES ON PURCHASING DECISIONS

The results of previous research conducted by Tri Nur Fadhilah et al.,[38] this research concluded that knowledge simultaneously and partially positively affected the decision to purchase halal food. Previous research on consumer knowledge of purchasing decisions made by Sumarsono[39] resulted in a different conclusion that there was no knowledge influence on the decision of the review.

Based on testing using SPSS, the analysis of the t-test for knowledge variables obtained the result that the calculated t value $<_{t\ table}$ or 1.083 < 1.984 means that the variability of knowledge does not affect purchasing decisions. This result is under the research conducted by Sumarsono[40] concluded that consumer knowledge has no positive influence on purchasing environmentally friendly halal products.[41] This research uses environmentally friendly halal products, and the public needs to know the criteria for environmentally friendly products widely. Furthermore, the respondents of this study need to learn the meaning of the term environmentally friendly products. In contrast, this study used contemporary food products with social media targeting the digital native generation.

Based on the results of the SPSS test data, this study shows that respondents rely not only on knowledge of raw materials and production processes under Islamic law. Based on the interview

[38] Kansa Fadhilah, "Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Yang Berdampak Pada Loyalitas (Studi Pada Konsumen Lipstik Wardah Di Semarang)" (Universitas Dian Nuswantoro, 2016).

[39] Adi Sumarsono et al., "Optimalisasi Keterampilan Merajut Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Warga Saat Pandemi," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 4, no. 2 (July 9, 2021): 220, https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i2.9283.

[40] Sumarsono et al.

[41] Sumarsono et al.

results, the highest factor in the purchase decision is the price. When the price of a food product is appropriate and affordable for the respondent, the respondent will decide to buy it. This result is under the fact regarding the people in Ponorogo, which is still in the development stage with a UMR level of Rp. 1,954,281.00-so that price thinking is still an essential factor.

Ariezal and Burhanudin[42], in their research, also explained the relationship between differences in knowledge between Muslims and their purchasing decisions. Muslims are required to consume halal food, but a Muslim does not necessarily know about a product's halal haram. Muslims who have lower knowledge tend to use faith in the decision-making of buying such products. For example, if a food seller is Muslim, consumers in this group believe that the product sold is halal.

Consumers with low levels of knowledge also tend to share their experiences without filters. This fact is hazardous; if they consume non-halal food products but get a good experience with the product/brand, they will share it with others and trigger others to do the same. Therefore, consumers in this group should be given education about halal products because they tend to want to avoid finding information about the halalness of products, both from the ingredients and how to make them.

Conversely, consumers with higher halal knowledge are more cautious in making decisions. Adequate knowledge makes consumers more concerned about ingredients and how to make halal food products. For them, consuming halal food is an absolute thing and does not compromise on something that still needs to be

[42] Muhammad Burhanudin and Rachma Indrarini, "Efisiensi Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah, 2020), https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.221.

clarified about halal. Consumers in this group have a high sense of knowledge of the product to be purchased, they will look for information before deciding to buy the product, and if they do not get clarity, they do not decide to buy.

THE EFFECT OF HALAL LABELING VARIABLE ON BUYERSS' DECISIONS

Eri Agustian carried out the results of previous research on halal labeling variables.[43] with the result that there was a significant influence on purchasing decisions. [44]However, some studies have produced the opposite conclusion; namely, the research conducted by Nicky Oktaviani states that halal labels have no influence on the purchase decision of imported processed food products. Based on testing using SPSS, the t-test analysis for halal labeling variables obtained results that the t value of the table > t or 10.348 > 1.984, which means that the halal labeling variable significantly affects purchasing decisions. [45] This finding is under research conducted by Eri Agustian with the result that there is a significant influence on the purchasing decision of Wall's food products. The difference between this research and the research conducted by Eri Agustina is based on the research object, whereas Eri's research only focuses on Wall's products. However, this study used the object of food products, both imported and non-imported.

---

[43] Nurul Novita and Burda Agustian, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen Starbucks Grand Indonesia" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020).

[44] Luc Vinet and Alexei Zhedanov, "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689–99, https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201.

[45] Sujana Sujana and Eri Agustian, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (August 24, 2013): 169–78, https://doi.org/10.37641/jimkes.v1i2.264.

The results of the SPSS test data showed that respondents buying the product saw the halal label listed on the food packaging. This result happens because the demographics of Ponorogo Regency, which has many Islamic boarding schools, affect the religious knowledge of its people, especially young people, where people believe that the halal label is safe for consumption and is under the assumption that a product with the MUI halal logo is considered halal because MUI itself is a trusted institution. Therefore, if there is a halal logo, it will increase the sense of security in consuming these food products.

Researchers than Wibowo and Madusari also support the effect of halal labeling on purchasing decisions[46], who, in their research, explained the relationship between halal labeling and purchasing decisions. A label is a part of marketing, which explains the ingredients, how to make them, and the essential elements of a product. This halal labeling aims to meet market demands and protect the creeds of general and Muslim consumers. Therefore, halal labeling will affect consumers, especially Muslims, to use the product.

A large number of imported food products is also one of the concerns of Muslims in deciding on purchases. The pork oil derivatives on the label are often unknown and make the Muslim assumption that the product is halal. Therefore, consumers prefer halal certainty by looking at the packaging labels. With this halal labeling, the level of trust in the halalness of the product is increasing.

[46]Benny Diah Madusari and Dwi Edi Wibowo, "Potensi Dan Peluang Produk Halal Berbasis Rumput Laut," *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 53, https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3112.

CONCLUSION

Based on the test results using SPSS, the knowledge variable partially does not affect the decision to purchase food products for FEBI IAIN Ponorogo students. The price element still dominates purchasing decisions, and Muslims' knowledge levels affect their decision-making. The variable liberalization of halal has a positive effect on purchasing decisions because Ponorogo Regency still has many Islamic boarding schools, so Islamic laws are still felt in the community and affect the community's belief that halal food has been on the halal label issued by the Indonesian Ulema Council Institute. The F test shows that young people still utilize halal labels to guide food production, both imported and non-imported.

DISCLOSURE

Conflicts of Interest

The author declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Funding Statement

This research received no external funding

REFERENCE

Achmad, Dewi Nabila, and Khusnul Fikriyah. "Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity, Dan Kualitas, Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik, Wardah Di Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 215–29.

Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (2013): 205. https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516.

Aniesa Samira Bafadhal Diah Retno Sufi, Fauzia Edriana Pangestuti. "Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan

Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian (Survei Pada Gen-M Konsumen Cadbury Dairy Milk Di Kota …." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB* 66, no. 1 (2018): 37–46. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2776%0Ahttp://repository.ub.ac.id/165515/.

Bashir, Abdalla M., Abdullah Bayat, Samuel Oladipo Olutuase, and Zul Ariff Abdul Latiff. "Factors Affecting Consumers' Intention towards Purchasing Halal Food in South Africa: A Structural Equation Modelling." *Journal of Food Products Marketing* 25, no. 1 (January 2, 2019): 26–48. https://doi.org/10.1080/10454446.2018.1452813.

Bohner, Gerd, and Michaela Wanke. *Attitudes and Attitude Change*. *Attitudes and Attitude Change*. Psychology Press, 2014. https://doi.org/10.4324/9781315784786.

Burhanudin Muhammad, and Rachma Indrarini. "Efisiensi Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah, 2020. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.221.

D. Durianto, dan Liana. C. "Analisi Efektivitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh Di Jakarta Dan Sekitarnya Dengan Menggunakan Consumen Decision Model." *Jurnal Ekonomi Perusahaan* 11, no. 1 (2004): 55.

Diah Madusari, Benny, and Dwi Edi Wibowo. "Potensi Dan Peluang Produk Halal Berbasis Rumput Laut." *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 53. https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3112.

Engel, James. "F, Roger. D, Black And Paul, W. Miniard, 1995." *Perilaku Konsumen*, n.d.

Fadhilah, Kansa. "Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Yang Berdampak Pada Loyalitas (Studi Pada Konsumen Lipstik Wardah Di Semarang)." Universitas Dian Nuswantoro, 2016.

Farhat, Kashif, Wajeeha Aslam, and Bin Mohd Mokhtar Sany

Sanuri. "Predicting the Intention of Generation M to Choose Family Takaful and the Role of Halal Certification." *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 3 (January 1, 2019): 724–42. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2017-0143.

Grosset, J., Ch Truffot Pernot, H. Lecoeur, and C. C. Guelpa Lauras. "Activite De La Rifampicine Administree Quotidiennement Et D'Une Maniere Intermittente Sur La Tuberculose Experimentale De La Souris." *Pathologie Biologie* 31, no. 5 (1983): 446–50.

Hasan, Iqbal. "Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005." *Pokok-Pokok Materi Statistik* 2 (2001).

Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864.

Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana, 2016.

Imam, Ghozali. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV." *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*, 2011.

Ireland, John, and Soha Abdollah Rajabzadeh. "UAE Consumer Concerns about Halal Products." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 3 (September 20, 2011): 274–83. https://doi.org/10.1108/17590831111164796.

Juliandi, Azuar, Irfan Irfan, and Saprinal Manurung. *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press, 2014.

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman, and Torben Hansen. "Marketing Management," 2019.

Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, and Singkeru Rukka. "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 282.

https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.84.

Listyoningrum, Anggit, and Albari Albari. "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2017, 40–51. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art4.

Novita, Nurul, and Burda Agustian. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen Starbucks Grand Indonesia." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.

Rinandiyana, Lucky Radi, Ane Kurniawati, and Dian Kurniawan. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Oleh Generasi Milenial Pada Industri Kuliner Di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 3, no. 1 (2017): 18–27. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jem/article/view/322.

Rochmanto, Bayu Al. "Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Norma Religius Tehadap Sikap Konsumen Dalam Niat Mengkonsumsi Produk Makanan Dan Minuman Halal." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.

Saleh Sitompul. "The Influence of Exchange Rate, Inflation, OnFor the Results of the Development Assets of Islamic Banks." *Journal of Economics, Finance, and Management Studies* 04, no. 03 2021. https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i3-05.

Sugiyono. . . *Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharyono, Suharyono. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 4. RajaGrafindo Persada, 2018. https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1216.

Sujana, Sujana, and Eri Agustian. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (August 24, 2013): 169–78.

https://doi.org/10.37641/jimkes.v1i2.264.

Sumarsono, Adi, Siti Nurleha, Dicha Ummi Khasanah, Novia Natasya Wardani, Wahyuni Wahyuni, Sriyani Sriyani, Dewi Listiani, and Kasmawati Kasmawati. "Optimalisasi Keterampilan Merajut Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Warga Saat Pandemi." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 4, no. 2 (July 9, 2021): 220. https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i2.9283.

Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=642529.

Susanti, Era, Sari Nilam, and Amri Khairul. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2018.

Sutisna, and Miftah F Rakhmat. *Perilaku konsumen & komunikasi pemasaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2014.

Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689–99. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201.

Winarto, Hari. "Strategi Pemasaran." *Makalah Ilmiah Ekonomika*, 2011.

Yuniarti, Tri, Isnani Nurhayati, Anggie Pradana Putri, and Nur Fadhilah. "Pengaruh Pengetahuan Kesehatan Lingkungan Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 9, no. 2 (2020): 78–82. https://doi.org/10.52657/jik.v9i2.1233.

© 2022 by the authors. They were submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution NoncommercialAttribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Journal of Sharia and Economic Law
Vol. 2, No. 2, December 2022 (pp. 134-151)

THE RELEVANCE OF IBN KHALDUN'S ECONOMIC THOUGHT ON THE PRICES MECHANISM IN MODERN ECONOMY

***Khoirun Nisak*[1]**
[1]Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: khoirunnisak@iainponorogo.ac.id[1]

DOI: 10.21154/invest.v2i2.5092

Received: 2022-10-31	*Revised: 2022-11-11*	*Approved: 2022-11-25*

Abstract: Ibn Khaldun is known as one of the Muslim scholars who made significant contributions to the social sciences, including economics. Ibn Khaldun developed his thoughts on the price mechanism in the market by looking at the condition of Andalusian society at that time. This study aims to discover Ibn Khaldun's thoughts regarding the price mechanism, both from the supply and demand sides, and whether these thoughts remain relevant to today's economic phenomena. The results of the analysis show that naturally, the price in the market is formed due to the process of attraction between demand and supply. This research found that people's tastes are a factor that shifts the demand curve. Meanwhile, product scarcity and production costs shift the supply curve. Ibn Khaldun's thought aligns with modern economic theory and remains relevant to present economic phenomena.

Keywords: *Demand and supply analysis; Ibn Khaldun; Muqaddimah; Price mechanism*

Abstrak: Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi besar pada bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Ibnu Khaldun telah mengembangkan pemikirannya mengenai mekanisme pembentukan harga di pasar dengan melihat kondisi masyarakat Andalusia waktu itu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pembentukan harga baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan dan apakah pemikiran tersebut tetap relevan dengan fenomena ekonomi hari ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara alamiah harga di pasar terbentuk karena proses tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Dari penelitian ini ditemukan bahwa selera masyarakat menjadi faktor yang menggeser kurva permintaan. Sedangkan kelangkaan produk dan biaya produksi adalah faktor yang menggeser

kurva penawaran. Pemikiran Ibnu Khaldun sejalan dengan teori ekonomi modern dan tetap relevan digunakan dalam melihat fenomena ekonomi masa sekarang.

Keywords**:** *Ibnu Khaldun; Mekanisme harga; Muqaddimah; Permintaan dan penawaran*

INTRODUCTION

The history of Islam has provided valuable lessons and values that can be implemented into life for both today and future generations. As a *syumul* (comprehensive) religion, Islam provides signposts for humans to regulate all aspects of life, including economic problems.

The International Islamic University of Islamabad has conducted research stating that it is estimated that about 400 verses of the Qur'an are directly related to the economy. In addition to the Qur'an, many hadiths also talk about its economy and practices during the time of the Messenger of Allah. In other words, although the Qur'an and As-Sunnah are not economic textbooks, they contain the basics of economic theory that can be implemented in life[47].

History also records that Muslim scholars have a very large role in the development of science. Some of the names that are often discussed to this day include Abu Yusuf (d. 798 AD), Al-Ghazali (d. 1111 AD), Ibn Taimiyyah (d. 1328 AD), Ibn Khaldun (d. 1406 AD), Al-Maqrizi (d. 1442 AD), and many others. This article will only focus on the thoughts of one figure who had a major contribution to the field of economics, namely, Ibn Khaldun.

Ibn Khaldun was a great scholar with expertise in economics, history, politics, and education. He was born in Tunisia in 732 H or 1332 AD with the full name Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin bin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Ibn Khaldun grew up in difficult tribal and political

[47] Irfan Sauqi Beik, "Islamisasi Ilmu Ekonomi," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 183–204.

conditions, so he had to move around in Morocco, Egypt, and Andalusia. Ibn Khaldun lived when the Islamic world was divided into small states[48].

Ibn Khaldun grew up and developed as a man who loved science. He studied various disciplines and wrote and taught them. He wrote many books that are analyzed and referenced by many people to this day. His contributions to thought and work are recognized and studied even by non-Muslims.

Ibn Khaldun wrote a monumental work on history entitled *Al-Ibar.* The book is organized into seven volumes, namely, *Muqaddimah* (one volume), *Al-Ibar* (four volumes), and *At-Ta'rif* bi Ibn *Khaldun* (two volumes). Mainly *Muqaddimah* contains much discussion about history. However, because Ibn Khaldun was a scholar who mastered many disciplines, he included economic theories such as price, production, and distribution [49].

The author has conducted several studies to analyze the thought of Ibn Khaldun in economics. Research conducted by Luqman Hakim Handoko states that Ibn Khaldun is among the Muslim scientists whose work is most often discussed along with 22 other Muslim scientists[50]. Ibn Khaldun's economic thinking is often associated with five major concepts: sharia, government, society, ownership, and free and fair economic activities[51].

---

[48] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah (Terjemah)*, Ketiga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

[49] Dewi Martina, "(Kholdunomic) Menelaah Pemikiran Ibnu Khaldun," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 9, Nomor 1 (2015): 82–83.

[50] Luqman Hakim Handoko, "History of Islamic Economic Thought: A Content Analysis," *Library Philosophy and Practice* 2020, no. October (2020): 1–14.

[51] Muhamad Mujahidin, "Ibn Khaldun ' s Economic Thought," *Ibn Khaldun's Economic Thought Mujahidin,* 87192, no. 87192 (2018): 87192.

Meanwhile, Kamariah[52] and Wulpiah explained [53] more about the points of Ibn Khaldun's thinking in the field of microeconomics. Meanwhile, Khairil Henry explained the relevance of Ibn Khaldun's thoughts on economics to modern economic theory[54]. Bahrul Ulum and Mufarrohah conducted another study to analyze the distribution theory Ibn Khaldun carried out, which included salary, profit, and taxes[55].

In addition to economic theory, some researchers associate Ibn Khaldun's economic concepts with social and political dynamics[56]. This research can be understood because Ibn Khaldun is a Muslim scientist with multidisciplinary expertise, including economics, society, and politics, which are all discussed in the book of Muqaddimah. For his contributions to the field of Islamics economic thought, many parties often refer to Ibn Khaldun as the father of Islamic economics [57].

Ibn Khaldun wrote many discussions divided into six main chapters in the Muqaddimah. In particular, the study of economics is discussed in chapter five, entitled "livelihoods and their

---

[52] K Kamariah, "Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (2022): 17–33.

[53] Wulpiah, "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar," *ASY-SYAR'YYAH* 1, no. 1 (2016): 42–62.

[54] Khairil Henry, "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10064.

[55] Bahrul Ulum and Mufarrohah, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan," *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)* 1, no. 2 (2016): 17–32.

[56] Yosi Aryanti, "Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik Ibn Khaldun's Economic Thought; Social Economic and Political Dynamics Approach," *Jurnal Imara*, 2018.

[57] Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun," *Economica: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016): 103.

obligations."In this chapter, Ibn Khaldun explains economic theories such as the division of labor, price and market mechanisms, demand and supply, production, agriculture, international trade, and market structure (Ibn Khaldun specifically discusses the monopoly market).

Ibn Khaldun used a sociological and juridical approach in analyzing the economic activity that was taking place at that time[58]. The sociological approach is carried out by observing people's economic activities, such as transactions in the market. So that the results of studies conducted on economic activities and their problems will produce concrete evidence based on empirical studies. While the juridical aspect is a law or regulation used to regulate economic activity, so it can run well.

Khazanah Islam has its institution as the regulator and enforcer of *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, namely, the institution of *Al-Hisbah.* One of its tasks is to realize a just and orderly socioeconomic life. The Hisbah (*muhtasib*) officer ensures that economic activities in the market and society run fairly according to the market mechanism and that there is no fraud in it[59].

The research on Ibn Khaldun's thoughts conducted by previous researchers is more theoretical and conceptual. In addition, the research conducted discusses all economic theories of Ibn Khaldun and has not focused on one point of thought or theory. This Penelitian will discuss something other than Ibn Khaldun's entire thought in economics. However, specifically, it will explore Ibn Khaldun's thoughts on the mechanism of price formation in the market, as stated in the book of Muaqaddimah. Not stopping here,

[58] Nurul Huda, "Epistemologi Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun," *Proceeding of International Conference On Islamic Epistemology*, 2016, 211–19.n

[59] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Terjemah)* (Bekasi: Darul Falah, 2006).

this research will also analyze the relevance of Ibn Khaldun's thoughts on the mechanism of price formation in the market to the prevailing economic conditions. So, this research will be rich because it makes the theory built by Ibn Khaldun hundreds of years ago the basis for analyzing the phenomenon of price formation that occurs today.

MECHANISM OF PRICE FORMATION

Ibn Khaldun is known as one of the initiators of modern economic theory and gained much attention from both the Islamic and Western worlds. Ibn Khaldun's economic theory, which economists widely discuss, is the mechanism of price formation in the market.

The market is a place to transact and meet human needs. Ibn Khaldun divided human needs into three[60]. *First*, primary needs or *dharuri* related to food to maintain human survival, such as wheat, vegetables, and onions. Once the needs of *dharuri* are met, humans begin to meet secondary needs or *hajat*, and the last is the fulfillment of tertiary or *kamali* needs such as fruits, vehicles, and buildings.

Ibn Khaldun began a discussion about the mechanism of price formation in the market by looking at the phenomenon that occurred at that time. The city will expand as the population grows, so it needs new housing. The impact is that the need for basic food becomes cheaper than other goods, and complementary needs such as fruits and side dishes become expensive.

This phenomenon occurs because if the population is large, everyone will focus on providing their basic needs by farming. Agricultural products that have met the needs of themselves and their families will be sold in the market. So, the number of offerings

[60] Khaldun, *Muqaddimah (Terjemah)*.

of staple foodstuffs becomes abundant, and prices become cheaper than others.

Meanwhile, only some residents can provide complementary needs such as fruits and side dishes. In addition, the tendency of people living in the city is a behavior to be extravagant. However, the number of goods offered could be bigger. So, people will scramble to get the item, ultimately making the price of the item expensive.

The phenomenon is analyzed in modern economic science and is referred to as the mechanism of price formation in the market. The market mechanism is the process of forming prices influenced by several things, such as demand and supply, money, taxes, distribution, and government policies[61]. Islamic economics states that pricing must meet two conditions, carried out by the forces of demand and supply, and must occur willingly to make transactions at that price level[62].

The price created due to this mechanism of demand and supply was also carried out during the time of the Prophet Muhammad SAW. In a hadith narrated by Tirmidzi, Anas R.A. said that the prices of goods were rising at that time. The people of Medina asked the Messenger of Allah to determine the price (*tas'ir* / price *fixing*). However, the Messenger of Allah SAW refused because Allah determines the price [63]. This text indicates that the Messenger of Allah, as the country's leader, did not intervene. The

[61] Faisal Rusdi and Tika Widiastuti, "Rancangan Kebijakan Harga Di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1755, https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1755-1769.

[62] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

[63] Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Tahkim* Vol. XIII, (2017).

Prophet allowed prices to form naturally by the demand and supply mechanism.

Ibn Khaldun rejected pricing by the government or regulators but asked to create a fair price. The interests of sellers and buyers must be protected. This thought is the essence of the hadith about pricing. Exercising control over the market does not mean you have to set prices but eliminate injustices in the market[64].

A leader should only carry out price intervention if the market experiences a distortion or disruption that causes the price formation mechanism of demand and supply to be disrupted. Some conditions that can be categorized as market distortions are *ikhtikar* (hoarding goods to make goods in the market scarce and make prices soar up), *talaqqi rukban* (utilizing the asymmetric information of one of the parties to buy goods at below-market prices), *bai najasyi* (creating false demand to increase prices), *tadlis* (does not mention defects in the goods sold), and *taghrir* (ignorance experienced by sellers and buyers)[65].

Ibn Khaldun wrote a separate chapter on the distortion of the market, namely, monopoly. Monopoly and hoarding of commodities to be issued when the market is in need so that the selling price becomes high is a despicable act and disrupts the market balance [66]. The government carries out an allowed monopoly on goods related to many people's lives to protect prices from the prospering community. Ibn Khaldun argued that the government should be able to provide basic needs for the whole community. In today's context, one of the government's efforts to

[64] Moch. Bukhori Muslim, "Ibn Khaldun: Managing Justice in Economy" 162, no. Iclj 2017 (2018): 129–32, https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.27.

[65] Endis Sopiandi, Didin Hafiduddin, and Hendri Tanjung, "Analisis Distorsi Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2017): 113–30.

[66] Khaldun, *Muqaddimah (Terjemah)*.

provide the community's basic needs can take the form of keeping staples and goods related to many people's lives stable. So that in certain cases, the monopoly carried out by the government is precisely an effort to protect the community.

In addition to price, Ibn Khaldun added other factors that can influence market mechanisms, namely, value theory, work specialization, and the role of government/state. Value theory departs from the assumption that the value of the usefulness of an item is a factor that drives demand. If a product or goods and services has a high value of benefits, people's demand for these goods and services will be high. And vice versa.

However, work specialization or expertise will result in increased output because each worker will concentrate on performing tasks appropriate for the field in which they have expertise so that the work will be more efficient. The impact of more efficient work is the large amount of *output* created and will eventually increase the number of offers in the market.

The last value is the role of the government in eliminating distortions in the market. The absence of distortions in the market makes the market run efficiently, and prices are formed naturally due to the mechanisms of demand and supply.

If concluded, then Ibn Khaldun formulated four factors that influence the market mechanism. These four factors remain the subject of study used today in analyzing modern economic science, especially microeconomics.

THE CONCEPT SUPPLY

Ibn Khaldun examined the bidding by examining the phenomenon that small-town residents consume directly from the results of their work. As a result, no new goods are entering the market. As a result, the supply of goods is limited, and the price is high.

The analysis of the supply side carried out by Ibn Khaldun is implemented in modern science as the *law of supply*. Assuming *ceteris paribus* (other factors besides price are considered to have no effect on the goods offered), then if the price increases, then the number of goods offered will increase, and if the price falls, then the number of goods offered will fall[67].

In addition, he also added that the production costs of the agricultural sector also affect the value of foodstuffs and determine prices[68]. He exemplifies what happened in Andalusia at that time. The Nazarenes urged Muslims to the seaside and hard-to-reach lands, poorly planted and arid. Meanwhile, the Nazarenes controlled fertile territories and produced agriculture easily. As a result, Muslims need money on farm by buying a lot of fertilizer and good seeds. As a result, Andalusian society had expensive production costs and an impact on high selling prices.

The conditions experienced by Muslims in Andalusia can be described in the modern economy using the profit-making formula, namely[69]:

Profit = Total Revenue (T.R.) – Total Cost (T.C.)

The high fertilizer price will increase the total cost or cost that the community must incur. So when selling crops, they have to sell at a high price also so that the total *revenue* or income obtained is greater than the costs incurred. This mechanism is carried out so that farmers can make a profit from the sale of agricultural products.

---

[67] N Gregory Mankiw, *Principles of Economics, 8th Ed.* (Boston: Cengage Learning, 2016).

[68] I.S. Beik and L.D. Arsyianti, "Ibn Khaldun's Contribution on Modern Economic Development: An Analysis Based on Selected Economic Issues," *An International Conference on Ibn Khaldun*, no. August (2006): 1–16.

[69] Mankiw, *Principles of Economics, 8th Ed.*

The scarcity of goods results in prices rising and the cost of production is a factor that shifts the supply curve. If an item is scarce, then the number of products available on the market will decrease; in other words, the number of goods offered will decrease. Vice versa, the product offer will increase if an item is in large quantities. Modern economics defines *scarcity* as the limited resources owned by society.

Both of these things will affect the price level. If the scarcity of goods and the cost of production rise, then prices will rise. Moreover, if scarcity and production costs fall, then the price of an item will fall. The scarcity and cost of production that shift the supply curve specifically can be explained using the following curve.

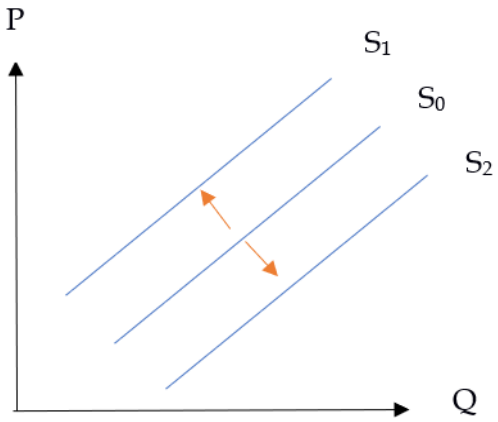

Figure 1. Shifting Supply Curves

Source: image processed by the author

From Figure 1, it can be concluded that if the cost of production rises, the price will rise, and the supply curve shifts from S_0 to S_1, and vice versa. If the production cost falls, the price will fall, and the supply curve will shift from S_0 to S_2.

THE CONCEPT OF DEMAND

Ibn Khaldun also discussed the concept of demand in Muqaddimah. Specifically, Ibn Khaldun mentioned that the carpentry profession (*crafts*) would develop and increase if the demand for carpentry products also increases[70]. Carpentry requires good craftsmanship and taste in art. So, from the wood that is still raw, various kinds of goods can be formed that have different dimensions and are full of harmony.

The demand for carpentry products depends on the tastes of consumers. Consumer tastes in one type of goods and services will increase the demand for such goods. Conversely, if people are not interested in one type of product, then the demand will fall. Modern economics makes taste one of the factors that shift the demand curve. The tastes that can shift the demand curve will be described in the figure as follows.

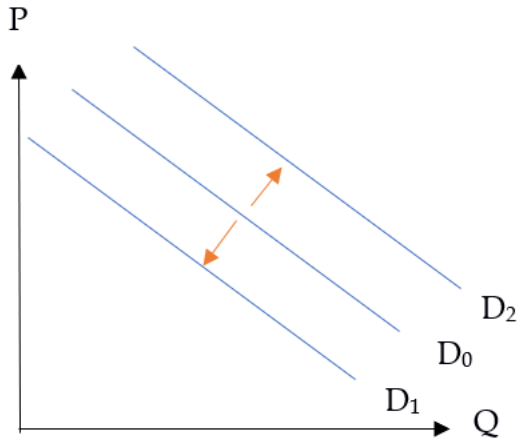

Figure 2. Shifting Demand Curves

Source: image processed by the author

[70] Beik and Arsyianti, "Ibn Khaldun's Contribution on Modern Economic Development: An Analysis Based on Selected Economic Issues."

Figure 2 above is a shift in the demand curve. D_0 is the condition of the request at the starting point. Meanwhile, taste is one of the factors that shift the demand curve. If people's appetite for an item rises, the demand curve will shift from D_0 to D_2, meaning that increasingly goods are requested. Meanwhile, if people do not have an appetite for one type of good, the demand curve will shift from D_0 to D_1, meaning fewer goods are requested. If it is concluded, the factor that shifts the demand curve is people's tastes. Meanwhile, what shifts the supply curve is the scarcity of goods and the cost of production.

Ibn Khaldun's thoughts on price formation and market mechanisms remain to the present day. The modern economy formulates that product scarcity and production costs become factors that shift the supply curve. If the cost of production rises, the industry will reduce its production, ultimately reducing the number of goods offered. Meanwhile, people's appetite for a product will shift the demand curve. People will buy a product if it suits their tastes and vice versa.

THE RELEVANCE OF IBN KHALDUN'S THOUGHT TO THE MODERN ECONOMY

Ibn Khaldun's thoughts on the mechanism of price formation that occurs due to the attraction between supply and demand are in line with the theory of demand and supply in the modern economy. The theory does not only stop at the book of Muqaddimah but can be used as an analytical tool to see the condition of price formation in the market at this time.

Ibn Khaldun made it clear that scarcity is a factor that shifts the supply curve. When the quantity of commodity offered is small, the market is scarce. People will scramble to get these commodities, so in the end, it will make commodity prices expensive. One of the

phenomena that often occur related to this theory is the increase in the price of cooking oil.

From October 2021 until mid-2022, cooking oil in Indonesia experienced a significant price increase. The cause of the increase in cooking oil prices is the plummeting production of vegetable oil and the disruption of the cooking oil supply chain. This experience has resulted in the amount of cooking oil on the market experiencing scarcity. [71] Cooking oil is one of the basic needs, so almost all households in Indonesia need it. The increasing demand for cooking oil commodities are experiencing scarcity in the market will eventually raise the price of cooking oil [72]. The phenomenon of scarcity experienced by the Muslim community in Andalusia and became the basis of Ibn Khaldun in developing the theory of price formation turned out to remain relevant to see the formation and causes of the rise and fall of prices today.

In addition to explaining the mechanism of price formation from the supply side, Ibn Khaldun also explained that price changes could be seen from the demand side. On the demand side, Ibn Khaldun made the taste factor that shifted the demand curve. This mechanism is reflected in the taste of the Andalusian people when they see the work of carpenters who are of artistic value. The higher the public's appetite for the work of carpenters, the demand for these goods increases.

The discussion of taste in the context of microeconomics does not stop at Ibn Khaldun alone. However, it is continued by modern microeconomic theory as one of the shifting factors of the demand curve. One example is the taste that positively affects the demand

[71] Raevita Andriessa, "Minyak Goreng Langka? Ternyata Inilah Penyebabnya!," Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, 2022.

[72] Eka Intan K.P. Sri Hartoyo, "Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng Sawit Domestik," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* XI, no. 2 (2011): 169–79.

for Water hot spring tourism services in West Jawa [73]. Although Ibn Khaldun's distance from today has been missing for hundreds of years, his theory remains relevant to analyze current economic phenomena.

CONCLUSION

The thought of Ibn Khaldun as one of the great scholars of Islam continues to be discussed and relevant to this day. His contributions to economics include several major themes, including the concepts of demand and supply, market mechanisms, division of labor, and agriculture that have been written in the book of Muqaddimah. Ibn Khaldun formulated his demand theory by looking at people's appetite for carpentry products. It is known that taste is one factor that shifts the demand curve. In addition, Ibn Khaldun formulated that two things shift the supply curve: the scarcity of products and the cost of production. What Ibn Khaldun formulated in the Muqaddimah remains in use and relevant to this day as the basic foundation for formulating a modern economic theory. The thoughts of Ibn Khaldun are part of the Islamic caliphate built on a culture of science.

DISCLOSURE

Conflicts of Interest

The author declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Funding Statement

This research received no external funding

[73] Rahyuniati Setiawan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Pariwisata Pemandian Air Panas," *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 1, no. 1 (2019): 53–61, https://doi.org/10.35899/biej.v1i1.2.

REFERENCE

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Terjemah)*. Bekasi: Darul Falah, 2006.

Andriessa, Raevita. "Minyak Goreng Langka? Ternyata Inilah Penyebabnya!" Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, 2022.

Aryanti, Yosi. "Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik Ibn Khaldun's Economic Thought; Social Economic and Political Dynamics Approach." *Jurnal Imara*, 2018.

Baharuddin, Didin. "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Tahkim* Vol. XIII, (2017).

Beik, I.S., and L.D. Arsyianti. "Ibn Khaldun's Contribution on Modern Economic Development: An Analysis Based on Selected Economic Issues." *An International Conference on Ibn Khaldun*, no. August (2006): 1–16.

Beik, Irfan Sauqi. "Islamisasi Ilmu Ekonomi." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 183–204.

Handoko, Luqman Hakim. "History of Islamic Economic Thought: A Content Analysis." *Library Philosophy and Practice* 2020, no. October (2020): 1–14.

Henry, Khairil. "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10064.

Huda, Choirul. "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun." *Economica: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016): 103.

Huda, Nurul. "Epistemologi Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun." *Proceeding of International Conference On Islamic Epistemology*, 2016, 211–19.

Kamariah, K. "Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi*

Islam 2 (2022): 17–33.

Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah (Terjemah)*. Ketiga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Mankiw, N Gregory. *Principles of Economics, 8th Ed.* Boston: Cengage Learning, 2016.

Martina, Dewi. "(Kholdunomic) Menelaah Pemikiran Ibnu Khaldun." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 9, Nomor 1 (2015): 82–83.

Mujahidin, Muhamad. "Ibn Khaldun ' s Economic Thought." *Ibn Khaldun's Economic Thought Mujahidin*, 87192, no. 87192 (2018): 87192.

Muslim, Moch. Bukhori. "Ibn Khaldun: Managing Justice in Economy" 162, no. Iclj 2017 (2018): 129–32. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.27.

Rusdi, Faisal, and Tika Widiastuti. "Rancangan Kebijakan Harga Di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1755. https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1755-1769.

Setiawan, Rahyuniati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Pariwisata Pemandian Air Panas." *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 1, no. 1 (2019): 53–61. https://doi.org/10.35899/biej.v1i1.2.

Sopiandi, Endis, Didin Hafiduddin, and Hendri Tanjung. "Analisis Distorsi Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2017): 113–30.

Sri Hartoyo, Eka Intan K.P. "Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng Sawit Domestik." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* XI, no. 2 (2011): 169–79.

Ulum, Bahrul, and Mufarrohah. "Kontribusi Ibnu Khaldun

Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan." *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)* 1, no. 2 (2016): 17–32.

Wulpiah. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar." *ASY-SYAR'YYAH* 1, no. 1 (2016): 42–62.

© 2022 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Journal of Sharia and Economic Law
Vol. 2, No. 2, December 2022 (pp. 152-175)

IMPLEMENTATION OF THE MSME EMPOWERMENT PROGRAM SUPERVISION SYSTEM AT THE INFAQ MANAGEMENT FOUNDATION

***Shamsiyah*[1], *Muttaqin Choiri*[2]**
[12]Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: 190711100115@student.trunojoyo.ac.id[1]
Email: muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id[2]

DOI: 10.21154/invest.v2i2.5139

Received: 2022-11-04	*Revised: 2022-11-26*	*Approved: 2022-11-26*

Abstract: Zakat holds a very strategic position regarding religious, social, economic, and social welfare aspects. In terms of community welfare, three pillars must be optimized, one of which is the empowerment of zakat potential. To optimize zakat management, the government must perform a practical regulatory and supervisory function, which BAZNAS does at all levels. The potential of ZIS funds contributes to the expansion of MSMEs as a driver of economic growth. MSMEs require not only capital but also business advice. In Indonesia, zakat management institutions have funds that can be used for business capital or productive Zakat. However, numerous cases in Indonesia involve the mismanagement of productive zakat funds, one of which is the philanthropic organization Aksi Cepat Tanggap (ACT), which has recently come under scrutiny for cases of misappropriation of people's funds. The purpose of this research is to determine how the monitoring system for the UMKM empowerment program at the Infaq Management Institute (LMI) in Bangkalan Regency complies with Law No. 23 of 2011 on Zakat Management. As a result, it is necessary to investigate how the monitoring system for the MSME empowerment program is implemented at the LMI Bangkalan Branch. This study used a qualitative data collection approach, employing interviews, observation, and documentation studies. According to the findings of this study, the supervision of LMI Bangkalan takes the form of an annual report on the performance of LAZNAS LMI activities in the form of a Financial Audit. Supervision is carried out internally at the Bangkalan Branch LMI by holding weekly and monthly evaluation meetings in each field and external supervision from the East Java Central LMI and the Central BAZNAS.

***Keywords**: Infaq Management Foundation; MSME Empowerment: Supervision*

Abstrak: Zakat menempati posisi yang sangat strategis dalam aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, ada tiga pilar yang harus dioptimalkan, salah satunya adalah pemberdayaan potensi zakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, pemerintah harus melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan yang praktis, yang dilakukan oleh BAZNAS di semua tingkatan. Potensi dana ZIS berkontribusi terhadap perluasan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. UMKM tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga nasihat bisnis. Di Indonesia, lembaga pengelola, zakat memiliki, dana yang dapat digunakan untuk modal usaha atau zakat produktif. Namun, banyak kasus di Indonesia, yang melibatkan salah urus dana zakat produktif, salah satunya organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang akhir akhir ini disorot kasus penyelewengan dana umat. Tujuan dari, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan program, pemberdayaan UMKM di Lembaga, Pengelola Infaq (LMI) Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana sistem monitoring pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di LMI Cabang Bangkalan. Penelitian ini, menggunakan pendekatan pengumpulan data kualitatif, dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengawasan LMI Bangkalan berupa laporan tahunan kinerja kegiatan LAZNAS LMI dalam bentuk Audit Keuangan. Pengawasan dilakukan secara internal di LMI, Cabang Bangkalan dengan mengadakan rapat evaluasi mingguan dan bulanan di masing-masing bidang dan pengawasan eksternal dari LMI Jawa Timur Tengah dan BAZNAS Pusat.

Kata kunci*: *Lembaga Manajemen Infaq; Pengawasan; Pemberdayaan UMKM.

INTRODUCTION

Zakat worship has a very strategic position in religious, social, economic, and community welfare aspects. This strategic role is manifestly stated in the Qur'an and Hadith and is reflected in the history of Islam. In order to improve the usefulness and usefulness, Zakat must be managed institutionally under Islamic shari'a mandate, expediency, justice, legal certainty, integration, and

accountability to increase the effectiveness and efficiency of services in zakat management[74].

A national-level amil zakat called BAZNAS (National Amil Zakat Agency) was formed; the Provincial level of BAZNAS Province and the Regency/City level of BAZNAS Regency/City is a non-structural institution formed by the government to be independent and responsible to the government and society according to its level To achieve the objectives of zakat management. It is necessary to realize that efforts to improve the quality of Muslims, primarily through proselytizing and education, are essential and strategic tasks to be carried out. By prioritizing quality, it is hoped that Muslims can play a more meaningful socio-religious and state role in the progress of the nation and state.

Related to the welfare of the people, nation, and state, there are three essential pillars to be optimized: the empowerment of zakat potential, the empowerment of waqf potential, and the empowerment of mosques. According to data from the Directorate of Zakat Empowerment and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), quoted from a CNN Indonesia article, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) recorded that the realization of zakat fund collection in Indonesia reached IDR 14 trillion in 2021. This amount is only around 4.28 percent of the country's projected Zakat to reach Rp 327 trillion. From this realization, BAZNAS has distributed zakat funds to 1,834,320 recipients throughout Indonesia. Meanwhile, this year, BAZNAS targets the zakat

[74] Muhtadin Dg. Mustafa, "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* (IAIN Palu, 2021), https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700.

collection to reach Rp 26 trillion from 560 Zakat Management Organizations (OPZ)[75]

Law Number 38 of 1999 concerning Zakat Management has been amended and replaced with Law on Zakat Management Number 23 of 2011. The renewal of the Zakat Management Law is a political breakthrough to improve the coordination system between zakat management organizations that have yet to run effectively, vertically, horizontally, and diagonally. It is evident from the misappropriation of people's funds by 4 ACT Officials. Dittipideksus Bareskrim Polri transferred the case file for misappropriation of funds from the charity foundation Aksi Cepat Tanggap (ACT) to the Attorney General's Office (AGO) with (four) 4 suspects. The philanthropic organization Aksi Cepat Tanggap (ACT) has recently been in the spotlight after Tempo Magazine made investigative coverage related to a case of misappropriation of funds. The ACT case has also become a topic of discussion on various social media platforms, and people's funds managed by the institution founded in 2005, as much as hundreds of billions of rupiah. Then, the Tempo Magazine team also revealed the possibility of misappropriating the funds used for its higher-ups. In this case, the systematic management of Zakat that is increasingly developing further strengthens the paradigm that Zakat is an alternative solution to poverty reduction in the country. However, it is undeniable that the optimization of zakat management requires the effectiveness of regulatory functions and supervision by the government and the optimal operator functions implemented by BAZNAS at all levels with the help of LAZ.

[75] Juli Hantoro, "Ini Fakta Perjalanan Kasus ACT Hingga Petinggi Jadi Tersangka," 2022, 2022, https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka.

In connection with this theme, several studies have discussed the issue of Zakat. The research conducted by Nurul Ihsan and Sutrisno Hadi on the differences in this study not only discusses OPZ supervision but also relates to OPZ coaching, which in its application, is the supervision carried out by the Law on the community, namely internal and external supervision in the form of access to information about Zakat management carried out by BAZNAS and LAZ wherever they are positioned. [76] Research conducted by Rismayani, Imran, and Syamsiar (2020) stated that in the journal, the researchers focused not only on one authorized party in the field of MSME empowerment but on all parties involved in the effectiveness of supervision of BAZNAS zakat management in Wajo Regency.[77]

Research conducted by Aulia Damayanti (2018), which aims to determine the five components of internal control applied in the Zakat Management Organization (OPZ) in the three activities at LAZNAS "X" in Surabaya, states that the implementation of internal sound control for OPZ to increase the effectiveness and efficiency of the organization. The study results show that there needs to be an increase in internal control applied in each activity because the internal control is still weak in one of the components.[78]

Research conducted by Nofrizon, Dasrizal, Dahlan, and Jemkhairil, states that supervision is one part of the management of

---

[76] Nurul Ihsan, "Implementasi Penga Wasan Dan Pembinaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Menurut Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat," *Journal AlMuamalah Radenfatah* 110 (2019).

[77] Rismayani, Imran, and Syamsiar, "Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wajo," *Jurnal Public Administration* 1, no. 1 (2020): 55–62.

[78] Aulia Damayanti, "Analisis Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Pada Laznas ' X ' Di Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Organisasi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 1 (2018): 432–45.

an institution. One of the zakat institutions that use supervision in the management of zakat economic awareness programs is UPZ BAZNAS Semen Padang. This research focuses on supervision in managing the Zakat economic awareness program at UPZ BAZNAS Semen Padang, which categorized each mustahiq in the specified category.[79]

Then the research conducted by Mardhatilah Suaka stated that in the study, the supervision of zakat management of BAZNAS of Bengkulu Province was carried out internally and externally. The leadership of its staff carries out internal supervision. However, there is no Supervisory Board that is supposed to supervise the leadership of the Bengkulu Provincial BAZNAS. External supervision is carried out by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Public Accountants, and the public. However, the Bengkulu Provincial Government has never carried out supervision.[80]

From the description of the previous research, different discussions and results of this research were conducted in Bangkalan Regency using qualitative methods, namely, using an alliterative approach to explore and understand the meaning of individuals or groups related to social problems that can be used to interpret, explore, or gain a deeper understanding of certain aspects of beliefs, attitudes, or actions. This study uses a qualitative approach to

---

[79] N Nofrizon, D Dahlan, and J Jemkhairil, "Pengawasan Penggunaan Dana Zakat Pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang," *Al Imam: Jurnal …*, 2019, 32–50, https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/1049/0%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/viewFile/1049/884.

[80] Mardhatillah Suaka, Mardenis Mardenis, and Zefrizal Nurdin, "Management and Supervision of Zakat at The National Amil Zakat Agency (Baznas) of Bengkulu Province in 2019-2020," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.5343.

describe the results in words or theory/hypotheses. In order to make the authenticity of the data studied more convincing, the researcher used the triangulation method. In order to obtain data that is descriptive analytical based on legal facts or events found in the field and then constructed into hypotheses or theories. Thus, the researchers collected data that was carried out using a combination of observations, structured interviews, and documentation as supporting data for this study. The formulation of the problems in this research includes focusing on: (1) the implementation of the supervision system for the MSME empowerment program at the Infaq Management Institute and (2) the MSME empowerment program at the Infaq Management Institute in Bangkalan Regency.

This research was conducted in Bangkalan Regency using a qualitative method, namely, using a qualitative approach to explore and understand the meaning of individuals or groups related to social problems that can be used to interpret, explore, or gain understanding which is more in depth about certain aspects of beliefs, attitudes, or actions. In this study, the results using this qualitative approach are then described in words or theory/hypothesis. Researchers also obtained supporting data through observations and direct interviews with resource persons, including the Head of Utilization at the LMI Bangkalan Branch. In order to make the authenticity of the data studied more convincing, the researcher used the triangulation method. In order to obtain data that is descriptive analytical based on legal facts or events found in the field and then constructed into hypotheses or theories. Thus, the researchers collected data that was carried out using a combination of observations, structured interviews, and documentation as supporting data for this study.

DEFINITION OF ZAKAT, INFAQ, AND SHODAQOH INSTITUTIONS (ZIS)

Zakat, in terms of language (etymology), has several meanings, namely: *al-barakatu*, "blessing," *al-namaa*, "growth - development," *at-thaharatu*, "chastity" and *ash-shalahu*, "cleanliness." Furthermore, judging from the term (terminology), Zakat means a part of the property with certain conditions, which Allah obliges to the owner, to be handed over to the one entitled to receive it, with specific conditions such as well. Zakat institutions are [81]optimizing the management of zakat funds for economic empowerment and improvement sector real. Therefore, zakat institutions need to have good socio-economic mapping so that zakat funds are on target. In addition, the productive model of distributing zakat funds should be more of an orientation of zakat institutions. Rather than patterns of distribution of consumptive funds. ZIS is one of the sources that the government can use to reduce impoverishment. Zakat is given to mustahik as a support for increasing the utilization of productive Zakat.[82]

The Amil Zakat Agency or Institution manages zakat funds, Shodaqoh, and Infaq, which Muzakki trusts to distribute to entitled parties. Management efforts are every activity of conducting an accountability report under the law, aiming to realize the public accountability of amil Zakat managers. The role of Zakat Management Organizations is crucial to increase the benefits of Zakat so that it can realize community welfare and overcome poverty. In Indonesia, two zakat management institutions are recognized by the government, namely, the Amil Zakat Institution

[81] Ihsan, "Implementasi Penga Wasan Dan Pembinaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Menurut Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat."

[82] Tontowi Jauhari, "Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah," *Manajemen Zakat*, 2011, 2.

(LAZ) and the Amil Zakat Agency (BAZ). Both received protection umbrellas from the government. A form of government protection for the zakat management institution is the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Zakat Managers.[83]

Lembaga Amil Zakat (LAZ) is an organization that manages Zakat formed by the community to support zakat empowerment by BAZNAS. The Amil Zakat Institution (LAZ) is required to be registered as an Islamic community organization engaged in education, proselytizing, and social affairs in the form of a legal entity, generally a foundation, and received approval from BAZNAS. As explained in Article 17 of Law No. 23 of 2011, the establishment of LAZ by the community is intended to assist BAZNAS in collecting, distributing, and utilizing Zakat. It is carried out by submitting a written application to the head of the regional office of the provincial ministry of Religious Affairs.[84]

The Zakat Management Organization (OPZ), according to Widodo and Kustiawan (2001), is an institution tasked with managing Zakat, infak, and alms, both formed by governments such as BAZ and those formed by the community and protected by governments such as LAZ. Sudewo stated that the essential characteristics of zakat organizations, or what can be called the main pillars of zakat organization, are three parts, namely, collection, management, and utilization. The zakat management system consists of zakat receipt procedure, zakat expenditure procedure, and zakat reporting procedure for the public. The distribution process means channeling funds raised and managed

---

[83] M Choiri, *Hukum Zakat Di Indonesia* (Global Aksara Pers, 2012), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iRKDEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=muallaf+sebagai+asnaf+zakat&ots=tSHGk1xGPA&sig=sUKdVDdkZhD5tNQjh6wSWlir-Do.

[84] Sri Wahyuni, "Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

by the institution. [85] The distribution of ZIS funds are distributed in the form of providing financial assistance, and they must have a business first. If ZIS funds are given to MSME actors, the funds must be returned without interest, and there is no time limit. There are two aspects of empowerment carried out, namely, in the spiritual field, where MSME actors must participate in religious activities that are carried out once a month. In the economic sector, in addition to providing party funds, they also help to promote their business. ZIS funds are distributed using consumptive and productive giving. The following is the scheme for distributing and empowering ZIS funds. [86]

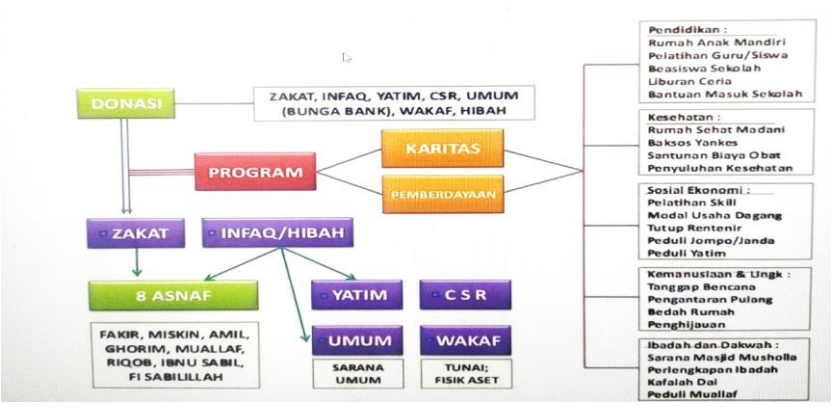

Figure 1. is the fund empowerment and distribution scheme.

[85] Damayanti, "Analisis Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Pada Laznas ' X ' Di Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Organisasi."

[86] Shiyamil Awaliah, "Zakat Dan Halal: Pengaruh Pivilese Praktik Keagamaan Dalam Regulasi Pembangunan Di Indonesia," *Idarotuna* 3, no. 2 (June 3, 2021): 162, https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.11813.

ZAKAT INSTITUTION SUPERVISION SYSTEM IN INDONESIA

The term supervision in origin Indonesian is "*alert*." At the same time, in English, it is called control, which translates to the term supervision and control, so *controlling* has a broader meaning than supervision. However, among experts or scholars, this notion of "controlling" has been equated with supervision. So, oversight includes control. The [87] definition of supervision from the origin of the basic word "*alert*" means to invite someone or several people to carry out an activity full of caution so that no mistakes or mistakes occur. [88] Supervision is generally the process of observing the implementation of all activities of the organization to ensure that all work is carried out proceeding with a set plan.

Supervision in Zakat institutions can be defined as a process to ensure that organizational and management goals can be achieved. This supervision is related to ways to make activities in the management of Zakat (ZIS) as planned. This understanding shows a very close relationship between planning and supervision. [89] Supervision plays a vital role in realizing the goals of zakat management organizations because the supervisory function is closely related to the planning function. The supervision process is a continuous obligation to supervise the course of planning in the organization and minimize work errors.[90]

Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management is a revision of Law Number 38 of 1999 concerning Zakat Management; this revision requires BAZNAS and LAZ to work more

[87] Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Publik* (Refika Aditama, 2015).
[88] Yohannes Yahya, "Pengantar Manajemen," *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2006.
[89] Yahya.
[90] Andini Latifah, Popi Herawati, and Wafa Abdullah, "Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Bandung," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

professionally, transparently, and trustworthily in ZIS management, according to the demands of Shari'a. [91] In Indonesia, zakat activities are regulated in Law No. 23 of 2011 concerning zakat collection. They are supported by Presidential instruction number 3 of 2014 concerning the Optimization of the Zakat Collection in the Ministry of Finance through the National Amil Zakat Agency. In Law No. 23 of 2011 concerning zakat management, article 34 states:

1. The Minister carries out supervision and guidance on BAZNAS, Provincial BAZNAS, Regency/City BAZNAS, and LAZ.
2. Governors and regents/mayors carry out guidance and supervision of provincial BAZNAS, district/city BAZNAS, and LAZ under their authority.
3. As referred to in paragraphs (1) and (2), the guidance includes facilitation, socialization, and education.

According to Law No. 23 of 2011 concerning the management of Zakat, Zakat is a property that must be issued by a Muslim or a business entity to be given to those entitled to receive it under Shari'a Islam. Zakat is one of the five pillars of Islam that make up Islam. Therefore, the Law of Zakat for a qualified person is *fard 'ain*. Based on the Law, zakat management aims to improve the effectiveness and efficiency of services zakat management; and increase the benefits of Zakat to realize community welfare and poverty reduction.[92]

[91] Wahyuni, "Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan."

[92] Dika Sastriani Qasim and Nila Sastrawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo," *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 220–32.

Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management is an effort by the government to increase the role and function of zakat managers for the development and economic empowerment of the people. This regulation is oriented so that the source of zakat funds is effective and successful for the community under the mandate stated in consideration of laws and regulations on zakat management. Zakat management aims to, among others:

1. It is improving the effectiveness and efficiency of services in zakat management. Good zakat management will facilitate the steps of an LPZ to achieve the core goal of Zakat itself, namely, the optimization of Zakat. By acting efficiently and effectively, LPZ can use existing zakat funds.
2. Increase the benefits of Zakat to realize community welfare and poverty reduction. Zakat management is intended to reach the right people and distribute the zakat funds in a usable form to improve the welfare of the community. Using Zakat for productive things can be done by establishing foster homes, conducting home industry training, establishing free schools, and so on.[93]

MSME empowerment is a program initiated and dedicated to developing the economic potential of families and communities in increasing productivity to alleviate poverty; the provision of ZIS funds for MSME actors is not just to fulfill the obligations of the ZIS Institution but it can be seen from various things, one of which is the practice of ribawi which is still widely carried out by finance institutions or official or unofficial cooperatives that are very suffocating that demands the funds are to be returned, and if the

[93] Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, *Simbiosa Rekatama Media* (Simbiosa Rekatama Media, 2019), http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf.

funds are not returned, the MSME actor's business will be confiscated.[94]

Under Law No. 23 of 2011 article 34,34 and Government Regulation No. 14 of 2014 concerning the Implementation of the Zakat Management Law, the constitutional mandate of the association that the government must carry out is to carry out "Supervision" of BAZNAS, Provincial BAZNAS, Regency/City BAZNAS and LAZ. The government carries out the supervision, namely, the Ministry of Religious Affairs, which directly oversees matters concerning religion, Governors, and Regents/Mayors according to their functions and authorities.

PROFILE OF INFAQ MANAGEMENT INSTITUTE (LMI) BANGKALAN BRANCH

The Infaq Management Institute (LMI) was established as a Social Foundation registered with Abdurachim Notarial Deed No. 11, dated April 4, 1995, under the Infaq Ukhuwah Islamiyah Management Institute Foundation. Furthermore, now, with the governor's decree No. 451/1702/032/2005, the Infaq Management Institute (LMI) is legalized as the LAZ of East Java province. The Infaq Management Institute (LMI) has the main activity of collecting, managing, and distributing Zakat, Infaq, and Shodaqoh (ZIS) and trying to create a climate and means for the economic and social development of Muslims. With several unique and creative programs, the Infaq Management Institute (LMI) is increasingly showing its role in community empowerment. Until 2021 the permit for the extension of LAZNAS SK KEMENAG RI No. 672 of 2021. LAZNAS LMI Bangkalan Branch itself was established in 2016 with SK. Ministry of Religion No. 184 of 2016 Tel. 0857-3035-5835, located at Jl. Flamboyan No. 15 Perumda, Mlajah - Bangkalan. To

[94] Rismayani, Imran, and Syamsiar, "Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wajo."

get the amil profile of the Bangkalan Branch of the Infaq Management Institute, the researcher interviewed two amyls, namely, Mr. Yanuar, the Head of LAZNAS LMI Bangkalan Branch, and Mr. Hayan, the utilization/program division.

Based on the results of an interview with the Head of the Utilization Division, the form of distribution of ZIS funds at the Bangkalan Branch of the Infaq Management Institute is grouped into five, programs, namely da'wah and mosque programs, educational programs, health programs, economic programs, and humanitarian programs. Some of the programs in LAZNAS LMI Bangkalan Branch are:

1. The Education Program, namely, the Smart Scholarship of the Infaq Management Institute, is intended for students and underprivileged students of the Qur'an Tahfidz.
2. Health Program, namely Free Ambulance and Healthy Home Compensation Bangkalan Branch Infaq Management Institute, in the form of a health clinic.
3. Economic Program is an economic empowerment program that provides business capital and business coaching for groups selected by the Bangkalan Branch of the Infaq Management Institute, which includes all activities that foster MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises).
4. The Humanitarian Program, namely, Peduli Bencana and the "Kita Bisa" Program, cares about disasters in the form of quick action to raise funds that will be distributed in the form of food, medical, physical, and rehabilitation in order to recover in normal conditions and assistance in the form of compensation for living expenses.
5. Da'wah and Mosque Program, namely Peduli Guru Qur'an. Care for Qur'an Teachers runs for TPA/TPQ teachers. Teachers can apply to become mustahiq *fii sabilillah* at the Infaq Management Institute. The book study program

provides facilities in the form of financial assistance.

Based on the above programs, after a data documentation study, the program is divided into two categories: national and regular programs. The National Program is formed based on a National Work Meeting or centralized. At the same time, the regular program is a raker result program in LMI Madura Raya covering four districts (Sampang, Sumenep, Pamekasan, and Bangkalan). Mr. Yanuar, the Head of the LMI Bangkalan Branch, who also concurrently serves as the Area Manager of LMI Madura Raya, explained that "LMI Bangkalan Branch is superior in the collecting field ZISWAF because it routinely raises funds of approximately 35 million / month. The budget was then distributed to the five programs, both national and regular programs. "[95]

Based on the researcher's analysis, the percentage of program implementation at LAZNAS LMI Bangkalan can be seen in the following diagram:

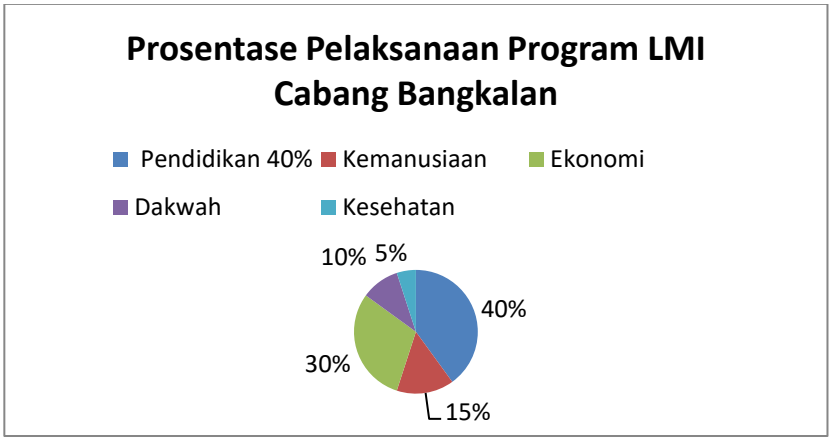

Diagram 1. Percentage of Implementation of the Bangkalan Branch of the LMI Program

[95] Yanuar, Head of LAZNAS LMI Branch Bangkalan, interview on September 13, 2022, at 11:46 am at the LMI Office Bangkalan.

IMPLEMENTATION OF LAZNAS LMI BANGKALAN SUPERVISION SYSTEM

Supervision is associated with management in management; there are several essential functions of management, namely, the functions of planning, management, and evaluation, along with supervision. The management function has an important position that describes the performance as a whole and an administrative process with all dimensions accompanying it. According to Dessler, the two approaches that will be used to maintain *the controlling function* consist of traditional and commitment-based supervision systems. [96]

According to law No. 23 of 2011, article 34 explains that the supervision of the Amil Zakat institution is carried out by the Minister of Religious Affairs, Governor, and Regent / Mayor according to their authority. In terms of supervision in government regulation, No. 14 of 2014, concerning implementing the Zakat management law, including reporting, sharia auditing, and finance. Zakat supervision arrangements according to Law No. 23 of 2011, Article 34:

(1) The Minister guides and supervises BAZNAS, BAZNAS, district/city, BAZNAS, and LAZ.
(2) Governors and regents/mayors guide and supervise provincial BAZNAS, district/city BAZNAS, and LAZ in accordance with their authority.
(3) As referred to in paragraphs (1) and (2), the guidance includes facilitation, socialization, and zakat education.

The mandate of Law Number 23 of 2011 concerning the management of Zakat, explained in article 34 paragraphs (1), (2),

[96] Ulya Kencana, Miftachul Huda, and Andino Maseleno, "Waqf Administration in Historical Perspective: Evidence from Indonesia," *Test Engineering and Management* 81, no. 11–12 (2019): 5338–53.

and (3), who has the right to carry out guidance and supervision is the Minister, in this case, the Minister of Religion, or an extension of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which can be carried out by the Regional Office of the Ministry located in each region. and Governors, Mayors/Regents according to their. According to Sujamto, supervision is seen from the relationship between the subject and object of supervision:

1) External supervision is carried out from the outside; in this supervision subject, the supervisor is outside the supervisory object array.
2) Internal supervision, namely, supervision from within, where the subject supervision is in the organizational structure.

Based on the results of the LAZNAS LMI Bangkalan Branch field study, in each of its activities so far, it has carried out internal and external supervision. In every activity of the Bangkalan Branch, LMI internal supervision is carried out by the leadership within the LAZNAS LMI Bangkalan Branch, which has the authority to supervise. Internal supervision was carried out by LAZNAS LMI Bangkalan Branch, based on the results of an interview with the Head of the Utilization Division, according to Mr. Hayyan, by conducting weekly evaluation meetings in a month in each existing field. LMI Bangkalan Branch explained concretely that every Tuesday every week is a work evaluation meeting of all fields, which all members of the Bangkalan Branch LMI management and the head of the organizational fields attend. Meanwhile, every Wednesday, all members of the field of distribution and utilization attend an evaluation meeting in the field. Friday was an evaluation meeting on the field of zakat collection attended by the Kabid and its members. The Monthly Meeting is an evaluation meeting between the LAZNAS LMI Madura Raya Area and the Annual

Meeting of RAKER LMI Madura Raya. [97] In addition, the man, who is familiarly called Mr. Hayyan, also explained the form of supervision carried out by the government, including external supervision, namely, supervision from the Central BAZNAS after reporting to the East Java Central LMI. The following is a picture of the transparency of the financial statements of the Bangkalan branch of LMI in 2020;

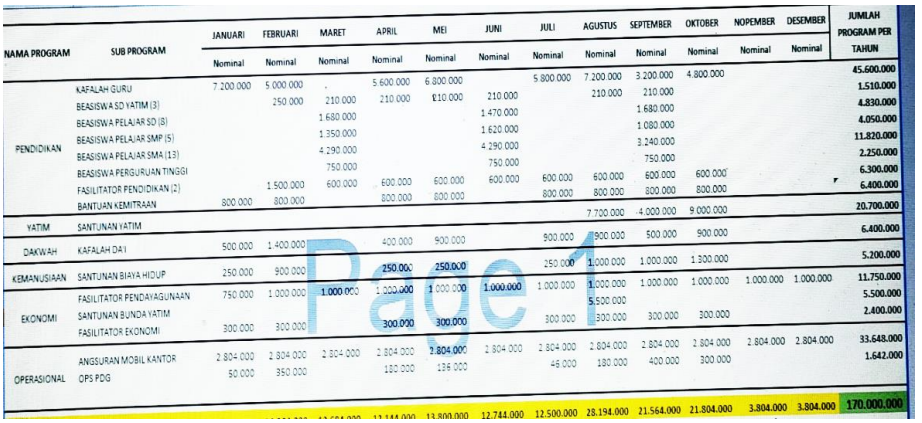

NAMA PROGRAM	SUB PROGRAM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH PROGRAM PER TAHUN
		Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	
PENDIDIKAN	KAFALAH GURU	7.200.000	5.000.000	-	5.600.000	6.800.000		5.800.000	7.200.000	3.200.000	4.800.000			45.600.000
	BEASISWA SD YATIM (3)		250.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000	210.000				1.510.000
	BEASISWA PELAJAR SD (8)			1.680.000			1.470.000			1.680.000				4.830.000
	BEASISWA PELAJAR SMP (5)			1.350.000			1.620.000			1.080.000				4.050.000
	BEASISWA PELAJAR SMA (13)			4.290.000			4.290.000			3.240.000				11.820.000
	BEASISWA PERGURUAN TINGGI			750.000			750.000			750.000				2.250.000
	FASILITATOR PENDIDIKAN (2)		1.500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000			6.300.000
	BANTUAN KEMITRAAN	800.000	800.000		800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	800.000			6.400.000
YATIM	SANTUNAN YATIM								7.700.000	4.000.000	9.000.000			20.700.000
DAKWAH	KAFALAH DAI	500.000	1.400.000		400.000	900.000		900.000	900.000	500.000	900.000			6.400.000
KEMANUSIAAN	SANTUNAN BIAYA HIDUP	250.000	900.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000			5.200.000
EKONOMI	FASILITATOR PENDAYAGUNAAN	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.750.000
	SANTUNAN BUNDA YATIM								5.500.000					5.500.000
	FASILITATOR EKONOMI	300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000			2.400.000
OPERASIONAL	ANGSURAN MOBIL KANTOR	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	33.648.000
	OPS PDG	50.000	350.000		180.000	136.000		46.000	180.000	400.000	300.000			1.642.000
					13.144.000	13.800.000	12.744.000	12.500.000	28.194.000	21.564.000	21.804.000	3.804.000	3.804.000	170.000.000

Figure 2. Transparency Finance Program LAZNAS LMI Bangkalan

The financial audit report of LAZANAS LMI Bangkalan has carried out an audit of ZISWAF management per year centrally to LMI Jatim (Center), then audited by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. LMI's 2020 Financial Statements have won an Unqualified Opinion (WTP) for four consecutive years (2017-2020), audited by a pulik accountant Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan on April 10, 2021. An audit is a systematic process to obtain and evaluate evidence objectively regarding statements about economic activities and events. To establish the degree of conformity between the n-statement and the established criteria.[98]

[97] Results of Interview with Mr. Hayyan, Head of LMI Utilization Bangkalan, On October 25, 2022, at 10:15 am at the LMI Office Bangkalan

[98] Maringan Masry Simbolon, "Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen," 2004.

The supervision system built at LAZNAS LMI Bangkalan Branch is perfect because supervision and reporting are carried out internally and externally. The program that has been realized at the Bangkalan Branch of LMI has been excellent, especially in the economic sector, especially the MSME Empowerment Program in Bangkalan. During the author's research, there was an observational study of one of the batik MSME benefit pickers in the Bangkalan area, which until now has transformed from the previous one to mustahiq Zakat to become muzakki from the income of Batik MSMEs in the Bangkalan area, one of which is the Tanah Merah Batik MSME.

In this research process, the author saw the government's seriousness in increasing public trust in the Amil Zakat LMI institution in Bangkalan. LAZNAS LMI Bangkalan is also seen carrying out its duties according to its respective duties. So far, there are still no deviations and misappropriations in the implementation of supervision at LAZNAS LMI Bangkalan, so the quality of performance at LMI Bangkalan is excellent. It is just that there is a minor criticism from the author towards external supervision that runs on the initiative of the zakat institution itself. However, from the local government of the Bangkalan area itself, there has been no initiative to carry out supervision according to its authority, which should be under Law No. 23 of 2011 which has the authority and must be carried out evenly in each element of the zakat management institution, so that local authorities should be bolder and prepare funds and workforce in terms of supervision.

CONCLUSION

From the research results above, it can be concluded that the supervision of LAZNAS LMI is a process to keep Zakat Management activities directed toward achieving the goals as planned. If deviations are found, corrective *actions are taken*, as well as measuring the implementation of each activity of the LAZNAS LMI Bangkalan Branch to ensure that the goals and plans made and achieved can be appropriately implemented. The implementation of the supervision system in the nature of every activity of the Bangkalan Branch LMI is carried out internally by those in the LAZNAS LMI Bangkalan Branch agency, which has the authority to supervise. LAZNAS LMI Bangkalan Branch carries out external supervision by reporting to LMI Jatim (central). Also, supervision from Central BAZNAS, Financial Audit, and Sharia audit are carried out by public accountants.

According to the author, the supervision at LMI Bangkalan is already excellent. The program promoted at the LMI Bangkalan Branch has been excellent, especially in the field of Economics, especially in MSMEs in Bangkalan. In terms of economic empowerment of MSMEs, LAZNAS LMI Bangkalan Branch conducts scheduled and regular disbursement of funds so that the percentage of economic program fund disbursements at LAZNAS LMI Bangkalan reaches 30%. The author's suggestion in this case related to further research can be carried out an assessment related to the supervision system run by the Ministry of Religion; the government is authorized to carry out supervision under Law No. 23 of 2011 on all existing zakat management institutions so that it can determine how the form of supervision is implemented on the institutions under its auspices.

DISCLOSURE

Conflicts of Interest

The authors declares that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Funding Statement

This research received no external funding

BIBLIOGRAPHY

Awaliah, Shiyamil. "Zakat Dan Halal: Pengaruh Pivilese Praktik Keagamaan Dalam Regulasi Pembangunan Di Indonesia." *Idarotuna* 3, no. 2 (June 3, 2021): 162. https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.11813.

Choiri, M. *Hukum Zakat Di Indonesia*. Global Aksara Pers, 2012. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iRKDEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=muallaf+sebagai+asnaf+zakat&ots=tSHGk1xGPA&sig=sUKdVDdkZhD5tNQjh6wSWlir-Do.

Damayanti, Aulia. "Analisis Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Pada Laznas ' X ' Di Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Organisasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 1 (2018): 432–45.

Dg. Mustafa, Muhtadin. "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. IAIN Palu, 2021. https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700.

Hantoro, Juli. "Ini Fakta Perjalanan Kasus ACT Hingga Petinggi Jadi Tersangka." 2022, 2022. https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka.

Ihsan, Nurul. "Implementasi Penga Wasan Dan Pembinaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Menurut Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat." *Journal AlMuamalah Radenfatah* 110 (2019).

Kencana, Ulya, Miftachul Huda, and Andino Maseleno. "Waqf Administration in Historical Perspective: Evidence from Indonesia." *Test Engineering and Management* 81, no. 11–12 (2019): 5338–53.

Latifah, Andini, Popi Herawati, and Wafa Abdullah. "Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Bandung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Publik*. Refika Aditama, 2015.

Nofrizon, N, D Dahlan, and J Jemkhairil. "Pengawasan Penggunaan Dana Zakat Pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang." *Al Imam: Jurnal …*, 2019, 32–50. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/1049/0%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/viewFile/1049/884.

Qasim, Dika Sastriani, and Nila Sastrawati. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 220–32.

Rismayani, Imran, and Syamsiar. "Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wajo." *Jurnal Public Administration* 1, no. 1 (2020): 55–62.

Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. *Simbiosa Rekatama Media*. Simbiosa Rekatama Media, 2019. http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf.

Simbolon, Maringan Masry. "Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen," 2004.

Suaka, Mardhatillah, Mardenis Mardenis, and Zefrizal Nurdin. "Management and Supervision of Zakat at The National Amil Zakat Agency (Baznas) of Bengkulu Province in 2019-2020." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan*

Keagamaan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.5343.

Tontowi Jauhari. "Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah." *Manajemen Zakat*, 2011, 2.

Wahyuni, Sri. "Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Yahya, Yohannes. "Pengantar Manajemen." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2006.

© 2022 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution NoncommercialAttribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Journal of Sharia and Economic Law
Vol. 2, No. 2, December 2022 (pp. 176-195)

MAQĀSHID SHARIA-BASED ZAKAT DISTRIBUTION MODEL: ZAKAT DISTRIBUTION PROGRAM IN NATIONAL ZAKAT AGENCY DKI JAKARTA

***Siti Nur Mahmudah*[1], *Moh Abdul Aziz Alwa*[2]**
[12] Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: sitinurmahmudah@iainponorogo.ac.id[1]
Email: alwa@iainponorogo.ac.id [2]

DOI: 10.21154/invest.v2i2.5101

Received: 2022-11-01	Revised: 2022-12-11	Approved: 2022-12-14

Abstract: Based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, which strengthens BAZNAS as an institution authorized to manage Zakat responsible for supervising zakat management based on Islamic law, mandate, benefit, justice, legal certainty, integration, and accountability, the purpose of this article is to explain how BAZNAS distributes Zakat in DKI Jakarta. The research method involves literature, including websites, books from the National Amil Zakat Agency, and articles on the studied topics. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) distributes economic empowerment, economic programs, and educational programs from the point of view of *dharuriyat* (faith, soul, descent, reason, and wealth), *hajiyyat*, and *tahsiniyat* (BAZNAS). Regarding *Maqāshid Sharia*, this paper concludes that the "Jak B Be Taqwa" program, the "Jak B Cerdas" program, the "Jak B Sehat" program, the "Jak B Hijau" program, and the "Jak B Berdaya" program implemented from 2019 to 2022 are a form of implementation of the *Maqāshid Sharia* -based zakat distribution model by BAZNAS in DKI Jakarta.

Keywords: *National Zakat Agency; Maqāshid Sharia; Zakat distribution.*

Abstrak: Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memperkuat BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat bertanggung jawab mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan akuntabilitas, tujuan artikel ini adalah menjelaskan bagaimana BAZNAS mendistribusikan zakat di DKI Jakarta. Metode penelitian melibatkan penelitian kepustakaan, antara lain website, buku-buku dari Badan Amil Zakat Nasional, dan artikel-artikel

tentang topik yang diteliti. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendistribusikan pemberdayaan ekonomi, program ekonomi, dan program pendidikan dari sudut pandang *dharuriyat* (iman, jiwa, keturunan, akal, dan kekayaan), *hajiyyat*, dan *tahsiniyah*t (BAZNAS). Mengenai *Maqāshid Sharia*, tulisan ini menyimpulkan bahwa program "Jak B Be Taqwa", program "Jak B Cerdas", program "Jak B Sehat", program "Jak B Hijau", dan program "Jak B Berdaya" dilaksanakan Tahun 2019 hingga 2022 merupakan wujud implementasi model penyaluran zakat berbasis *Maqāshid Sharia* oleh BAZNAS di DKI Jakarta.

***Keywords*:** *Badan Amil Zakat Nasional; Distribusi zakat; Maqāshid Sharia*

INTRODUCTION

Ibn Asyria cites Al-Syatibi as saying that the *Maqāshid Sharia* is *maslahaṭ*, which translates to the benefit and well-being of humanity in both this world and the future. Meanwhile, according to ushul fiqh scholars, defining *Maqāshid Sharia* to present laws for the benefit of humanity[99]. *Maqāshid Sharia*[100], in general, can be interpreted as a concept to understand the purpose and purpose of *Sharia* values implied in the Qur'an and hadith to achieve the well-being (happiness) of the world and the hereafter. The importance of *Maqāshid* is used as one of the qualifications for certified ijtihad and fatwa experts so that the fatwa product can be by Allah's intentions and objectives in establishing [101]*Sharia* law[102]. Likewise, in the scope

[99] Sudirman M Johan et al., "Konsep Hikmat Al-Tasyrî' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 147, https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5338.

[100] Oni Syahroni and Adiwarman A Karim, "Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2016.

[101] Ali Mutakin, "Hubungan Maqashid Al Syari'Ah Dengan Metode Istinbath Hukum," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* (Raden Intan State Islamic University of Lampung, 2017), https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789.

[102] Moh Nasuka, "Maqashid Syari'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 1–10, https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.421.

of *Sharia* finance, the existence of *Maqāshid Sharia* is a means of the link between nash and market interests (situation) to ensure that market interests are genuine interests (maslahat), that economic interests are the interests of many people (benefits). Business interests are long-term interests according to *Maqāshid Sharia muamalaṭ*.[103]

Based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, it is stipulated as follows; 1) Zakat management is the activity of planning, implementing, and coordinating the collection, distribution, and utilization of Zakat. 2) Zakat is a property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those entitled to receive it by Islamic law. 3) Infaq is property issued by a person or business entity other than Zakat for the public interest. 4) Almsgiving is property or business entities outside of Zakat for the benefit of the general public. 5) Muzakki is a Muslim or business entity obliged to issue Zakat. 6) Mustahik is a person who is entitled to receive Zakat. 7) The National Zakat Agency, from now on referred to as BAZNAS, is an institution that manages Zakat nationally. 8) Amil Zakat Nasional, an institution abbreviated as LAZ, is an institution formed by the community that assists in Zakat's collection, distribution, and utilization. 9) Zakat Collection Unit, abbreviated as UPZ, is an organizational unit formed by BAZNAS to help collect Zakat. 10) Everyone is a natural person or legal entity. 11) Amyl rights are a certain part of Zakat that can be used for operational costs in the management of Zakat according to Islamic law. 12) The minister of religion is the minister who

[103] Johan et al., "Konsep Hikmat Al-Tasyrî' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu."

administers government affairs in the field of religion. 13) Zakat collection is a fundraising activity carried out by BAZNAS.[104][105]

The issuance of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management further strengthens the role of BAZNAS as an institution authorized to manage Zakat nationally. In this Law, BAZNAS has declared an independent non-structural government agency and is responsible to the President through the Minister of Religious Affairs. Law Number 23 of 2011 explains that BAZNAS aims to improve the effectiveness and efficiency of Zakat management services, increase Zakat's benefits to realize community welfare, and alleviate poverty. Therefore, BAZNAS, together with the government, is responsible for overseeing the management of Zakat based on Islamic law, mandate, benefit, justice, legal certainty, integration, and accountability.[106]

Distribution is distributing goods or services from producers to consumers or users. The distribution of goods and services to consumers and their users has an important role in production and consumption activities. Goods or services will only arrive from producers to consumers with amyl (distributing agent), so production and consumption activities will not run smoothly. Therefore, it is necessary to know about the implementation of *Maqāshid Sharia* in distributing Zakat[107].

---

[104] Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan," *Pemerintah Negara Republik Indonesia*, 2014, 60, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5461/pp-no-24-tahun-2014.

[105] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Tambahan Lembaran Negara Nomor* 5255 (2011).

[106] Indonesia.

[107] Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Dan Tantangan Pengelolaan," 2018, https://puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1_Yusuf-WIbisono.

Aibak did some research on Zakat in *Maqāshid Sharia*, and he concluded that the obligation to pay Zakat is an obligation that is not only related to mahdhah worship but is also a social charity related to the wider community. He also stated that the emphasis of *Maqāshid Sharia* is a policy that cannot be avoided for the benefit of the people. The second research was written by Muhammad Yasir, related to *Maqāshid Sharia*[108] and the concept of CSR, which states that both can be used as an approach to the distribution pattern of Zakat related to responsibility. Another study by Aam on the Islamic *Maqāshid*[109] *Sharia* Framework concluded that the ease of access to Islamic finance includes hajj *maslahaṭ* and promotional facilities, including *maslahaṭ tahsiniyyat*[110]. From previous studies, it is necessary to study the implementation of the *Maqāshid Sharia* theory in the distribution of Zakat because it plays an important role in formulating and interpreting something *maslahaṭ* for humanity without leaving the core of Islamic teachings, namely the distribution of Zakat.

The research method used in this article is library research, which utilizes library sources in obtaining research data; researchers limit data sources to library collection materials without conducting field research. Literature research is carried out by collecting data from various sources; the primary sources in this research are the BAZNAS BAZIS DKI Jakarta website and other

[108] Kutbuddin Aibak, "Zakat in Maqashid Al-Syariah Perspective," *Ahkam: Journal of Islamic Law* 3 (n.d.): 199–218.

[109] Muhammad Yasir Yusuf, "Pola Distribusi Zakat Produktif : Pendekatan Maqasid Syari'ah Dan Konsep CSR," *Jurnasl Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Aceh* XVI, no. 1 (2014): 207–30.

[110] Irfan Nurfalah and Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* (Politeknik Negeri Bandung, 2019), https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205.

sites that discuss the program of BAZNAS BAZIS DKI Jakarta as supporting material.[111]

MAQĀSHID SHARIA-BASED ZAKAT DISTRIBUTION MODEL

Zakat is part of the pillars of Islam and one of the ways to provide social security presented by Islam. The requirement to give Zakat is tied to obligatory worship and social charity related to the larger community; thus, there are two obligations in this instance, namely obligations to Allah and humanity (*Hablun Minallah Wahablun Min annas*). Zakat is not an end, but Zakat is a means to achieve social justice to alleviate poverty. Efforts to manage Zakat productively, actively, and creatively in the perspective of *Maqāshid Sharia* are unavoidable policies for the benefit of the people, welfare, and prosperity of the poor. The emphasis of *Maqāshid Sharia* by Al-Syatibi, for example, starts from the content of verses from the Qur'an, which shows that the laws of Allah contain benefits.

Hafidhuddin explained that amyl is those who carry out all activities related to zakat affairs, starting from collecting, guarding, and maintaining, the distribution process, as well as the task of recording the entry and exit of zakat funds[112]. Sabiq explained that an amil zakat is a person or institution appointed by the ruler or deputy ruler to collect Zakat from rich people (muzakki) and distribute it to mustahik. Amil is responsible for the managed zakat property. If the zakat property is damaged in the hands of the amil before it reaches the muzakki, then the muzakki has fallen into obligation. Amil zakat included in it is a person in charge of

[111] Ajengwind, "Kenali Metode Penghitungan Zakat Perusahaan Anda," Ubico, 2020, https://ubico.id/blog/kenali-metode-penghitungan-zakat-perusahaan-anda/.

[112] Didin Hafidhuddin and Irfan Syauqi Beik, "Zakat Development: The Indonesia's Experience," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

guarding zakat property, a herder of zakat livestock, and a clerk who works in the amil zakat office[113].

Zakat management is the activity of planning, organizing, coordinating, and monitoring zakat resources effectively and efficiently. It aims to achieve the vision and mission of Zakat based on *Sharia* guidelines and related regulations. The quality of zakat institutions must be measurable and meet the following indicators:

1. Amanah (trustworthy), every agency appointed as an amil must have the nature of a mandate
2. In addition to the mandate, a zakat institution must have professionalism in its organizational culture.
3. Transparent, this attitude can optimize oversight mechanisms, where each party publicly announces their involvement or holds a role in internal and external organizations. This mechanism can reduce suspicion and minimize doubts with a transparent attitude.

Maqāshid Sharia is a theory of Islamic law that has grown since the beginning of forming Islamic law, then well developed by scholars after the tabi'in period. *Maqāshid Sharia* was popularized by a Maliki cleric in the 8th century, Abu Ishak al-Syatibi. However, previously the discussion of *Maqāshid Sharia* had been discussed when the scholars of ushul fiqh discussed the theory of *maslahaṭ*. The formulation of *Maqāshid Sharia* was first discussed in the Kitab al-Burhan by Imam al Harmayn in the chapter Illah and Do'a. He argued that *Maqāshid Sharia* could be categorized into three: dharuriyat, hajiyat, and *tahsiniyat*. In addition, he also formulated dharuriyat al-Qubra in *Sharia* or better known as *Maqāshid al-khomsah*. In the 12th century AD, Imam Ghazali was an expert on jurists (*fiqh*), Islamic doctrines (*aqidah*), spirituality (Sufism), and philosophy argued in his book Syifa al-Ghalil that *Maqāshid Sharia*

[113] As-Sayyid Sabiq et al., *Fiqh Al-Sunnah* (Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990).

is divided into two parts, namely religion and the world. The division in the world category is focused on four things: guarding oneself, guarding reason, guarding offspring, and guarding property. The religious category is anything that refrains from abusive acts.

Imam Shatibi, known as Sheikhul *Maqāshid Sharia* in his work al-muwāfaqat, divides *Maqāshid Sharia* into two: qasdu al-shari'a and qasdu al-mukallaf. Imam As Syatibi claimed that the objective of Islamic law in Allah's *Sharia* is to achieve justice and profit on three levels: dharuriyat, hajiyat, and *tahsiniyat*. Imam As Syatibi also stated that the scholars' research. *Maqāshid Sharia* must assist in a general understanding of the law (*kulliyah*) and partial law (*juz'iyyah*), comprehending *syar'i* texts correctly on a practical level. *Maqāshid Sharia* must assist in correctly limiting the meaning of the *lafadz* in question, as nash-related to the law is extremely varied in terms of *lafadz* and its meaning. *Maqāshid Sharia* limits the intended meaning when there is no definite postulate in the Qur'an and As-sunnah on the contemporary issue of mujtahids referring to *Maqāshid Sharia* in *istinbath* law after combining it with *qiyas, ijtihad, istihsan, istislah*. *Maqāshid Sharia* helps mujtahids to find laws related to human actions to produce laws that are to the conditions of society.[114]

In the distribution of Zakat, Islam has established mustahik, which is eight *asnāf*. The goal is to meet all the needs of the people and the interests of society. The collected Zakat is not given to all *asnāf* but is also given priority to certain *asnāf* who are in dire need. Abu Hanifah said that Zakat should not be given to others other than eight *asnāf* but could be chosen among the eight *asnāf*. Imam

[114] Irfan Nurfalah and Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 1 (May 31, 2019): 55, https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205.

Ghazali argued that in managing property, zakat management should be handled by a special, independent institution that is far from government interference. Meanwhile, Ibn Taimiyah argued that the management of property (including Zakat) should be carried out by institutions with authority and coercive power, namely the state.[115]

Zakat means to grow and develop, fertility or increase, or it can also mean to purify. Law Number 23 of 2011, concerning zakat management, states the definition of Zakat, a property issued by a Muslim or business entity to be given to those entitled to receive it according to Islamic law. From a *Maqāshid Sharia* perspective, Zakat focused on finding the value of the human benefit in every taklif bestowed by Allah SWT. According to Al-Syatibi, *Sharia* aims to realize the benefit of humanity in the world and the hereafter.

If examined further than Al-Syatibi's statement, the content of *Maqāshid Sharia* or the law's purpose is humanity's benefit. Al-Syatibi's view of this is none other than the understanding that the obligation was created to realize the benefit of Allah's servants and that no law of Allah has no purpose. Hence, if the law has no purpose, it is tantamount to imposing something that cannot be implemented. Imam Al-Syatibi gave three criteria for determining *maslahaṭ*, namely:

1. *Maslahaṭ* is something 'aql (rational)
2. *Maslahaṭ* must conform to *Maqāshid Sharia* as a whole
3. Maintaining things that are *dharuriyyat* or eliminating distress in religion

Therefore, the maslahat and *Maqāshid Sharia* approach in distributing Zakat with the contract of *Qardh Hasan* and *Mudharabah*

[115] Yusuf, "Pola Distribusi Zakat Produktif : Pendekatan Maqasid Syari'ah Dan Konsep CSR."

makes it more rational and beneficial without leaving the spirit of the obligation to redeem zakat property to those who are entitled to receive it.[116]

IMPLEMENTATION OF *MAQĀSHID SHARIA*-BASED ZAKAT DISTRIBUTION OF THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY IN DKI JAKARTA

Based on the distribution of zakat distribution programs that BAZNAS has implemented, they are as follows:

Table 1*: BAZNAS Zakat Distribution Program*

Sector Field	Amount (Rupiah)	Amount (%)
Economical	552.166.541.845	10,06
Education	1.438.512.064.225	26,20
Da'wah	1.288.101.574.916	23,46
Health	462.616.244.461	8,43
Social Humanitarian	1.749.044.945.469	31,86

Source: National Zakat Statistics 2018[117]

The findings show that BAZNAS actively uses the website to convey information to the public as part of their reporting responsibilities on the management of zakat funds. However, the information must be regularly updated based on the reporting period. Websites are one of the simplest and fastest tools for delivering reports and conveying information about zakat

[116] Nurfalah and Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," May 31, 2019.

[117] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), "Statistik Zakat Nasional 2018," 2018, https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Statistik-Zakat-Nasional-2018.pdf.

management, data collection, or distributing evidence with images. Due to limited human resources, zakat managers in these three BAZNAS institutions chose manual reporting methods and delivering information to the public. Another reason is that muzakki is used to receiving official accountability reports (Accountability Reports–LPJ) in the form of prints/notes.[118][119]

Viewed from this perspective, one aspect of zakat management accountability, transparency in reporting, has not been fulfilled. As an accountant, muzakki needs to be informed how zakat funds have been distributed. Nowadays, where people live in the digital world, the manual reporting process is considered ineffective and efficient. This reporting process is because of the time and place constraints that cause information not to be conveyed correctly. In reporting zakat funds, religious values are needed as the BAZNAS Institution has a vital role in the implementation of Zakat, one of which is a pillar in Islam[120].

It is the benefit that is the togetherness of human life that should exist for the benefit of man. *Maslahaṭ* includes five things: maintaining religion, soul, offspring, property, and reason. By obeying *Sharia* law and refraining from behavior and speech forbidden by *Sharia*, Allah intends to establish and enforce religion in the human soul. This *Sharia* includes creeds, worship, and laws mandated by Allah SWT to regulate and regulate human relations with Allah SWT and regulate relations between people. Maintaining religion means that Allah commands to uphold Islamic *Sharia*; in this case, what is always done by the Amil Zakat Agency

[118] "Kabar Baznas Bazis DKI," BAZNAS (BAZIS) Provinsi Dki Jakarta, accessed December 14, 2021, https://baznasbazisdki.id/publikasi/.

[119] PUSKAS BAZNAS, "Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat : Teori Dan Konsep," *News.Ge* 4 (2019): https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava, https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava.

[120] "Kabar Baznas Bazis DKI."

(BAZNAS) consists of Zakat Fitrah, Infaq, Shadaqoh, Fidyah, Corporate Zakat, Zakat Income, Zakat Emas and Zakat Perak. Then it is distributed in a consumptive and productive manner. In the Zakat Manual published by the Dirjen Bimas Islam Affairs of the Ministry of Religious Affairs, there is a policy on the use of zakat funds in the form of distribution innovations which are categorized as follows:[121]

1. Traditional consumptive: distribution of Zakat to be used directly by mustahik (especially the poor) to meet daily needs (e.g., zakat fitrah) or zakat mal, which is distributed to victims of natural disasters or under certain conditions;
2. Creative consumptive: distribution of Zakat, which is embodied in other forms of original goods but still in the consumptive category; for example, Zakat is distributed in the form of school supplies or scholarships;
3. Traditional productive: the distribution of Zakat given in the form of productive goods, for example, buying goats, cows, razors, and mustahik. Distribution in this form to mustahik will be able to create businesses that create jobs;
4. Creative productive: zakat distribution which is realized in the form of capital, both capitals to build social projects and to increase the capital of traders and small entrepreneurs;

Muslims are bound to marry and procreate to ensure the continuation of humanity and preserve the human soul. *Sharia* law also mandates that individuals ensure survival by securing necessities like water, food, clothing, and a roof over their heads. Islam also obliges man to prevent something that endangers his life.

[121] Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, 2014).

Therefore, wishes and *diyat* is mandatory and it is forbidden. The activity was carried out on February 22, 2021, and the Amil Zakat Agency (BAZNAS) distributed necessities for the recovery of stunted children in Pangkal Beras Village, Kelapa District, West Bangka Regency.[122]

Furthermore, holding health counseling as an effort during the Covid 19 Pandemic. An emergency benefit in keeping offspring, Allah obliges people to marry to obtain offspring and obliges them to guard themselves against adultery and the sanction of *qadzaf* (accusing adultery). The cooperation activity of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) with the DKI Jakarta Provincial Government held a "*Wedding on the Street*" event at the Monas intersection in Central Jakarta on July 15, 2012. Emergency benefits in maintaining assets. Islam requires people to try to find *rizq* and allow *muamalaṭ* or buying and selling, bartering, and commercial transactions. It is illegal to commit theft, treason, unlawfully eat someone else's property, and impose sanctions on the offender, not waste property.[123]

The activity, carried out on March 12, 2021, by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) for microfinance in Jabon Mekar Village, facilitated business development for mustahik partners in Jabon Mekar Village, Parung, Bogor. In addition to providing financing facilities through interest-free business capital, it also assists and trains partners in business development. The form of benefit in the *Maqāshid Sharia* perspective in this program is to nurture reason. God obliges man to keep his mind; therefore, everything intoxicating is forbidden to be consumed, and the culprit will be doomed. Scholarship activities were carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as reported on

[122] "Kabar Baznas Bazis DKI."
[123] "Kabar Baznas Bazis DKI."

February 19, 2021; there were 132 participants from 24 provinces who passed the selection and continued the next process.[124]

The need for hajj is the need of a man to obtain the spaciousness of life and avoid difficulties. The main principle in this aspect of hajj is to eliminate difficulties, ease the burden of taklif and facilitate human affairs. BAZNAS Microfinance activities provide capital facilities with zero percent interest to business actors with the aim of hajj interests, minimizing dependence on loan sharks. In addition, BAZNAS collaborates with PT Pegadaian with the aim that the public can make pawn transactions as well as do Zakat, infaq, and shadaqah.

The virtues of *tahsiniyat* are everything proper and proper to follow reason and customs and stay away from everything despicable following common sense. This need does not seem to touch an activity or something that is a basic or substantial need for life but only relates to something that is a means, ordinance, or effort to produce goods that can facilitate the fulfillment of protection in the level of *dharuriyyat* and *tahsiniyat*. The BAZNAS sea ambulance event has a specificity as an ambulance transportation with a length of 14 meters with three engines powered by 750 pk.[125]

[124] "Kabar Baznas Bazis DKI."
[125] "Kabar Baznas Bazis DKI."

Table 2: *Program division based on Maqāshid Sharia – BAZIS DKI Jakarta*

No	*Maqāshid Sharia*	Program
1	*Hifdz Ad-Din*	Operational assistance for Islamic Syiar activities
		Operational assistance for muallaf activities
		Clergy regeneration scholarship
		Spiritual formation and religious activities
		Monumental relief
		Qari and Qari 'ah coaching program
2	*Hifdz An-Nafs*	Personal help for Quran teachers
		Personal assistance for mosque cleaners, muezzins, and Imams
		Personal assistance for honorary teachers of madrasahs
		Personal help for TPA/TKA/TPQ teachers
		Personal help for orphans
		Personal help for dhuafa
		Dhuafa house renovation
		Personal assistance for victims of natural disasters and humanitarian affairs

No	*Maqāshid Sharia*	Program
3	*Hifdz Al-'Aql*	High school student scholarships
		Undergraduate student scholarships
		Graduate student scholarships
		Personal help for the program "Santri Cerdas."
		Personal help for the "Smart ECCE Teacher" program
		Pondok Dhuafa Program in arrears of tuition fees
		Educational assistance for specialized research
4	*Hifdz Al-Nasl*	Personal assistance for deceased pilgrims
		Personal assistance for medical expenses
		Personal help to ease the burden of life
		Personal help for gharimin
		Personal help to Ibn Sabil

Source: baznasbazisdki.id, 2022.[126]

BAZIS DKI Jakarta has five programs for distributing Zakat. In 2019, BAZIS DKI Jakarta distributed 23.17% in collecting Zakat for operational guidance of Islamic Syiar activities, operational guidance for converted gymnastics, ulama recovery grants, deep guidance and firm practice, Qari' and Qari 'ah training programs, as well as large training programs. This project is remembered as

[126] "Kabar Baznas Bazis DKI."

"Jakarta Bertaqwa" as the main program for strengthening the religious field with strict supervision.[127]

In life protection, BAZIS DKI Jakarta distributes its Zakat through the "Jak B Bertaqwa" Program with 20 activities, the "Jak B Cerdas" Program with 16 activities, the "Jak B Sehat" Program with 36 activities, the "Jak B Green" Program with 34 activities, the "Jak B Berdaya" Program with 23 activities from 2019 to 2022. The project is expected to increase the personal satisfaction of the *Asnāf*, especially Sabilillah, Fakir, Miskin, Gharimin, and Ibn Sabil. Individual coaching for Qur'an educators, Mosque Hygiene Officers, Imams, and TPA / TKA / TPQ Teachers under "Jakarta Bertaqwa" as the main program. Then, individual guidelines for dhuafa circulated, including calculating medical expenses, natural disaster relief, medical expenses, and easing the burden of living, which is remembered as "Jakarta Peduli" as a program in strengthening the social sector.[128]

CONCLUSION

In the distribution of Zakat, Islam has established mustahik, i.e., eight *Asnāf*. Based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management has implications for the basis of policies that cannot be doubted for the benefit of the people, the welfare, and the prosperity of the poor. The expediency of *dharuriyyat* (religion, soul, descent, property) with two levels, namely hajiyyat and *tahsiniyat*.

In connection with this, the National Amil Zakat Agency implemented one of the ways to reduce poverty in Muslim communities and the distribution of Zakat as far as possible not only to meet the consumption needs of the mustahik but for a long period freeing them from dependence on zakat funds.

[127] "Kabar Baznas Bazis DKI."
[128] "Kabar Baznas Bazis DKI."

The form of program implementation applied is in the form of traditional consumption, creative consumptive, traditional productive, and creatively productive. The "Jak B Bertaqwa" program, the "Jak B Cerdas" program, the "Jak B Sehat" program, the "Jak B Green" program, and the "Jak B Berdaya" program which was carried out from 2019 to 2022 a form of implementation of the *Maqāshid Sharia*-based zakat distribution model by BAZNAS in DKI Jakarta.

DISCLOSURE

Conflicts of Interest

The author(s) declare(s) that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Funding Statement

This research received no external funding

BIBLIOGRAPHY

Aibak, Kutbuddin. "Zakat in Maqashid Al-Syariah Perspective." *Ahkam: Journal of Islamic Law* 3 (n.d.): 199–218.

Ajengwind. "Kenali Metode Penghitungan Zakat Perusahaan Anda." Ubico, 2020. https://ubico.id/blog/kenali-metode-penghitungan-zakat-perusahaan-anda/.

Hafidhuddin, Didin, and Irfan Syauqi Beik. "Zakat Development: The Indonesia's Experience." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan." *Pemerintah Negara Republik Indonesia*, 2014, 60. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5461/pp-no-24-tahun-2014.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Tambahan Lembaran Negara Nomor* 5255 (2011).

Johan, Sudirman M, Nur Hadi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq,

and Mawardi Muhammad Shale. "Konsep Hikmat Al-Tasyrî' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 147. https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5338.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi Dki Jakarta. "Kabar Baznas Bazis DKI." Accessed December 14, 2021. https://baznasbazisdki.id/publikasi/.

Mutakin, Ali. "Hubungan Maqashid Al Syari'Ah Dengan Metode Istinbath Hukum." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. Raden Intan State Islamic University of Lampung, 2017. https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789.

Nasuka, Moh. "Maqashid Syari'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 1–10. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.421.

Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*. Politeknik Negeri Bandung, 2019. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205.

———. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 1 (May 31, 2019): 55. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). "Statistik Zakat Nasional 2018," 2018. https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Statistik-Zakat-Nasional-2018.pdf.

PUSKAS BAZNAS. "Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat : Teori Dan Konsep." *News.Ge* 4 (2019): https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava. https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava.

RI, Kementrian Agama. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, 2014.

Sabiq, As-Sayyid, Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin, and Johari

al-Yamani. *Fiqh Al-Sunnah*. Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.
Syahroni, Oni, and Adiwarman A Karim. "Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2016.
Wibisono, Yusuf. "Potensi Zakat Dan Tantangan Pengelolaan," 2018. https://puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1_Yusuf-WIbisono.
Yusuf, Muhammad Yasir. "Pola Distribusi Zakat Produktif : Pendekatan Maqasid Syari'ah Dan Konsep CSR." *Jurnasl Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Aceh* XVI, no. 1 (2014): 207–30.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Journal of Sharia and Economic Law
Vol. 2, No. 2, December 2022 (pp. 196-211)

INFLATION IN INDONESIA: IBN KHALDUN AND AL-MAQRIZI WORD VIEW

***Moh. Abdul Aziz Alwa*[1], *Amin Wahyudi*[2]**
[12]Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: alwa@iainponorogo.ac.id[1]
Email: aminwahyudi@iainponorogo.ac.id[2]

DOI: 10.21154/invest.v2i2.5099		
Received: 2022-11-01	*Revised: 2022-11-22*	*Approved: 2022-12-10*

Abstract: Inflation is a problem in the economic system that has occurred repeatedly from the beginning of the development of human civilization. Since people started using money to trade goods and services, inflation has remained constant. On the other hand, the inflation rate is also used as a macroeconomic analysis of a country/region, such as economic growth, external balance, and income distribution. Conditions of high inflation, if not handled thoughtfully and appropriately, will cause economic depression. However, in the Islamic world, there are scholars, namely, Ibn Khaldun and Al-Maqrizi. These two Muslim thinkers provide an overview of the phenomenon of inflation since the 14th century AD. This research seeks to find the slices of Ibn Khaldun and Al-Maqrizi's thoughts about the causes of inflation and to offer solutions to the phenomenon of inflation that occurs. We chose the literature study research to explore the thoughts of Ibn Khaldun and Al-Marqizi in classic books and several primary sources that discuss the thoughts of the two and compare them with the concept and conditions of inflation in Indonesia through the official websites of BPS and Bank Indonesia. The study found that a country's weak administrative system and corrupt mentality cause inflation. To overcome inflation, improving the two causes of inflation above is the solution offered by these two experts.

Keywords: *Al-Maqrizi; Ibn Khaldun; Inflation; Word View*

Abstract: Inflasi merupakan,merupakan masalah dalam sistem ekonomi yang terjadi berulang dari awal berkembangnya peradaban manusia. Sejak terciptanya uang sebagai moda pertukaran yang mudah, inflasi menjadi fenomena yang tidak pernah luput terjadi. Disisi lain angka inflasi digunakan pula sebagai analisa makroekonomi suatu negara/wilayah seperti: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal maupun pemerataan pendapatan. Kondisi inflasi yang tinggi apabila tidak ditangani secara serius dan tepat akan menyebabkan depresi ekonomi. Namun dalam dunia Islam ada cendekiawan, yakni Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi. Kedua pemikir muslim ini memberikan gambaran fenomena inflasi sejak abad ke 14 M. Penelitian ini berusaha menemukan irisan pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi tentang penyebab inflasi serta memberikan tawaran solusi terhadap fenomena inflasi yang terjadi. Penelitian studi literatur dipilih guna mengeksplorasi pemikiran Ibn Khaldun dan Al-Marqizi dalam kitab klasik dan beberapa sumber utama yang membahas pemikiran keduanya dan membandingkannya dengan konsep dan kondisi inflasi di indonesia melalui website resmi BPS maupun Bank Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa inflasi pada suatu negara pada dasarnya disebabkan oleh sistem administrasi yang lemah dan mental korup. Untuk mengatasi inflasi, perbaikan kedua penyebab inflasi di atas menjadi solusi yang ditawarkan oleh kedua pakar ini.

Keywords**:** *Al-Maqrizi; Ibn Khaldun; Inflasi; Sudut Pandang*

INTRODUCTION

Inflation is inseparable from the development of the modern economy; today, almost all countries are experiencing inflation. Inflation is a condition where a country's large circulation of currency causes an increase in demand, resulting in a continuous increase in prices. The impact of inflation on aggregate macroeconomic variables, economic development, external balance, competitiveness, interest rates, and even income distribution make it an early and significant clue in the analysis of an economy as well as the condition of a country. [129] Rising costs

[129] Salman Al Parisi, "Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi Dan Perspektif Manajemen Syariah," *Islamic Economics Journal* (Universitas Darussalam Gontor, 2018), https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2965.

are a hallmark of inflation; these prices have a negative impact not only on the economic condition of a country but also on the well-being of individuals and society. The rising prices of only one or two items cannot be referred to as inflation unless it also affects most other items. The inflation rate for a given period is determined using several macroeconomic factors, including the Free Trade Price Index, the Consumer Price Index, and the Implicit Price Index or GDP Deflator.

In general, monetary policy and fiscal policy are used to reduce inflation. Monetary policy oriented towards declining inflation rates, strong real sector growth, low unemployment, stable financial situation, controlling trade deficits, and stable exchange rates is just a few of the goals of achieving prosperity and economic stability. Monetary policy is a solution taken by the Indonesian government to tackle high inflation; this policy regulates the amount of money circulation in the community. [130]

In a statement from Bank Indonesia, starting in July 2005, the monetary policy framework was implemented, namely, the *Inflation Targeting Framework* (ITF). Inflation control uses the benchmark interest rate as the main effort to control inflation within this framework. It is proven that the benchmark interest rate remains a way for Bank Indonesia to overcome COVID-19 at the end of 2019-2021. Bi's benchmark interest rate has remained at the level of 3.50% for 17 months since February 2021 until BI finally gradually raised 25 basis points in August 2022 to 3.75% and BI again raised the benchmark interest rate by 50 basis points to 4.25% and added another 50 basis points in early October 2022 to 4.75%. [131]

[130] Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, ed. Ade (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).
[131] Bank Indonesia, "Tujuan Kebijakan Moneter," 2022.

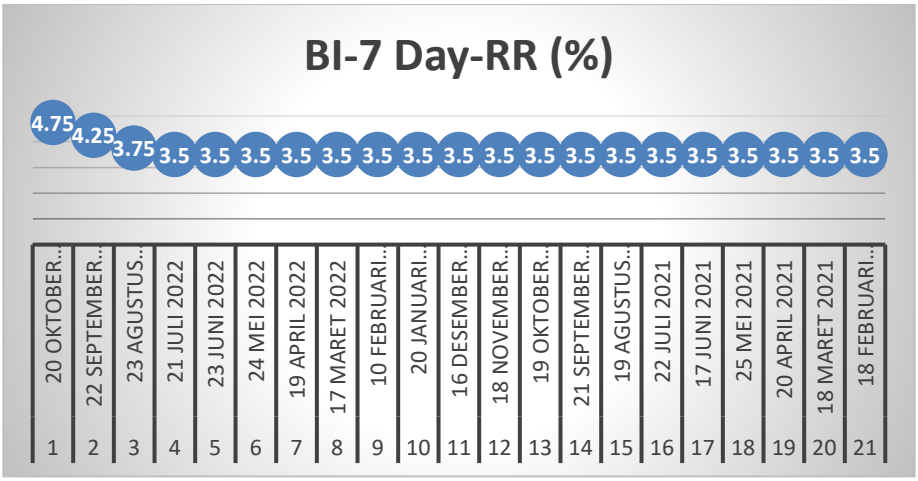

Figure 1: Bank Indonesia's benchmark interest rate

Bank Indonesia Sources 2022

The inflation rate in Indonesia in the 2015-2019 period tends to fluctuate. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's average inflation is 3.17%. (Statistics, 2022) [132] [133]

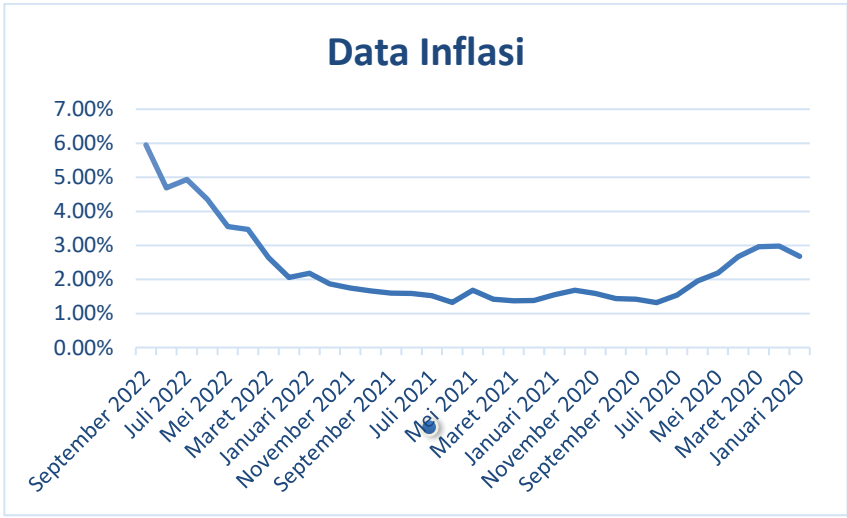

[132] Badan Pusat Statistik, "Tabel Dinamis Subjek Inflasi," 2022.
[133] Bank Indonesia, "Data Inflasi," 2022.

Figure 2: Monthly inflation data for 2020-2022, Source Bank Indonesia 2022

Inflation in Indonesia tends to be stable, but from data from Bank Indonesia after the *Covid-19* outbreak, inflation has risen due to the *easy money* policy. The government, through Bank Indonesia, is currently trying to suppress the inflation rate by raising interest rates again. The Indonesian nation has gone through various monetary crises, such as in 1997-1998. In January 1997, the rupiah's value collapsed by 185% from Rp. 5400/US$ to touch Rp. 15,400/US$. [134] This financial crisis results from the decline in the value of the Thai baht due to the floating value policy on the US dollar. This predicament is compounded by the Indonesian economy, which is still backed by dollar debt, and by the economy's structure, which is dominated by *crony capitalism* based on the power environment. [135]

Inflation is unavoidable. However, some measures can be taken to reduce inflation to a low level. Al-Maqrizi offers an essential idea of inflation. The offer of ideas from Al-Maqrizi is divided into two parts, natural inflation and inflation of human error, as described earlier. Human beings find it difficult to withstand natural inflation. Al-Maqrizi asserts that various foods and other products did not harvest after the cataclysm, which led to a sharp decrease in the availability of goods and shortages. While factors related to human error, such as corruption, poor governance, high taxation, and more excellent circulation of money, also contribute to inflation. Therefore, inflation can be suppressed by correcting human error elements such as corruption and cash circulation (JUB).

[134] CNBC Indonesia, "Rupiah Ambruk Terus! Bakal Seperti Krismon 1998?," 2022.

[135] Merdeka, "Penyebab Krisis Moneter Yang Penting Diketahui, Pahami Dampaknya," 2022.

Meanwhile, in Ibn Khaldun's opinion, inflation can also be caused by production failures; in his thinking, crop failure causes delays in the supply of goods, causing scarcity and increasing prices. Ibn Khaldun also thought that taxes had a lot to do with inflation. He said that the state needs more administrative management if taxes are too low. In contrast, if the government raises tax gains, there will be fiscal pressure, a drop in profits for traders and producers, and a tendency for prices to go up and wage policies to be strict.

This paper attempts to provide a wedge of thought between Ibn Khaldun and Al Maqrizi about inflation, where these two Muslim scholars lived in the 14th century AD when the condition of Islamic rule was in decline. It is hoped that in delivering these two Muslim thinkers, they can provide policy choices for tackling inflation in Indonesia.

The discussion of inflation is always exciting, but only a few relate to the thoughts of Muslim scholars. Some research on the theory of inflation from Muslim thinkers can be seen from the following writings: First, the writings of Ahmad Maulidizen states that the opinion of Ibn Khaldun from the book of Muqaddimah states that if tax revenues are low, the state cannot carry out its duties properly, while if taxes are increased it causes an increase in the cost of production, a decrease in the income of producers and traders. So it will result in the provision of wages. [136]

Second, research by Salman Al-Farisi analyzes the effect of inflation caused by human error, namely: corruption, money supply, and tax imposition policies. Salman argues that control over

[136] Ahmad Maulidizen, "Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy:," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 3, no. 2 (November 2019): 73–89, https://doi.org/10.28918/IJIBEC.V3I2.1661.

corruption could lower inflation by 1%. [137] Meanwhile, in the *third* study, it is still from the thought of Al-Maqrizi, written by Safarinda Imani, Ridan Muhtadi, and Hendri Husein Winari, said that inflation is caused by two factors, namely natural factors and human error factors. Furthermore, under the thinking of Umar Chapra, the credit-oriented solution (financing) is a solution to the theory of natural factors. As well as moral appeal as a solution to the theory of inflation of the human factor. [138]

This article uses qualitative methods and literature study research to compare the ideas of Ibn Khaldun and Al-Marqizi with the situation in Indonesia. The author collects primary data on inflation conditions in Indonesia from the BPS and Bank Indonesia websites. In addition, the author conducted research from various previous studies on the opinions of Ibn Khaldun and Al-Maqrizi regarding inflation in the form of books and journals.

THE CONCEPT OF INFLATION IN IBN KHALDUN'S VIEW

Ibn Khaldun has the full name Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami. He was born on May 27, 1332 AD, or 1 Ramadan 732 H in Tunisia. Ibn Khaldun's family is descended from the noble Bani Khaldun, who previously inhabited Seville but migrated to Tunisia after the *Reconquista* in the mid-13th century AD. [139]

---

[137] Parisi, "Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi Dan Perspektif Manajemen Syariah."

[138] Safarinda Imani, Ridan Muhtadi, and Hendri Husein Winari, "Al-Magrizi Inflation Theory Of Islamic Monetary Policy Implementation In Indonesia," *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (January 2021): 150–60, https://doi.org/10.32332/IJIE.V2I2.2097.

[139] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, ed. Nita Nur Muliawati (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

Ibn Khaldun explicitly stated that inflation is caused by rising demand and production cost pressures. [140] Fiscal policy is a policy budget receipts and expenditures that balances the budget. Ibn Khaldun proposed a solution to recession and inflation through tax deductions and increased government spending; the government is the largest market, the parent of all markets, in terms of income and income. If the government market has declined, it is natural that other markets will also decline, even in the larger aggregate (overall). [141]

Ibn Khaldun believed that inflation occurred when a corresponding rise in productivity did not accompany a rise in the money supply. This problem causes the prices of goods and services to rise, causing inflation. According to Ibn Khaldun, an increase in money that is not balanced with an increase in production can occur due to unproductive trading activities. For example, trading activities that only aim to make a profit by taking advantage of rising prices. In addition, Ibn Khaldun also stated that inflation could occur due to unnecessary expenditures, such as waste and corruption. This problem can cause money to circulate in the community, but a comparable increase does not follow it in production. According to Ibn Khaldun's theory, inflation can be controlled by increasing production and reducing unproductive trade activities. In addition, unnecessary expenses also need to be reduced, such as waste and corruption. Although Ibn Khaldun's theory is more than 600 years old, it is still relevant and can be applied to overcome the current inflation in Indonesia. Increasing production and reducing unproductive trade activities are expected to help stabilize prices and reduce inflation in Indonesia.

---

[140] Janwari.

[141] Hamdan Firmansyah, "Policy Model for Muslim State Inflation Control," *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (June 2021): 93–105, https://doi.org/10.15575/IJNI.V9I1.11984.

THE CONCEPT OF INFLATION IN AL-MARQIZI'S VIEW

Al-Maqrizi's full name is Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini; he was born in the village of Bajurwan, Cairo, in 766H (1364-1365 AD). It is known as Al-Maqrizi because his family came from Maqarizah, a village in Ba'lakbak. Al-Maqrizi has an interest in jurisprudence, hadith, and history. [142]

Al-Maqrizi argues that inflation occurs when prices, in general, increase and continue. Meanwhile, supplies are becoming scarce, and people must spend more money to get the same goods. [143]Al-Maqrizi categorizes inflation into two types: *natural* inflation, or inflation due to reduced inventory, and human *error inflation*, or *inflation* due to human reemergence. For natural *inflation*, Al-Maqrizi gives an example of crop failure caused by natural disasters, which leads to a decrease in the production of goods and scarcity. While the needs of society remain large and high, it leads to an increase in the price of other goods and services. [144]

In his following opinion on inflation, Al-Maqrizi stated that *human error inflation* occurs due to rampant corruption, poor government administration, excessive taxes, and excessive currency circulation.

First, rampant corruption and poor administration; corruption and abuse of authority result in a waste of state finances. In the records of public officials in the Mamluk government in Egypt, they privatized power and changed state authority to

---

[142] Abdul Latif Rizqon et al., "Al-Maqrizi's Inflation Concepts and Proof for the East Java Inflation Case 2015-2020," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2022): 99, https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7608.

[143] Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*.

[144] Ira M Lapidus, *Muslim Cities in the Later Middle Ages*, 1st ed. (London: Cambridge University Press, 1984).

personal superiority. [145] In addition, the Emirs and their household appliances are very far apart compared to the workers' income. Ordinary workers get 2 dirhams/per day, while Emirs get half to one million dirhams a year. For example, a governor of Damascus named Tankiz has 360,000 dinars and 1,500,000 dirhams, clothes worth 640,000 dinars and 4,200 pets. [146]

Second, taxes are exceeded; the government carries out the condition of tax collection to cover the operational needs of the state. Various conditions occurred in Egypt in 736H/1336 AD, such as the ease of selling wheat by the government in the hope of large profits. Thus, forcing farmers to produce more, but what happened was to increase in imports from Syria and northern Egypt. Meanwhile, the government imposed a fixed tax on wheat of 30 *dirhams/irdabb*. This tax determination increased by about 20 times compared to the actual tax rate. [147] This tax increase is used for dam/drain maintenance. Meanwhile, landowners increased land rental rates, resulting in high agricultural production costs. [148]

Thirdly, the circulation of excessive currency; Al-Maqrizi pays attention to conditions where there is too much currency in circulation in the community. The government-imposed currency printing to meet operational needs and demand. Meanwhile, a large amount of money in society causes an increase in prices. [149]

Al-Maqrizi stated that with the condition of inflation in a country, he divided the impact of inflation into several strata of society, namely: (1) the ruler, this group is the recipient of the

---

[145] Lapidus.

[146] Lapidus.

[147] Lapidus.

[148] Imani, Muhtadi, and Winari, "Al-Magrizi Inflation Theory Of Islamic Monetary Policy Implementation In Indonesia."

[149] Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*.

highest nominal income but the ability to buy decreases drastically because its real income falls due to inflation. The ruling class and its helpers were less affected by inflation; (2) rulers and wholesalers, whose assets decreased as prices increased and money's value decreased as prices increased; (3) the middle class, whose income increased but their standard of living remained constant as prices increased; and (4) farmers in rural areas, who, according to Al-Maqrizi, were divided into two groups: those who grew crops and those who sold them. Meanwhile, the second group, lower-middle-class farmers, is affected because the price increase is not proportional to their agricultural output; (5) students and soldiers, students, and soldiers suffered due to a fixed level of income while prices rose; (6) menial workers and fishermen, menial groups and requesters faced starvation and death as a result of inflation; [150] (7) the requester group. [151]

INFLATION IN INDONESIA: IBN KHALDUN AND AL-MARQIZI WORD VIEW

Based on historical records, Indonesia has gone through various crises that have resulted in excessive inflation. Indonesia experienced a severe crisis in 1998 where the rupiah depreciated very deeply on the US dollar (range of Rp. 2,500 / USD in August 1997, then reached the lowest rupiah at Rp. 17,500 / USD in April 1998). [152] Such conditions result in very high inflation, so the price of goods rises, and there is an extraordinary increase in unemployment. Conditions like this even continue after the crisis. The global crisis occurred again in 2008, and the beginning of this condition was America's default on housing loans. This crisis

[150] Janwari.

[151] Josef W. Meri, *Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia (Routledge Encyclopedias of the Middle Ages)*, 1st ed. (London: Routledge, 2006).

[152] Eri Hariyanto, *Mewaspadai Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya* (Jualin Bukumu, 2020).

caused America's allied countries to be affected. Indonesia also felt this condition when the government disbursed a fiscal stimulus of 6.1 billion USD through the Ministry of Finance. [153]

Since 2016, Indonesia has experienced relatively high inflation. According to the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's average inflation rate in 2016 was 4.3 per cent. This figure continued to increase in 2017 to 4.5 per cent. The leading cause of inflation in Indonesia is the increase in the price of staples, such as foodstuffs, oil, and gas. This price increase is due to rising raw material prices, rising labor wages, and high economic growth. In addition, inflation is also influenced by external factors, such as rising world oil prices and monetary policy that is not conducive. This inflation caused the rupiah exchange rate on the US dollar to depreciate, causing the price of imported goods to become more expensive.

To overcome inflation in Indonesia, the government has issued various economic policies. One of the policies taken is to raise Bank Indonesia's benchmark interest rate, which aims to attract funds from the market and reduce the demand for money. This policy is expected to help stabilize inflation and prevent a monetary crisis. In addition, the government has also issued various fiscal policies, such as controlling subsidies and increasing spending on infrastructure. These policies are expected to help stabilize prices and increase people's purchasing power. Despite various policies, inflation in Indonesia continues to rise. In 2018, Indonesia's inflation rate reached 4.9 percent, the highest since 2013. This fact shows that many things still need to be done to overcome inflation in Indonesia.

[153] Ahmad Erani Yustika, *Dari Krisis Ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2011).

According to Maqrizi, the way to prevent inflation is to manage monetary policy appropriately. Proper monetary policy can help maintain currency stability and keep the increase in money in circulation offset by increased production. In addition, Al Maqrizi also suggested that currency exchange be carried out in a balanced manner. The exchange of currency for gold or silver should be carried out under its actual value to avoid causing price distortions and inflation. Maintaining the stability of the currency rate and keeping the currency exchange carried out in a balanced manner is expected to help reduce inflation in Indonesia. This inflation needs to be done so the Indonesian economy can run stably and prosperously.

According to Ibn Khaldun, the way that can be done to prevent inflation is to increase production and reduce unproductive trade activities. Unproductive trading activities can lead to an increase in money that is not offset by an increase in production, thus causing inflation. In addition, Ibn Khaldun also suggested reducing unnecessary expenses, such as waste and corruption. Unnecessary spending can lead to an increase in money that is not offset by an increase in production, thus causing inflation. It is hoped that it can help reduce inflation in Indonesia by increasing production and reducing unproductive trade activities and unnecessary spending. This inflation needs to be done so the Indonesian economy can run stably and prosperously. [154]

CONCLUSION

Inflation is an economic condition almost experienced by every country in the world. Various world economists have given exposure to inflation. However, during the rollout of science, in the 14th century AD, Muslim scholars Ibn Khaldun and Al-Maqrizi

[154] Firmansyah, "Policy Model for Muslim State Inflation Control."

poured their thoughts on the condition of inflation based on empirical events in society. The wedge of thought from Ibn Khaldun and Al-Maqrizi regarding the causes of inflation is the high taxes provided by the government and the high state expenditure. This thought is inseparable from Al-Maqrizi's opinion that inflation occurs due to the poor administration of the state and the corrupt nature of its officials. Of the two Muslim thinkers, it can be said that tackling inflation starts with improving state officials' mentality and the state administrative system. The personal development of state managers can be returned to the values that distinguish the Haq and bathil. To improve the state administrative system is to provide as much support as possible for law enforcement against corruption perpetrators through state law enforcement agencies through the KPK Polri.

On the other hand, Islam has a perfect fiscal policy solution, namely, the receipt of zakat and khums. Receiving zakat at a percentage is not nominal; this will create inherent stability in the macroeconomic context. A good receipt of zakat will stabilize prices and suppress inflation when the aggregate is greater than the aggregate supply. Furthermore, in stagnation conditions, the declining aggregate demand can be filled with a good distribution of zakat. If the receipt of zakat has been good, the price and quantity of goods in the market will remain the same because the results of the business judge the zakat calculation process.

DISCLOSURE

Conflicts of Interest

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Funding Statement

This research received no external funding

BIBLIOGRAPHY

Firmansyah, Hamdan. "Policy Model for Muslim State Inflation Control." *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (June 2021): 93–105. https://doi.org/10.15575/IJNI.V9I1.11984.

Hariyanto, Eri. *Mewaspadai Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya*. Jualin Bukumu, 2020.

Imani, Safarinda, Ridan Muhtadi, and Hendri Husein Winari. "Al-Magrizi Inflation Theory Of Islamic Monetary Policy Implementation In Indonesia." *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (January 2021): 150–60. https://doi.org/10.32332/IJIE.V2I2.2097.

Indonesia, Bank. "Data Inflasi," 2022.

———. "Tujuan Kebijakan Moneter," 2022.

Indonesia, CNBC. "Rupiah Ambruk Terus! Bakal Seperti Krismon 1998?," 2022.

Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Edited by Nita Nur Muliawati. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Kartini, Sri. *Mengenal Inflasi*. Edited by Ade. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Lapidus, Ira M. *Muslim Cities in the Later Middle Ages*. 1st ed. London: Cambridge University Press, 1984.

Maulidizen, Ahmad. "Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy:" *International*

Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) 3, no. 2 (November 2019): 73–89. https://doi.org/10.28918/IJIBEC.V3I2.1661.

Merdeka. "Penyebab Krisis Moneter Yang Penting Diketahui, Pahami Dampaknya," 2022.

Meri, Josef W. *Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia (Routledge Encyclopedias of the Middle Ages)*. 1st ed. London: Routledge, 2006.

Parisi, Salman Al. "Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi Dan Perspektif Manajemen Syariah." *Islamic Economics Journal*. Universitas Darussalam Gontor, 2018. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2965.

Rizqon, Abdul Latif, Teguh Eka Prasetya, Mahendra Utama Cahya Ramadhan, and Shofiyatul Habibah. "Al-Maqrizi's Inflation Concepts and Proof for the East Java Inflation Case 2015-2020." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2022): 99. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7608.

Statistik, Badan Pusat. "Tabel Dinamis Subjek Inflasi," 2022.

Yustika, Ahmad Erani. *Dari Krisis Ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional*. 1st ed. Malang: UB Press, 2011.

© 2022 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Noncommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Journal of Sharia and Economic Law
Vol. 2, No. 2, December 2022 (pp. 212-234)

THE INFLUENCE OF PLAFOND, TENOR, APPLICATION PROCESS, AND LOAN FREQUENCY ON THE GROWTH OF BANK SYARIAH INDONESIA'S MSMEs CUSTOMERS

Anisa Lia Viantina[1], Ratih Purbowisanti[2], Dhidin Noer Ady Rahmanto[3], Dunyati Ilmiah[4], Novi Febriyanti[5]
[12345]Islamic Banking, Faculty of Economics and Business, Universitas Alma Atta, Indonesia

Email: anisalia01@gmail.com[1], ratihp33@gmail.com[2], dhidhin@almaata.ac.id[3], dunyatiilmy@almaata.ac.id[4], novikfbr@gmail.com[5]

DOI: 10.21154/invest.v2i2.5405

Received: 2022-11-12	*Revised: 2022-12-22*	*Approved: 2022-12-23*

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are essential to economic growth. However, the growth of MSMEs is constrained by difficulties in accessing capital. This study aims to determine the effect of the variable amount of financing (plafond), the application process, the repayment period (tenor), and the frequency of borrowing on the growth of MSMEs. This study uses a quantitative method with a sample of 80 respondents from Bank Syariah Indonesia branch office Sleman Prambanan customers. The sample selection used a purposive sampling technique with the criteria that Bank Syariah Indonesia branch office Sleman Prambanan customers were SMEs in the Yogyakarta and Klaten areas and used financing products such as BSI KUR Micro, BSI KUR Kecil, and BSI Super Micro. The analytical technique used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, t-test, F test, and the coefficient of determination with the help of SPSS software. The results show that the amount of financing (plafond) and the repayment period (tenor) have a positive effect. In contrast, the application process and the borrowing frequency do not positively affect the growth of MSMEs.

Keywords*: Islamic Banking; Islamic Microfinance; MSMEs*

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan UMKM terkendala kesulitan akses permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah pembiayaan (plafon), proses pengajuan, jangka waktu pengembalian (tenor), dan frekuensi peminjaman terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 80 responden nasabah Bank Syariah Indonesia branch office Sleman Prambanan. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria nasabah Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Sleman Prambanan, merupakan UKM di wilayah Yogyakarta dan Klaten, serta menggunakan produk pembiayaan seperti BSI KUR Mikro, BSI KUR Kecil, dan BSI Super Mikro. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan (plafon) dan jangka waktu pengembalian (tenor) berpengaruh positif, sedangkan proses pengajuan dan frekuensi peminjaman tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM.

Kata kunci*: *Keuangan Mikro Islam; UMKM; Perbankan Islam

INTRODUCTION

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia have an essential role in national development, especially economic growth. This role is reflected in the large number of MSMEs spread across each economic sector. The potential of MSMEs to absorb much labor and their contribution to the formation of the dominant Gross Domestic Product (GDP) is a factor that makes MSMEs have an essential role in increasing economic growth.[155]

Along with their potential, there are three core problems faced by MSMEs, such as market access, access to capital, and

[155] Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 138, https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952.

technology[156]. The difficulty of MSMEs in getting access to capital is caused by the high level of loan interest rates, difficulties in fulfilling material guarantees, and complex administration. The distrust of financial institutions toward MSMEs, as well as the inability of MSMEs to make credit applications with banking requirements, are other factors that make it MSMEs challenging to access capital[157].

Sharia microfinancing products with profit-sharing systems owned by Islamic banks can be a solution for MSME actors who feel unable to pay back the high interest provided by conventional banks[158]. Financing disbursed by Islamic banks is affected if the customer's business financing increases, and the customer can return the financing smoothly[159].

The amount of financing (plafond) based on Fernandina's[160] research affects the sustainability of the customer's business. As business capital increases, MSME actors are increasingly motivated to develop their business by adding production goods or expanding their place of business[161]. The results of Camelia and Ridwan's [162] research conducted at BMT UGT Sidogiri Ketapang Branch stated that the financing provided to its members in the form of MSME

---

[156] Gregorius Rio Alfrian and Endang Pitaloka, "Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemik Covid 19 Di Indonesia," *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)* 6, no. 2 (2020): 139–46.

[157] Basir S and Maretha Ika Prajawati, "Membangun Hubungan Berkelanjutan Sektor UMKM Dan Perbankan," *Iqtishoduna* 16, no. 2 (2020): 147–66, https://doi.org/10.18860/iq.v16i2.7876.

[158] Dewi Tamala and Lucky Nugroho, "Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah," *Sikap* 3, no. 1 (2018).

[159] Sri Safitri et al., "AKAD MURABAHAH PADA MASA PENDEMI COVID-19 DI BTPN," *Jurnal Kitab Iqtishad* 1, no. 1 (2022).

[160] Cupian Deny Febriandani, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Bprs Pnm Mentari)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan* 2, no. 1 (2019): 95–113.

[161] Dina Camelia and Ahmad Ajib Ridwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 195–204.

[162] (2018)

actors influenced increasing revenue, operating profit, number of customers, and number of workers. As business capital increases, MSME actors are increasingly motivated to develop their business by adding production goods or expanding their place of business.

Ease of financing requirements is a form of contribution of Islamic banks to the growth of MSMEs. Microfinance procedures at Islamic banks consist of several indicators, such as easy requirements, fast disbursement processes, low administrative costs, easy collateral to fulfill, and the amount of financing provided by customer agreements and needs[163]. The results of the research by Musfiroh et al. [164] stated that the financing process significantly influences the income of MSMEs. Improving service quality and increasing the ease of financing processes can encourage MSMEs to increase their income.

Islamic banks give customers the repayment period (tenor) to repay the loan along with the profit-sharing margin. The repayment period affects the number of installments that must be paid. The longer the repayment period (tenor), the smaller the installment amount[165]. The more extended repayment period (tenor) can support customers in developing their businesses because of the amount of financing (plafond) that can be paid in installments so that customers can allocate funds from operations for business development purposes[166].

---

[163] Mila Fursiana Salma Musfiroh, Laila Sabrina, and Sarno Wuragil, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Banjarnegara," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 136–58, https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.928.

[164] (2017)

[165] Afriyeni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Talang Cabang Solok," *Buletin Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 2 (2013): 207–22.

[166] Siti Zubaidah Lubis, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

The frequency of borrowing shows how often MSMEs get financing from Islamic banks. The more often the customer gets financing, the indicates that the customer has understood how to take full advantage of the financing. The frequency of borrowing also indicates that Islamic banks already have confidence in their customers[167]. The frequency of borrowing in the research of Tunas et al[168] positively affects the growth of customer business turnover by 0.55% per year. Utami's[169] research states that the more often customers get financing, the higher the additional capital is obtained.

Bank Syariah Indonesia (BSI) commits as the most prominent Islamic bank in Indonesia to support the development of MSMEs. Islamic banks' commitment to distributing financing to MSMEs can be felt by all MSMEs spread across Indonesia. One of them is MSMEs in the Province of the Special Region of Yogyakarta. As of May 2022, Bank Syariah Indonesia has distributed financing to MSMEs in the Special Region of Yogyakarta as much as Rp. 599.58 billion. This value has increased by 23.76% compared to December 2021[170].

The growth of MSMEs in the Sleman Regency needs support from Islamic banking, considering that the number of MSMEs spread in the Sleman Regency is the largest in the Province of the

---

[167] Febriana Mahliza and Netti Tinaprilla, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Murabahah Untuk Usaha Mikro Agribisnis Sektor Perdagangan (Studi Kasus: Kbmt Bil Barkah, Bogor)," *Forum Agribisnis : Agribusiness Forum* 2, no. 2 (2012): 121–40.

[168] Aldesta Perwitasari Tunas, Lukytawati Anggraeni, and Deni Lubis, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Depok," *Al-Muzara'ah* 2, no. 1 (2014): 1–16, https://doi.org/10.29244/jam.2.1.1-16.

[169] Sherly Nur Utami, "ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PEMBIAYAAN , PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Pada Anggota Bmt Muamalat Jumapolo Kabupaten Karanganyar)," *Jurnal Ilmiah*, 2020.

[170] Jumali, "BSI Dukung Usaha Rakyat Melalui UMKM Center Di DIY," Harianjogja.com, 2022.

Special Region of Yogyakarta. 113,299 MSME units in Sleman Regency are spread over 17 Kapanewon. Kapanewon Prambanan has 2,765 microenterprises, 17 small-scale businesses, and one medium-sized business unit[171]. According to Yoga Hardaya as Sleman Regent, MSMEs in Kapanewon Prambanan need to get support to be more advanced because MSMEs play a role in absorbing labor and improving community welfare[172].

Kapanewon Prambanan only has one Islamic bank. This number differs from the number of MSMEs in Kapanewon Prambanan, reaching 2,765 units. However, BSI branch office Sleman Prambanan remains committed to encouraging the growth of MSMEs with microfinancing products. Data from interviews with account officers at BSI branch office Sleman Prambanan show that the number of customers has increased from the original 305 customers in 2019 to 366 customers in 2020 and 400 customers in 2021. The amount of microfinance disbursed by BSI branch office Sleman Prambanan is also increased from Rp13,878.9 billion in 2019 to Rp16,285.3 billion in 2020.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are essential to economic growth. Reflected in a large number of MSMEs, the potential to absorb labor and contribute to the formation of Gross Domestic Product. Along with the potential, there are problems experienced by MSMEs, such as difficulties in market access, access to capital, and technology. Difficulty in accessing capital is the main problem experienced by the majority of MSMEs. Because capital is essential for the growth of MSMEs, support from financial institutions such as Islamic banks is needed. In their role as intermediate organizations that transfer funds from units with a surplus to units with a deficit, Islamic banks offer

[171] DISKOPUKM, "Tabel Rekap UMKM Per Kapanewon," no. 1 (2021): 1.

[172] Kominfo, "78 UMKM Ikuti Pujafest Di Kompleks Candi Prambanan," klatenkab.go.id, 2021.

financing options that micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) can utilize to meet their capital requirements. The influence of the financing channeled by Islamic banks is known by comparing the variables of the amount of financing (ceiling), the submission process, the repayment period (tenor), and the frequency of borrowing on the growth of MSMEs. The results showed that the amount of financing (ceiling) influenced MSME growth, the submission process did not affect MSME growth, the repayment period (tenor) influenced MSME growth, and the frequency of borrowing did not affect MSME growth.

The research method used in this study is quantitative[173]. The population in this study was 400 customers of BSI,BSI branch office Sleman Prambanan. The sampling technique used is purposive sampling, with the criteria being BSI branch office Sleman Prambanan customers whose businesses are in Yogyakarta and Klaten and use sharia microfinancing products such as BSI KUR Mikro, BSI KUR Kecil, and BSI KUR Super Micro. Calculated the sample using the Slovin formula and obtained as many as 80 customers. The analytical technique used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, t-test, F test, and coefficient of determination with the help of SPSS software.

[173] M. Zidny Nafi' Hasbi Chaidir Iswanaji, Aziz muslim, "IJARAH COLLABORATIVE SERVICE MODEL IN SHARIA BANKING," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 2 (2022): 702–18.

DISCUSSION

1.1 Multiple Linear Regression Analysis

Multiple linear regression analysis was conducted to know the effect of two or more independent variables (X) on the dependent variable (Y). The following are the results of multiple linear regression analysis using SPSS software:

Table 1 Multiple Linear Regression Analysis Results

Variable	Unstandardized Coefficient B	T-test	Sig
(Constant)	4.763	2.365	.021
Plafond (X1)	.201	2.017	.047
Application process (X2)	.199	1.438	.155
Tenor (X3)	.302	2.142	.035
Frequency of borrowing (X4)	.044	.678	.500

Source: Primary Data Processing Results, 2022

The results of multiple linear regression analysis can be expressed in the following equation:

$$Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e$$

The constant value (α) is 4.763, and the value for the plafond variable (X1) is 0.999, the value for the application process variable (X2) is 0.199, the value for the tenor variable (X3) is 0.302, and the value for the frequency of borrowing variable (X4) is 0.44. So that the resulting regression equation is as follows:

MSMEs Growth = 4.763 + 0.201 Plafond + 0.199 Application Process + 0.302 Tenor + 0.44 Frequency of Borrowing + e:

a. A constant of 4.763 means that MSME growth will be worth 4.763 if the plafond regression coefficient, application process, tensortenor, and frequency of borrowing are 0;

b. The plafond regression coefficient is 0.201, which indicates a positive direction toward the growth of MSMEs. This value indicates that if the other independent variables have a fixed value, while the plafond variable (X1) has increased by 1 unit, the growth of MSMEs (Y) has increased by 0.201 units. A positive coefficient indicates a positive relationship between the plafond and the growth of MSMEs;

c. The regression coefficient for the submission process is 0.199, which indicates a positive direction toward the growth of MSMEs. This value shows that if the other independent variables have a fixed value, while the submission process variable (X2) has increased by 1 unit, the MSMEs (Y) growth has increased by 0.199 units. A positive coefficient indicates a positive relationship between the submission process and the growth of MSMEs;

d. The tenor regression coefficient is 0.302, which indicates a positive direction toward the growth of MSMEs. This value shows that if the other independent variables have a fixed value, while the tenor variable (X3) has increased by 1 unit, the growth of MSMEs (Y) has increased by 0.302 units. The positive coefficient indicates a positive relationship between the tenor and the growth of MSMEs.

The frequency of borrowing regression coefficient is 0.044, which indicates a positive direction toward the growth of MSMEs. This value indicates that if the other independent variables have a fixed value, while the frequency of lending (X4) has increased by 1 unit, the growth of MSMEs (Y) has increased by 0.044 units. The positive coefficient indicates a positive relationship between borrowing frequency and MSMEs' growth.[174]

[174] M Zidny Nafi Hasbi and Ipuk Widayanti, "Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions," 2021, 282–90.

1.2 Hypothesis Test

1.2.1 Parsial Test (t-Test)

Table 2 t-Test Result

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(constant)	4.763	2.014		2.365
	plafond	.201	.099	.234	2.017
	application process	.199	.139	.195	1.438
	tenor	.302	.141	.294	2.142
	frequency of borrowing	.044	.065	.065	.678

Source: Primary Data Processing Results, 2022

Based on the table above, the effect of each independent variable on the dependent variable can be described as follows:

a. The results of the t-test of the effect of the variable amount of financing (plafond) on the growth of MSMEs resulted in a t-count of 2.365, which was more significant than t-table 1.9921. The significance value of the variable financing (plafond) is 0.047, which is smaller than 0.05. This value explains that the hypothesis (H1) is accepted so that the variable amount of financing (plafond) affects the growth of MSMEs;

b. The results of the t-test of the effect of the submission process variable on the growth of MSMEs resulted in a t-count of 1.438, which was smaller than t-table 1.9921. The significance value of the submission process variable is 0.155, more significant than 0.05. This value explains that the hypothesis

(H2) is rejected so that the submission process variable does not affect the growth of MSMEs;

c. The results of the t-test of the effect of the variable repayment period (tenor) on the growth of MSMEs resulted in a t-count of 2.142, which was greater than the t-table 1.9921. The significance value of the financing term variable (tenor) is 0.035, which is smaller than 0.05. This value explains that the hypothesis (H3) is accepted so that the variable of the repayment period (tenor) affects the growth of MSMEs;

d. The results of the t-test of the effect of the variable frequency of borrowing on the growth of MSMEs resulted in a t-count of 0.678, which was smaller than t-table 1.9921. The significance value of the frequency of borrowing variable is 0.500, which is greater than 0.05. This value explains that the hypothesis (H3) is rejected so that the frequency of borrowing variable does not affect the growth of MSMEs.

1.2.2 Simultaneous Test (F Test)

Table 3 F Test Result

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	223.113	4	55.778	13.832	.000b
Residual	302.437	75	4.032		
Total	525.550	79			

Source: Primary Data Processing Results, 2022

Based on the table above, the calculated F value is 13.832, with a significance value of 0.000. This value indicates that the calculated F value is more significant than F table 2.49, and the significance value is less than 0.05. Research on the variable amount of financing (plafond), the submission process, repayment period, and borrowing frequency simultaneously affect MSMEs' growth.

1.2.3 Coefficient of Determination Test (R2)

Table 4 Coefficient of Determination Test Results

Model Summary				
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. The error in the Estimate**
1	.652a	.425	.394	2.008

Source: Primary Data Processing Results, 2022

Based on the table above, it is known that the adjusted R-square value is 0.394 (39.4%). This result means that the ability of the variable amount of financing (plafond), the submission process, the repayment period (tenor), and the frequency of borrowing in this study affect the MSME growth variable by 39.4%. In comparison, the remaining 60.6% (100%- 39.4%) were explained by variables other than the independent variables in the study.

1.3 The Effect of The Amount of Financing (Plafond) On MSMEs Growth on Customers of Bank Syariah Indonesia Branch Office Sleman Prambanan

Based on the results of the t-test, the significance value of the amount of financing (plafond) is smaller than the significance level of a = 5% (0.047 <0.05), and the t-arithmetic resulting from the t-test is 2.365 greater than the t-table 1.9921. This value indicates that the variable amount of financing (plafond) positively affects the growth of MSMEs. So, the first hypothesis, which states that the amount of financing (plafond) positively affects the growth of MSMEs, is accepted. The greater amount of financing (plafond) provided will further increase the growth of MSMEs.

The amount of financing (plafond) is used by MSMEs customers as business capital. Data from the questionnaire stated that as many as 35 respondents strongly agreed, and 44 respondents

agreed if the sharia microfinance provided by BSI branch office Sleman Prambanan was able to increase MSME capital. The amount of financing (planned) in this study plays a role in increasing the customer's business as additional capital for purchasing business raw materials, business expansion, and operational capital (payment of employee salaries, payment of electricity).

This study's results align with previous research by Kamal and Riza[175], which stated that there are several characteristics of loans that affect the customer's business, one of which is the amount of financing (plafond). The greater amount of financing (plafond) affects the smoothness of installment payments due to additional capital from the amount of financing so that MSME income also increases.

The amount of financing (plafond) provided by Bank Syariah Indonesia influences the growth of MSMEs because MSME actors require additional funds to be used as business capital, purchase of raw materials, business expansion, operational capital, and investment capital. Capital needs to be met through Islamic bank financing are also helpful for increasing profits or profits and developing businesses[176].

1.4 The Influence of The Submission Process on The Growth of Msmes of Customers of Bank Syariah Indonesia Branch Office Sleman Prambanan

Based on the results of the t-test in Table 4.19, the significance value of the submission process is 0.155, which is greater than the significance level of 5% (0.155>0.05), and the t-count value resulting from the t-test is 1.438 which is smaller than the t-table 1.9921. This

[175] Zikrul Kamal, "Zikrul Kamal, Akmal Riza | Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah" 2, no. November (2021): 66–80.

[176] Ratih Purbowisanti, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Umkm Sektor Pengolahan Pangan Untuk Mengambil Kredit Dan Tidak Mengambil Kredit Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Optimum* 9, no. 1 (2019): 1–12.

value indicates that the submission process does not affect the growth of MSMEs. So, the second hypothesis, namely, that the submission process positively affects the growth of MSMEs, is rejected [177].

According to the results of Nadia's 2014 research, the analysis using the OLS method proves that the variables of business assets, financing frequency, installment period, and business dummy have a significant effect on financing realization. Meanwhile, the factors affecting customer business turnover are business assets, amount of financing, operating profit after financing, length of education, business, and business dummy.

It can be seen from the data from the distribution of questionnaires, customers reveal that financing at Islamic banks has easy requirements, fast submission procedures, staff and employees provide friendly, fast, and innovative services, contracts are explained easily, and the disbursement process is relatively fast. However, in this study, it can be seen why the submission process does not affect the growth of MSMEs. A total of 6 customers (7.50%) of the 80 customers who were respondents in this study answered disagreeing with the questionnaire, which stated that microfinance at Bank Syariah Indonesia branch office Sleman Prambanan had a relatively fast disbursement process. The customer who expressed his disapproval admitted was a delay in the disbursement process due to the COVID-19 pandemic.

1.5 The Influence of The Repayment Period (Tenor) On the Growth of MSMEs for Customers of Bank Syariah Indonesia Branch Office Sleman Prambanan

[177] M Zidny Nafi' Hasbi, "Usaha Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Dalam Mengembangkan Perekonomian Pesantren Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* (LP2M Universitas Ibrahimy, 2021), https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.857.

Based on the results of the t-test in table 4.19, the significance value of the repayment period (tenor) is 0.035, which is smaller than the significance level of 5% (0.035 <0.05), and the t-count value resulting from the t-test is 2.142 which is more significant than t-table 1. ,9921. This value indicates that the repayment period (tenor) affects the growth of MSMEs. So, the third hypothesis, namely, that the repayment period (tenor) positively affects the growth of MSMEs, is accepted.

The effect of the repayment period (tenor) on growth can be proven by the data from distributed questionnaires to Indonesian Islamic Bank customers who are respondents to this study. The repayment period (tenor) available for microfinance are 12 months, 24 months, 36 months, 48 months, and 60 months. Most customers, or as many as 35 customers who became respondents in this study, chose a repayment period (tenor) of 36 months. Because the number of installments a customer must pay is based on the tenor of the repayment period, the less the total number of installments that the customer must pay is when the tenor of the repayment period is longer. So, customers prefer a repayment period that is neither too long nor too short.

According to the results of Riawan's 2018 research, this study shows that own capital and KUR have a significant effect on business income in the MSME sector. The result can be seen from the T-statistic test value below 0.5. Therefore, the amount of a company's business capital substantially impacts the income a company generates. However, credit capital's advantages aid in developing business capital among commercial actors.

The results of this study state that the repayment period (tenor) can be extended according to customer needs; as many as 20 customers who were respondents in this study stated, they strongly agreed, and 45 customers agreed if the repayment period (tenor)

could be extended according to customer needs. The process of applying for the waiver of the tenor is also relatively easy, according to 22 customers who strongly agreed and 47 who agreed when filling out the research questionnaire.

1.6 The Influence of The Frequency of Borrowing on The Growth of MSMEs of Customers of Bank Syariah Indonesia Branch Office Sleman Prambanan

Based on the results of the t-test in table 4.19, the significance value of the frequency of borrowing is 0.500, which is greater than the significance level of a = 5% (0.500>0.05), and the t-count resulting from the t-test is 0.678 smaller than the t-table 1.9921. This value indicates that the frequency of borrowing does not affect the growth of MSMEs. Therefore, the fourth hypothesis, which claims that the frequency of borrowing influences the growth of MSMEs favorably, is rejected.

According to the results of Sherly 2022's research, the results showed that the frequency of financing, the amount of financing, and the workforce had a positive and significant effect on microbusiness members of BMT Muamalat Jumapolo, while the length of business and education did not affect microbusiness income. The study results show that the variables that have a significant effect are financing, business experience, and age. Variables that have no effect are the length of education and capital.

The frequency of borrowing is the number of customers receiving financing from Islamic Banks. The more often customers get financing, the amount of financing provided by Islamic banks will increase. This result is because the Islamic bank already knows the information and characteristics of the customer. The frequency of borrowing does not positively affect the growth of MSMEs in this study because most customers are getting financing for the first time from Bank Syariah Indonesia, branch office Sleman

Prambanan. It can be seen from the data from the questionnaire distribution that 34 customers (42.50%) out of a total of 80 customers who were respondents in this study stated that it was their first time getting microfinance from Bank Syariah Indonesia branch office Sleman Prambanan. The highest frequency of borrowing ever obtained by customers was four times, and only one customer (1.25%) of the total 80 customers became a respondent in this study. This highest borrowing frequency causes the variable financing frequency in this study to have no effect because Islamic banks will find it easier to provide financing to trusted customers than new customers.

CONCLUSION

Based on the data analysis and hypothesis testing results, the amount of financing (plafond) and the repayment period (tenor) significantly affect the growth of MSMEs. At the same time, the application process and the frequency of borrowing have no significant effect on the growth of MSMEs. It is recommended for further researchers to use broader respondent criteria, such as selecting respondents who have received sharia microfinance at least twice to see the impact more significantly. It is also recommended to add other variables that influence Islamic microfinance on the growth of MSMEs, such as collateral margin value, or profit sharing.

DISCLOSURE

Conflict of Interest

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Funding Statement

This research received no external funding

Acknowledgments

The author expresses his sincere gratitude and appreciation to all parties who have assisted in extracting the data, especially customers and the board of directors of Bank Syariah Indonesia, branch office Sleman Prambanan.

BIBLIOGRAPHY

Afriyeni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Talang Cabang Solok." *Buletin Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 2 (2013): 207–22.

Alfrian, Gregorius Rio, and Endang Pitaloka. "Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemik Covid 19 Di Indonesia." *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)* 6, no. 2 (2020): 139–46.

Camelia, Dina, and Ahmad Ajib Ridwan. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 195–204.

Chaidir Iswanaji, Aziz muslim, M. Zidny Nafi' Hasbi. "IJARAH COLLABORATIVE SERVICE MODEL IN SHARIA BANKING." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 2 (2022): 702–18.

DISKOPUKM. "Tabel Rekap UMKM Per Kapanewon," no. 1 (2021): 1.

Febriandani, Cupian Deny. "Analisis Efektivitas Pembiayaan

Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Bprs Pnm Mentari)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan* 2, no. 1 (2019): 95–113.

Hasbi, M Zidny Nafi, and Ipuk Widayanti. "Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions," 2021, 282–90.

Jumali. "BSI Dukung Usaha Rakyat Melalui UMKM Center Di DIY." Harianjogja.com, 2022.

Kamal, Zikrul. "Zikrul Kamal, Akmal Riza | Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah" 2, no. November (2021): 66–80.

Kominfo. "78 UMKM Ikuti Pujafest Di Kompleks Candi Prambanan." klatenkab.go.id, 2021.

Mahliza, Febriana, and Netti Tinaprilla. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Murabahah Untuk Usaha Mikro Agribisnis Sektor Perdagangan (Studi Kasus: Kbmt Bil Barkah, Bogor)." *Forum Agribisnis : Agribusiness Forum* 2, no. 2 (2012): 121–40.

Musfiroh, Mila Fursiana Salma, Laila Sabrina, and Sarno Wuragil. "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Banjarnegara." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 136–58. https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.928.

Nafi' Hasbi, M Zidny. "Usaha Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Dalam Mengembangkan Perekonomian Pesantren Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*. LP2M Universitas Ibrahimy, 2021. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.857.

Purbowisanti, Ratih. "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Umkm Sektor Pengolahan Pangan Untuk Mengambil Kredit Dan Tidak Mengambil Kredit Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Optimum* 9, no. 1 (2019): 1–12.

S, Basir, and Maretha Ika Prajawati. "Membangun Hubungan

Berkelanjutan Sektor UMKM Dan Perbankan." *Iqtishoduna* 16, no. 2 (2020): 147–66. https://doi.org/10.18860/iq.v16i2.7876.

Safitri, Sri, Ahmad Fuadi, Kecamatan Hinai, Pembiayaan Tanpa Agunan, and Akad Murabahah. "AKAD MURABAHAH PADA MASA PENDEMI COVID-19 DI BTPN." *Jurnal Kitab Iqtishad* 1, no. 1 (2022).

Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 138. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952.

Siti Zubaidah Lubis. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Tamala, Dewi, and Lucky Nugroho. "Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah." *Sikap* 3, no. 1 (2018).

Tunas, Aldesta Perwitasari, Lukytawati Anggraeni, and Deni Lubis. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Depok." *Al-Muzara'ah* 2, no. 1 (2014): 1–16. https://doi.org/10.29244/jam.2.1.1-16.

Utami, Sherly Nur. "ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PEMBIAYAAN , PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Pada Anggota Bmt Muamalat Jumapolo Kabupaten Karanganyar)." *Jurnal Ilmiah*, 2020.

Afriyeni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Talang Cabang Solok." *Buletin Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 2 (2013): 207–22.

Alfrian, Gregorius Rio, and Endang Pitaloka. "Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemik Covid 19 Di Indonesia." *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)* 6, no. 2 (2020): 139–46.

Camelia, Dina, and Ahmad Ajib Ridwan. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 195–204.

Chaidir Iswanaji, Aziz muslim, M. Zidny Nafi' Hasbi. "IJARAH COLLABORATIVE SERVICE MODEL IN SHARIA BANKING." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 2 (2022): 702–18.

DISKOPUKM. "Tabel Rekap UMKM Per Kapanewon," no. 1 (2021): 1.

Febriandani, Cupian Deny. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Bprs Pnm Mentari)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan* 2, no. 1 (2019): 95–113.

Hasbi, M Zidny Nafi, and Ipuk Widayanti. "Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions," 2021, 282–90.

Jumali. "BSI Dukung Usaha Rakyat Melalui UMKM Center Di DIY." Harianjogja.com, 2022.

Kamal, Zikrul. "Zikrul Kamal, Akmal Riza | Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah" 2, no. November (2021): 66–80.

Kominfo. "78 UMKM Ikuti Pujafest Di Kompleks Candi Prambanan." klatenkab.go.id, 2021.

Mahliza, Febriana, and Netti Tinaprilla. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Murabahah Untuk Usaha Mikro Agribisnis Sektor Perdagangan (Studi Kasus: Kbmt Bil Barkah, Bogor)." *Forum Agribisnis : Agribusiness Forum* 2, no. 2 (2012): 121–40.

Musfiroh, Mila Fursiana Salma, Laila Sabrina, and Sarno Wuragil. "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Banjarnegara." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 136–58. https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.928.

Nafi' Hasbi, M Zidny. "Usaha Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Dalam Mengembangkan Perekonomian Pesantren Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*. LP2M Universitas Ibrahimy, 2021. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.857.

Purbowisanti, Ratih. "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Umkm Sektor Pengolahan Pangan Untuk Mengambil Kredit Dan Tidak Mengambil Kredit Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Optimum* 9, no. 1 (2019): 1–12.

S, Basir, and Maretha Ika Prajawati. "Membangun Hubungan Berkelanjutan Sektor UMKM Dan Perbankan." *Iqtishoduna* 16, no. 2 (2020): 147–66. https://doi.org/10.18860/iq.v16i2.7876.

Safitri, Sri, Ahmad Fuadi, Kecamatan Hinai, Pembiayaan Tanpa Agunan, and Akad Murabahah. "AKAD MURABAHAH PADA MASA PENDEMI COVID-19 DI BTPN." *Jurnal Kitab Iqtishad* 1, no. 1 (2022).

Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 138. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952.

Siti Zubaidah Lubis. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Tamala, Dewi, and Lucky Nugroho. "Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah." *Sikap* 3, no. 1 (2018).

Tunas, Aldesta Perwitasari, Lukytawati Anggraeni, and Deni Lubis. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Depok." *Al-Muzara'ah* 2, no. 1 (2014): 1–16. https://doi.org/10.29244/jam.2.1.1-16.

Utami, Sherly Nur. "ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PEMBIAYAAN , PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA

TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Pada Anggota Bmt Muamalat Jumapolo Kabupaten Karanganyar)." *Jurnal Ilmiah*, 2020.

© 2022 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Journal of Sharia and Economic Law
Vol. 2, No. 2, December 2022 (pp. 235-286)

LEGAL FRAMEWORK TO SUPPORT ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN THE UNITED ARAB EMIRATES

***Mahmoud Ismaeil Mohamed Mashal*[1]**
[1]Imam Malik College, United Arab Emirates
Email: m.mashal@imc.gov.ae[1]

DOI: 10.21154/invest.v2i2.5341

Received: 2022-11-30	*Revised: 2022-12-28*	*Approved: 2022-12-29*

Abstract: The duality of the banking system in the United Arab Emirates and its impact on economic development today represents the reality of banking systems in countries that license Islamic banking, especially with the state's first taking into account the traditional banking system. In contrast, banks, institutions, ministries, and organizations that manage work in this field practice these systems have been enabled in Muslim countries under the pressure of economic globalization. At the same time, the country is striving to develop the field of Islamic economy, support Islamic banking while enabling modern technologies and intelligent applications in the digital age, and encourage innovation in Islamic banking and finance. This trend calls for further research and deep consideration to clarify the role of the United Arab Emirates in supporting the Islamic economy and its banking and Islamic finance, as the idea of the duality of the banking system may seem contradictory in its application. As a result of this research, the Government of Dubai has started a strategic plan to develop the Islamic economy sector. The goal is to make Dubai the leading center for Islamic finance, e-commerce, the digital content industry, design and innovation, knowledge, education, and research, as well as the global reference for Islamic economy standards. The UAE government has adopted blockchain technology to implement government transactions and to achieve the desired results; the country launched the UAE Blockchain Strategy 2021m. The characteristics of the Islamic banking system reflect the reality of Sharia rulings without living and manipulation. However, the current situation has many observations, so coexistence has become at the expense of differentiation.

Keywords: *Banking System; Country; Islamic Banking; Legal Framework; United Arab Emirates*

ملخص البحث: إنّ ازدواجية النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأثرها على التنمية الاقتصادية، تمثل اليوم واقع الأنظمة المصرفية في الدول التي ترخص للعمل المصرفي الإسلامي؛ خصوصاً مع أخذ الدولة بادئ ذي بدء بالنظام المصرفي التقليدي، فيما تمارسه البنوك والمؤسسات والوزارات والمنظمات التي تدير العمل في هذا المجال، على أنّ هذه النظم تمكنت في بلاد المسلمين تحت ضغط العولمة الاقتصادية. وفي الوقت ذاته تسعى الدولة جاهدة نحو تنمية مجال الاقتصاد الإسلامي، ودعم المصرفية الإسلامية، مع التمكين للتقنيات الحديثة، والتطبيقات الذكية، في ظل العصر الرقمي، وتشجيع الابتكار في العمل المصرفي والتمويل الإسلامي. فهذا الاتجاه يستدعي مزيداً من البحث والنظر العميق، لبيان دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد الإسلامي، وما ينضوي تحته من المصرفية والتمويل الإسلامي؛ ذلك أنّ فكرة ازدواجية النظام المصرفي قد يبدو في تطبيقها نوع من التناقض. هذا البحث بمنهج دراسة معيارية تحليلية مع مقاربة التشريع الإسلامي المنهجي, ونتيجة هذا البحث أنّ الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ترسّخ لجعلها المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي، وللتجارة الإلكترونية، ولصناعة المحتوى الرقمي، وللتصميم والإبداعات، والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي, وقد تبنت حكومة دولة الإمارات تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في تنفيذ المعاملات الحكومية، ولتحقيق النتائج المرجوة، أطلقت الدولة استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 م. مواصفات النظام المصرفي الإسلامي تمثّل حقيقة الأحكام الشرعية دون حيَلٍ وتلاعب، لكن فيما يبدو أن الوضع الحالي عليه ملاحظات عديدة، بحيث أصبح التعايش على حساب التمايز.

الكلمات المفتاحية: النظام المصرفي؛ دولة؛ الخدمات المصرفية الإسلامية؛ الإطار القانوني؛ المصرفية؛ الإمارات العربية المتحدة

مقدمة

تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي رائدة الصناعة المالية الإسلامية؛ ذلك أنها كانت مكان نشأة الكثير من التطبيقات المؤسسية للتمويل الإسلامي؛ بيْد أنّ إمارة (دبي) في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت طموحات كبيرة من خلال خطة استراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي؛ لتصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وفي كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدّة، والكويت، وقطر، والبحرين، تعتبر البنوك الإسلامية ذات أهمية نظامية، وتسهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد، كما أنّ إصدارات الصكوك- رغم كونها غير مطردة- تسهم بدورها في توفير التمويل لقطاع الشركات والحكومات (صكوك سيادية)؛ ولهذا يعتبر البحث في التداخل الحاصل بين القطاع المالي الإسلامي، والاقتصاد الحقيقي، والتعرّف على مدى مساهمة التمويل الإسلامي في تحقيق نمو اقتصادي أمراً في غاية الأهمية؛ يساعد صنّاع السياسات ومتخذي القرار في التعرّف على المدى الذي يمكن للتمويل الإسلامي المساهمة به لدفع عجلة التنمية من خلال تحفيز النمو، والتعرف على آثاره التي قد تكون متشعبة، ومن ثم تحديد العلاقات القصيرة والطويلة الأجل بينه وبين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وما إذا كان نمو التمويل الإسلامي هو الذي يدفع النمو الاقتصادي، أم العكس. ومما يميّز تجربة التمويل الإسلامي بدول الخليج هو وجود دعم رسمي غير محدود، إذْ تتبنى كل دولة مبادرات حكومية لتشجيع التمويل الإسلامي، من ذلك مبادرة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والبحرين التي تمثّل حاضنة لكثير من مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية، ومع الطفرة المعمارية في الإمارات العربية المتحدة، تمّ إنشاء شركة أملاك (مقرها دبي)، وهي أكبر شركة للتمويل العقاري، بل أكبر شركة تمويل مدرجة في (سوق دبي المالي) .

أولا, **أهمية البحث**؛ يتناولُ البحثُ أبعادَ فكرة ازدواجيةِ النّظام المصرفيّ وأثرها على التنمية الاقتصادية، إذ هي تشغل حيزاً من التفكير يستدعي البحث والنظر العميق؛ لأنه يمثل واقع الأنظمة المصرفية في الدول التي ترخّص للعمل المصرفيّ الإسلاميّ.

ثانيا, **أهداف البحث**: هدفت الدراسة الوصول إلى النتائج التالية, وهي تسليط الضوء على الدور الداعم من قِبل دولة الإمارات للاقتصاد الإسلامي والصناعة المصرفية في دبي. وابداء ملامح تجربة الازدواجية في العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث تعمل تحت رقابة وإشراف البنوك المركزية، في ظل القوانين السارية. وعرض نماذج من إشكاليات وجدليات فقهية أفرزتها التطبيقات العملية في التمويل والمصرفية الإسلامية، وحلول مقترحة، طبقاً لمواصفات النظام المصرفي الإسلامي. والكشف عن دور الرقمنة والتطبيقات الذكية في مجال التمويل الإسلامي، مع عرض بعض التطبيقات في هذا المجال.

ثالثا, **مشكلة البحث**: يطرح البحث عدة تساؤلات, ما هي الآفاق التي تسعى إليها دولة الإمارات في تنمية مجال الاقتصاد الإسلامي، بل وتمكينه عالمياً؟ وهل مواصفات النظام المصرفي الإسلامي تمثل حقيقة الأحكام الشرعية بحيث يخلو تطبيقه من ملحوظات؟, هل تجربة المصرفية الإسلامية وخصوصيتها التمويلية استطاعت أن تنافس الفائدة البنكية التقليدية؟ وما هو دور العمل الابتكاري دور الرقمنة والتطبيقات الذكية في تنمية مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي؟.

رابعا, **منهجية البحث**: دراسة هذا البحث دراسة قانونية معيارية مع مقاربة التشريع الإسلامي المنهجي, وتحليل الدستور وقرارات الدولة ونظام البنوك حسب موضوع البحث من الناحية التشريعية والقانونية والأخلاقية.

خامسا, **خطة البحث** : يتناول هذا الموضوع في أربعة مباحث وخاتمة, المبحث الأول: دور دولة الإمارات في دعم الاقتصاد والمصرفية الإسلامية, المبحث الثاني: ازدواجية العمل المصرفي والإطار القانوني للمصرفية الإسلامية, المبحث الثالث: من إشكالات التطبيق العملي للتمويل والمصرفية الإسلامية, المبحث الرابع: آفاق التمويل الإسلامي المصرفي في ضوء الرقمنة والابتكار, والخاتمة: في ثمرات ونتائج البحث وتوصياته.

المبحث الأول

دور دولة الإمارات في دعم الاقتصاد والمصرفية الإسلامية

المصارفُ الإسلامية تمثّلُ أهمّ وأكبر إنجازاتِ الاقتصَاد الإسلاميّ؛ وتبدو أهمية المصارف في هذا العصر، من حيث كونها تقوم بدور الوسيط المالي بين المدّخِر والمستثمر، وتستطيع أن تكون ذات أهمية بالغة بالمساعدة في تكوين رأس المال والتنمية. ويقع هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاقتصاد والمصرفية الإسلامية

يُعرّف الاقتصاد الإسلامي بتعريفات كثيرة، لعل من أفضلها القول بأنه:" علمٌ يختص بدراسةِ السلوك الإنسانيّ في علاقته بالموارد، وكيفية استخدامها لإشباع الحاجات، وذلك في ضوء العقيدة والشريعة والأخلاق الإسلامية" .[178] ويتميز هذا التعريف بتركيزه على ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: المبادئ العامة التي جاءت في القرآن والسنة في المجال الاقتصادي. الجانب الثاني: جانب التطبيقات لهذه المبادئ والأصول، وكذلك الحلول التي يتوصل إليها المجتهدون للمشاكل الاقتصادية في ضوء العقيدة والشريعة والأخلاق الإسلامية. الجانب الثالث: إشباع الحاجات الإنسانية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتجنب الأزمات والاختلالات في الاقتصاد.

بيْد أنّ حصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية يُعدّ مفهوما خاطئا، والصواب هو: الاعتراف بأنّ حركة البنوك الإسلامية تمثّل أهم وأكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي، ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسة:

---

178 ()حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد: د. حسن عبد الله الأمين، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (527/2).

- أولا: أنّ البنوك في حدّ ذاتها عصب النشاط الاقتصادي عالميا والمتحكم في مساراته وتوجهاته.
- ثانيا: أن البنوك الإسلامية تكاد تكون النموذج الوحيد من بين نماذج الاقتصاد الإسلامي الذي وجد طريقه للتطبيق والذي تمتع بدرجة من الاعتراف مكنته من الوجود والاستمرار.
- ثالثا: استطاعت البنوك الإسلامية بفضل الله أن تكون نموذجاً مفيداً للاقتصاد المحلي، ومؤشراً للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبيق مكونات الاقتصاد الإسلامي .[179]

وفي أعقاب المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، والذي عُقد في مكة المكرّمة عام (1976م)، وشارك فيه أكثر من أربعمائة عالم من مختلف دول العالم، بعد هذا المؤتمر أصبح الاقتصاد الإسلامي علماً يدرّس في الكثير من مختلف دول العالم، وظهرت عشرات الكتب في الاقتصاد الإسلامي .[180]

تعريف البنك والمصرف

البنك: هو المؤسسة التي يودع فيها الناس أموالهم للحفظ أو للاستثمار، وبمعنى آخر: البنك هو مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض، والإقراض، وغير ذلك، والبنكنوت: أوراق مصرفية رسمية مطبوعة يتعامل بها الناس بدلاً من النقد[181] . وكلمة "بنك" مأخوذة من

---

179 ()تطور العمل المصرفي الإسلامي (مشاكل وآفاق): للشيخ صالح كامل، (ص4)، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، محاضرة الشيخ صالح كامل في حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك الإسلامي للتنمية، أكتوبر(1979م).

180()العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي: د. كمال توفيق الحطاب، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، (ص230-231)، العدد (24)، السنة (16)، (2001م)

181 ()معجم لغة الفقهاء: د. محمد رواس قلعة جي، (ص91)، دار النفائس، الأردن، (1988م).

الكلمة الإيطالية بانكو " "BANKO ومعناها المائدة. ويرجع ذلك إلى أن المشتغلين بأعمال الصرافة بإيطاليا، كانوا يضعون الأنواع المختلفة من العملات، التي يتعاملون فيها على موائد ذات واجهة زجاجية .[182]

وبعض البلاد العربية والإسلامية، شاعت فيها كلمة (بنك) وبعضها شاعت فيها كلمة مصرف (بكسر الراء)، وكلاهما بمعنىً واحد، حيث يراد بهما: المكان الذي تُتداول فيه الأموال تارة عن طريق الأخذ، وتارة عن طريق الإيداع، وتارة عن غير ذلك من طرق التعامل. إلا أن الأفضل استعمال كلمة (مصرف) لوجود الأصل اللغوي العربي لها.

وكلمة (مصرف) في اللغة العربية، اسم لمكان الصرف، أي: التصرف في النقود أخذاً وعطاء واستبدالاً، وإيداعا. جاء فى المعجم الوسيط:" الصراف: من يبدل نقداً بنقد، أو هو الأمين على الخزانة يقبض ويصرف ما يستحق. والصرافة: مهنة الصراف. والمصرف مكان الصرف، وبه سمى البنك مصرفاً " .[183]

ويُعرّف المصرف الإسلامي اصطلاحاً بأنه: "مؤسسة مالية نقدية، تقوم بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية، وجذب الموارد النقدية، وتوظيفها توظيفاً فعّالاً، يكفل نموها، وتحقيق أقصى عائد منها، وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية السمحة".[184]

أو بعبارة أخرى وجيزة تلخّص مضمون المصرف الإسلامي بأنه: "مؤسسة مالية تجمع الأموال بغرض استثمارها، أو ردها عند الطلب، وتمنح الائتمان، وتزاول كافة الخدمات

---

182 ()الأعمال المصرفية والإسلام: أ. مصطفى الهمشري، (ص28)، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية- القاهرة، (1405هـ - 1985م).

183 ()المعجم الوسيط، (513/1)، مجمع اللغة العربية، القاهرة.

184 ()الصيرفة الإسلامية في دولة قطر: د. نايف بن نهار، (ص21)، دار عقل للنشر، دمشق، (ط2)، (2015م)

المصرفية" [185]. ويأتي ضمن موسوعة المعاملات الإسلامية، التي قام بإعدادها الدكتور عز الدين خوجة، (الأمين العام للمجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات الإسلامية)، والتي تقع في ستة مجلدات، وقام الشيخ صالح كامل بالتقديم لها، يأتي ضمن هذه الموسوعة إصدارٌ يتناول الخدمات المصرفية الإسلامية وهي: الحوالات المصرفية، والاعتمادات المستندية، والكفالات وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان.[186]

أمّا المقاصد التشريعية العامة للمعاملات المالية فقد حصرها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في خمسة مقاصد أساسية عبّر عنها بقوله: "والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة: رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها" .[187]

على أنّ المصارف الإسلامية ليست بنوكاً بالمعنى الدقيق والضيق- إن لم يكن الواسع – للبنوك التجارية القائمة حالياً في الأقطار الإسلامية وغيرها من دول العالم؛ فالمصارف الإسلامية في حقيقتها – شركات متعددة الأغراض تشبه إلى حدٍ بعيدٍ ما يسمى بالشركات القابضة، وإن كانت تختلف عنها في أنها (أي المصارف الإسلامية) تقوم بنفسها بممارسة نشاطها، فضلاً عن مساهمتها في تأسيس شركات أو مصارف أخرى- بحسب أنظمتها المالية – تقوم بممارسة أنشطة واسعة جداً وفى مجالات متنوعة ومختلفة، تجارية، وصناعية، ومالية وعقارية، وزراعية وخدمية .... الخ.[188]

---

185 ()أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: د. علي محمد أبو العز، (ص19)، دار النفائس، الأردن، إصدارات البركة المصرفية، (2019م).

186 ()الخدمات المصرفية الإسلامية: د. عز الدين خوجة، (ص19 وما بعدها)، إصدار (5)، الدار المالكية، تونس، (2017م).

187 ()مقاصد الشريعة الإسلامية: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، (ص464)، دار النفائس، الأردن، (2001م).

188 ()علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية: د. طعمة الشمري، مجلة الشريعة، جامعة الكويت، (ص109)، (ع28/ س11)، (1996م).

وتُعدّ المرحلة من (سنة 1990 إلى سنة 2000) مرحلة انتشار للبنوك الإسلامية؛ حيث شهد هذا العقد نمواً سريعاً للبنوك الإسلامية، وظهور عدد كبير من الأوعية الاستثمارية المشتركة التي تدار بالطرق المشروعة، وبشكل خاص صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مجال التأجير والعقارات والأسهم والسلع وغيرها ... وتوسعت أعمال البنوك والمصارف الإسلامية لتشمل مجال تمويل الشركات، بحيث لم تعد تقتصر على أعمال صيرفة التجزئة الخاصة بالأفراد. كما ظهر جيل ثانٍ من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة التي تولي اهتماماً متزايداً بمجالات الاستثمار، وقد تضاعفت عدد المؤسسات المالية الإسلامية من (90) مؤسسة في نهاية الثمانينيات إلى (180) مؤسسة في نهاية التسعينيات.[189]

189 ()النظام المصرفي الإسلامي: د. عز الدين خوجة، (ص35)، اصدار: الامتثال للمالية الإسلامية، والدار المالكية، تونس، (2017م).

المطلب الثاني: دعم استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً

الاستراتيجية تعني أصول القيادة، ومن ذلك الاستراتيجية العسكرية أو السياسية التي تضمن للإنسان تحقيق الأهداف من خلال استخدامه وسائل معينة، فهي علم الترتيب وفن التخطيط، ثم استعملت هذه الكلمة في المجالات المتعددة في شتى مناحي الحياة العامة [190].

لقد كانت إمارة دبي أول من أدخل صناعة الصيرفة الإسلامية، وذلك عندما دشّنت في سنة (1975م) حكومة دبي أول بنك إسلامي في المنطقة وهو (بنك دبي الإسلامي)، ومنذ ذلك الحين مازالت صناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي تنمو وتحرز إنجازات عظيمة، فضلاً عن العالمية للانخراط بشكل أو بآخر عن أنها أصبحت في حدّ ذاتها منظومة مالية.

وفي أكتوبر(2013م)، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة استراتيجية لتطوير القطاع المالي الإسلامي، وشملت الخطة سبع ركائز أساسية، و46 مبادرة استراتيجية، وكان من ضمنها إنشاء مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي. وبلغت قيمة أصول المصارف الإسلامية في الإمارات سنة (2017م)، 144 مليار دولار في شهر يوليو الماضي. وتستحوذ 7 مصارف منها على أكثر من خُمُس تلك القيمة، وذلك وفقاً لدراسة اقتصادية صدرت على هامش معرض "حلال إكسبو – دبي 2017م ". كما أن ارتفاع قيمة الأصول ومُعدلات نمو ائتمان المصارف الإسلامية من تمويل الصناعات الحلال عامل أساسي لتعزيز النشاطات الاقتصادية الإسلامية .[191]

وجاءت الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وضمت سبع توجهات رئيسة على النحو التالي:

---

[190] ()موسوعة ويكبيديا– الموسوعة الحرة. الرابط: https://ar.wikipedia.org/

[191] ()موقع البوابة الرسمية لحكومة دبي، الرابط:https://u.ae/ar-ae/information

التوجه الأول: المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته. التوجه الثاني: المركز الرئيس لصناعة الأغذية والمنتجات الحلال، والاسم الموثوق في اعتمادها. التوجه الثالث: الوجهة المفضلة للسياحة العائلية. التوجه الرابع: المنصة الرئيسة للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعة المحتوى الرقمي الإسلامي. التوجه الخامس: العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية. التوجه السادس: المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي. التوجه السابع: المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات .[192]

هذه المقومات السبعة تستشرف المستقبل المالي للاقتصاد الإسلامي بشكل متكامل؛ حيث تتمتع دبي بمكانة مالية مهمة- إقليمياً وعالمياً - وذلك من خلال مجموعة من القوانين، والتنظيمات المدنية، والتجارية الشاملة، والخدمات المساندة لقطاعات متعددة في الدولة، وقد انسجمت تلك الاستراتيجية مع توجهاتها السبعة لتحقق مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي .[193]

ومن الأمور المهمة التي يجب أن توضع بعين الاعتبار هو دور البيئة التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تلعب دوراً مؤثراً في دعم وتعزيز (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)؛ وذلك حتى يتم الانسجام الكامل بين البيئة المالية وغيرها من البيئات المهمة في الدولة المكملة لقطاع الاقتصاد، مع وضع استراتيجيات محددة في مجال تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي .[194]

وأعلن بنك دبي الإسلامي- المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم،

---

[192]() دعم استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي: د. عبد العزيز القصار، (ص74- 78)، بتصرف، (دائرة الشؤون الإسلامية بدبي)، (2015م).

[193] ()المرجع السابق، (ص 77-78).

[194] ()المرجع نفسه، (ص16).

أعلن اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022. وقد شهد صافي الأرباح لمجموعة البنك نمواً قوياً بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 2,700 مليون درهم إماراتي مقابل 1,864 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة. وأظهرت النتائج أن إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك سجلت زيادة كبيرة بقيمة 33 مليار درهم خلال الفترة. وباستبعاد المدفوعات والمستحقات الدورية، فقد حقق البنك نمواً بقيمة 20 مليار درهم، بينما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6% حتى تاريخه من العام ليصل إلى241,3 مليار درهم مقارنة مع 228,5 مليار درهم في عام 2021، مما يشير إلى انتعاش قوي في عام 2022، على الرغم من الدفعات الدورية ومستحقات الصكوك بقيمة 13 مليار درهم، فضلاً عن عمليات السداد المبكرة بقيمة 7 مليارات درهم .[195]

المطلب الثالث: اعتماد المصرف المركزي الإماراتي للمعايير الشرعية الصادرة عن (أيوفي)

مع توالي الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي عامة، والمصرفي منه خاصة، وبروز تجربة مستجدة لقيت إقبالاً واهتماماً من الجميع، قامت العديد من الدول على المستوى العربي، بل والدولي، بإصدار قوانين وتشريعات وتنظيمات خاصة بالعمل المصرفي والإسلامي، دون أن يكون لها قانون موحد؛ إذ إنّ كل دولة راعت ظروفها ومصالحها واعتباراتها عندما وضعت هذا التشريع الخاص بعمل هذه المصارف لديها .[196]

---

[195] ()موقع بنك دبي الإسلامي، الرابط: https://www.dib.ae/ar/about-us/news/2022

[196] ()الصيرفة الإسلامية مفهومها وتطورها في أسواق المال العالمية: مقال أعده منصور تريز في حوار مع د. أحمد سفر، (صاحب مؤلفات مصرفية عديدة)، مجلة الجيش اللبنانية، العدد (250) ،بتاريخ 2006/4/1م

و لما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول المهتمة بالمصرفية الإسلامية بوقت مبكر، فإنها لم تغفل عن تشريع قانون اتحادي مَعنيّ بشأن المصارف الإسلامية وتأسيسها وتنظيم العمل بها على المستوى العملي (التنفيذ) والإشرافي (الرقابي) وهو ما أشار إليه القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (6) لسنة 1985 صراحة بشأن المصارف والمؤسسات والشركات الاستثمارية الإسلامية، والذي نص على تشكيل هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية بقرار من مجلس الوزراء تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية المالية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزماً للجهات المذكورة. وقد تم صدور قانون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في سنة 2018م والذي نص على تشكيل الهيئة الشرعية العليا، كما جاء ذلك في الفقرة رقم (17) وأناط بها المهام والاختصاصات[197] . وقد بحثت الهيئة الشرعية العليا في بداية تشكيلها من خلال اجتماعاتها إمكانية إدراج اعتماد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مرجعية لعمل الهيئة باعتبار العمل المؤسسي يقوم على إكمال ما بدأ به الآخرون، مادام العمل المختار يعد عملاً متميزاً ومتخصصاً في مجاله.[198]

وتبدو هذه المرحلة فارقة في مسيرة المصارف الإسلامية؛ حينما بادرت المؤسسات المالية الإسلامية إلى تأسيس أول مؤسسة داعمة للصناعة المالية الإسلامية وهي: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي = (**AAOIFI**)؛ وهي هيئة عالمية ذات شخصية

---

[197] ()مرسوم قانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، (ص12).https://www.centralbank.ae/ar/node/7

[198] ()اعتماد المصارف المركزية معايير (أيوفي) دلالات وتشريعات: د. إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، مقال منشور على موقع مجلة الاقتصاد الإسلامي بتاريخ 10 أبريل، (2021م)، الحلقة2، الرابط: https://www.aliqtisadalislami.net/

معنوية مستقلة غير هادفة للربح، تأسست بموجب اتفاقية موقعة من عدد من المؤسسات المالية في 26 فبراير(1990م) في الجزائر بصفتها هيئة عالمية، ثم تسجيل الهيئة في مملكة البحرين، في 27 مارس (1991م). وأنشأت الهيئة المجلس الشرعي سنة (1999م)، مكوّناً من العلماء ذوي الاختصاص في فقه المعاملات، وبخاصة في المجال المصرفي الإسلامي، وقد استطاع المجلس بتوفيق الله أن يصدر أكثر من أربعة وخمسين معياراً، عالجت تفصيلات جزء كبير من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها). وتُعدّ هذا (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي = (AAOIFI)،من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمّ بنفعها الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها، ويقع (النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1439هـ / نوفمبر2017م) في مجلد يحوي (1388) صفحة .[199]

بل إنّ هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة، أشبه بقانون حاكم، تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما أنّ مجموعة من البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسمياً باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، وعليه فإنّ معايير (أيوفي) تعدّ بكل تجرد مفخرة من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاتها[200] . وجاء المعيار الشرعي رقم (1) في نطاق: المتاجرة في العملات ،ويتناول هذا المعيار قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات، وصرف ما في

---

[199] ()المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي = (AAOIFI): لمجموعة من العلماء، (ص16)، مملكة البحرين، (2017م).

[200] ()المرجع السابق (ص16).

الذمة، والتعامل في العملات في الأسواق المالية، والمواعدة في بيع العملات، واشتراط الأجل أو ارجاء تسليم أحد البدلين في التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات. ولا يتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العملات، ولا تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة، ولا الحوالات المجردة عن عمليات الصرف، ولا حسم الكمبيالات .[201]

ويستلزم قرار المصرف المركزي الإماراتي أن تباشر المؤسسات المالية الإسلامية مراجعة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات للتحقق من التزامها بمعايير (أيوفي). وقد تمخضت اجتماعات الهيئة الشرعية العليا – برئاسة دكتور/ أحمد عبد العزيز الحداد – عن أنه سيتعين على جميع لجان الرقابة الشرعية الداخلية في جميع المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية وشركات التمويل التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات الالتزام بتطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اعتباراً من أول سبتمبر 2018م، وقد أعدت الهيئة الشرعية العليا بمصرف الإمارات المركزي خطة زمنية لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر (2020) .[202]وتنص المادة (82) من القانون الاتحادي على أنه:" في حالة ثبوت قيام المنشأة المالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها او جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بأعمال لا تتفق مع هذه الأحكام وفقاً لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية، يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشأة المعنية بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها توفيق أوضاعها خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى المصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وإجراءات تصحيحية".

---

[201] ()المرجع نفسه (ص55).

[202] ()جريدة البيان الإماراتية/ الرابط www.albayan.ae تاريخ النشر 18 يوليو 2018م.

المبحث الثاني

ازدواجية العمل المصرفي والإطار القانوني للمصرفية الإسلامية

فكرة المصارف لا يرفضها الإسلام؛ لأنه لا يرفض كل جديد إذا لم يكن معارضا للكتاب والسنة، غير أن المصارف التقليدية تتعامل على أساس الفائدة، والفائدة هي: "الثمن المدفوع نظير استعمال النقود، أو الزيادة مقابل إقراض النقود إلى أجل[203] "، وهذا هو الربا المحرّم، ثم إنها – من ناحية أخرى – تقوم ببعض الأعمال التي لا علاقة لها بالفوائد. ولو أنّ التعامل الربوي كان فيه مصلحة لأباحته الشريعة؛ لأن الشريعة كلها مصالح، غير أن الواقع يثبت أن الربا كله مفاسد، ولذلك جاءت النصوص الشرعية شديدة في الزجر عنه؛ يقول الله تعالى: **سمح** يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ **سجى** [البقرة: 278-279] .والكلام في هذا المبحث يأتي في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: العمل المصرفي الإسلامي وإشكالية الازدواجية

المصرف المركزي: هو تلك الهيئة الحكومية التي تتولى العمليات المالية الرئيسة للحكومة، ويستطيع عن طريق هذه العمليات المالية وبوسائل أخرى أن يؤثر على سلوك المؤسسات المالية بما يحقق الدعم للسياسة الاقتصادية للحكومة.[204]

---

[203] ()القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالية المعاصرة: د. عبد الحليم محمد عمر، بحث منشور في مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، (ص359)، العدد (9)، السنة (3)، (1420هـ / 1999م).

[204] ()اقتصادية النقود والبنوك: د. محي الدين الغريب، (ص65)، دار الهنا للطباعة، مصر، (1972م).

أو بعبارة أخرى المصرف المركزي هو الذي يتولى صك العملة النقدية للدولة وإصدارها وأداء العمليات المصرفية للحكومة والإشراف على سلامة النظام النقدي والائتماني والمصرفي، وتنظيم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها ودعمها عند الحاجة بما يضمن تنظيم وتوجيه السياسة الائتمانية والمصرفية للدولة وتنفيذها بما من شأنه دعم النظام الاقتصادي وحمايته .[205]

وفي المؤتمر الدولي المنعقد في "بروكسل" سنة 1920م، ورد القرار الصادر عنه بضرورة قيام كل دولة بإنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي، ومن أجل المحافظة على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي، ومن ثمة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك على مدى خمسة وعشرين عاماً متتالية، وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنك مركزي .[206]

وقد خلَط بعض الدارسين بين مفهومي (البنك التجاري) و(البنك التقليدي) وعدهما نوعاً واحداً يؤديان الوظيفة نفسها، وهذا ليس دقيقاً، لأن البنك التقليدي جزء من البنوك التجارية، والبنوك التجارية لا تقتصر على البنوك التقليدية فحسب، وإنما تشترك معها المصارف الإسلامية أيضاً، شأنها في ذلك شأن البنك التقليدي من حيث تحقيق الأرباح، فالمصرف الإسلامي عبارة عن شركة مساهمة تهدف إلى تحقيق الربح من خلال الأطر الشرعية، مما يعني أنه ليس جمعية خيرية لا يهدف إلى الربح! صحيح أن للمصرف الإسلامي أهدافاً اجتماعية لكن عمله الرئيس يتمثل بالتجارة التي يشترك فيها مع البنك التقليدي، إلا أن تجارة المصارف الإسلامية تختلف عن تجارة البنوك التقليدية؛ (لأنها – المصارف

---

[205] ()تنظيم العلاقات بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية: د. عبد الحميد البعلي، (446/4)، بحث مقدم إلى مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية، دبي، (2005م)

[206] ()السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي: جمال دعاس، (ص162)، دار الخلدونية، (ط1)، (2007م).

الإسلامية – تتاجر بالنقود ولا تتاجر فيها، على عكس البنوك التقليدية التي ينصب عملها في المتاجرة بالنقود لا بها) .[207]

وهذه الميزة هي إحدى الميزات التي تفرق بين العمل المصرفي الإسلامي والعمل البنكي التقليدي، المتمثل بمبدأ الوساطة المالية الذي تعتمد عليه البنوك التقليدية، ويقابله مبدأ الوساطة الاستثمارية الذي تعتمد عليه المصارف الإسلامية، باعتبارها وسيطاً استثمارياً – مما يعني أنها تربح وتخسر– مع البائعين والمشترين لمختلف السلع والخدمات، فضلاً عن منعها بالمتاجرة بالنقود مطلقاً، لأنها أثمان، والأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، وهذه إحدى المقومات التي قامت عليها فكرة المصارف الإسلامية.[208]

ومن هنا نجد في معظم قوانين البنوك المركزية العربية، أنها مأخوذة عن قوانين غربية، تفرّق في العادة بين العمل المصرفي وغيره، فتمنع البنوك من العمل التجاري المحض. يقول د. رفيق يونس المصري: "المصرف التقليدي يتعامل بالنقود والديون (القروض)، ولا يتعامل بالسلع، فهو تاجر نقود وقروض، إذْ يتخذ من القروض النقدية تجارة، فيقترض النقود بمعدّل فائدة، ويقرضها بمعدّل أعلى؛ فتجد لدى المصرف التقليدي نقوداً أو قروضاً، ولا تجد سلعاً في مخازن له أو معارض، فالتجارة المصرفية تجارة من نوع خاص، فالتجارة المصرفية تجارة من نوع خاص، والمصارف لم تنشأ تاريخياً إلا بعد استباحة الفائدة، والتعامل بالسلع لا يدخل في نطاق الأعمال المصرفية، كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة المصرفية" .[209]

---

[207] ()أخلاقيات العمل المصرفي: د. عبد الحميد البعلي، اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية. مركز أبحاث فقه المعاملات. الرابط: kantakji.com

[208]()اعتماد المصارف المركزية معايير أيوفي: د. إبراهيم العبيدي، الحلقة2، الرابط: https://www.aliqtisadalislami.net/

[209] ()ماهية المصرف الإسلامي: د. رفيق يونس المصري، مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد العاشر، (ص21-27)، (1998م).

وعلى الرغم من أن غالبية البنوك المركزية جعلت البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية في بلدانها في سلة واحدة، وسنّت بعضها للأخيرة بعض القوانين الاستثنائية الخاصة، إلا أن هناك بعض الدول التي جعلت للمصارف الإسلامية تشريعات خاصة مستقلة بحيث استطاعت أن تنظم عملها بشيء من الخصوصية، مما جعلها تتميز عن بقية البنوك التقليدية الأخرى في تلك البلدان، فأصبحت كيانات مستقلة عريقة لها جمهورها وتشريعاتها الخاصة، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تدعم هدفها ومبادئها، ثم هناك بنوك مركزية تحولت بالكامل إلى بنوك مركزية إسلامية، مما جعل تعاملاتها بعيدة عن الفائدة أخذاً وإعطاءً .[210]ومهما يكن فإن المصارف الإسلامية تعمل بترخيص من البنوك المركزية، وتحت إشرافها ورقابتها؛ فنجد – على سبيل المثال– التجربة الباكستانية التي تحولت من نظام مصرفي إسلامي تدريجياً حتى صدر إعلان رسمي بهذا التحول سنة 1985م، ويشرف مجلس الفكر الإسلامي على مختلف مراحل التنفيذ، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من ترجمة هذه الرغبة إلى واقع عملي يعيشه النظام المصرفي الباكستاني الذي لا يزال مستمراً في متابعة الأبحاث لإيجاد حلول للمسائل العالقة التي لم تخضع بعد للقواعد الإسلامية، وقد قام البنك المركزي الباكستاني مؤخراً بإصدار تعليمات جديدة تسمح بممارسة نظام مصرفي مزدوج يجمع بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية معاً، مع وضع القواعد التنظيمية والرقابية الازمة لضمان سلامة تطبيق نظام الصيرفة الإسلامية سواء كان ذلك من خلال إنشاء بنوك إسلامية كاملة أو شقيقة للبنوك التقليدية، أو مجرد فتح فروع إسلامية لبنوك تقليدية .[211]

المطلب الثاني: مضمون القانون الاتحادي بشأن المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات

---

[210] ()علاقة البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية: موسى عبد العزيز شحادة، (ص13)، بحث مقدم إلى ندوة المستجدات الفقهية، عمان، (1994م).

[211] ()اقتصادية النقود والبنوك بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية: د. محي الدين الغريب، (ص65).

يُنظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كلاً من البنوك والمؤسسات المالية التالية: البنوك التجارية، بنوك الاستثمار، البنوك الإسلامية، محلات الصرافة، الوسطاء الماليين والنقديين، شركات الاستثمار المالية المرخصة، شركات التمويل. وتوفر دولة الإمارات أيضاً الخدمات المصرفية الإسلامية التي تخضع بشكل عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية.

ووفقاً للمادة 3 من القانون، يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع، أو بعض الخدمات، والعمليات المصرفية، والتجارية، والمالية، والاستثمارية. كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 م المشار إليه...

ويكون للمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية، وكذلك المشاركة في مشاريع قائمة أو تحتاج لتأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة، وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية [212].

وطبقاً لقانون المصرف المركزي الإماراتي، فقد بيّن المحظورات على البنوك في المادة (90) منه؛ إذْ جاء فيها: "يُحظر على المصارف التجارية أن تزاول أعمالاً غير مصرفية وبوجهٍ خاص الأعمال التالية:

[212] ()العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية: محمد عبد الحكيم زعير، (71/1)، بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، (2002م)، جامعة الشارقة، كتاب الوقائع- الجزء الأول.

(أ) ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن امتلاكه وفاءً لدين لها على الغير، وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المحافظ. (ب) شراء العقارات لحسابها الخاص..... الخ " .[213]

ويتضح من ذلك أنّ طبيعة العمل المصرفي المتعارف عليه تختلف عن العمل التجاري المحض، وأنّ البيع والشراء على وجه التجارة لا يجوز عندهم إلا للسندات أو الذهب، أو في عمليات الصرف...

على أنه توجد مجالات كثيرة للتعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية دون التعامل الربوي، وعلى سبيل المثال لا الحصر: فتح الحسابات الجارية، وقيام البنوك التقليدية بأعمال المراسل للبنك الإسلامي، والمشاركة معاً في الاستفادة من التقنية الحديثة لخدمة المتعاملين والعمل المصرفي بصفة عامة، والتعامل أيضاً كوكلاء في المعاملات الخالية من الربا، إضافة إلى تبادل تحصيل الشيكات أو فتح الاعتمادات، وحضور الندوات المصرفية المشتركة بينهما، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي. كما توجد مجالات كثيرة للتعاون في مجالات الاستثمار والمشروعات التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة؛ وقد ثبت على أرض الواقع فعلاً وجود هذا التعاون حين شارك بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، مع مجموعة من البنوك العالمية في تمويل مشروعات عديدة منها مشروع كهرباء منطقة الشويهات بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث إنّ تكلفة المشروع مرتفعة جداً .[214]

وقد أرست البنوك الإسلامية قاعدة أساسية في مجال المعاملات والاستثمارات المشتركة بين البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك، إذْ قامت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي

---

[213] ()القانون الاتحادي الإماراتي رقم (6) لسنة (1985م)، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية، موقع البنك المركزي الإماراتي.

[214] ()العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية: محمد عبد الحكيم زعير، (71/1)، مرجع سابق.

الإسلامي بمراجعة والتطوير العقود التي شاركت في هذا الاستثمار "الإجارة المنتهية بالتمليك" وجعلتها متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحذفت منها كل ما يجعلها قرضاً ربوياً، ووافقتها عليها هيئات الفتوى بالبنوك الإسلامية الأخرى .[215]

وقد تعددت معاملات بنك دبي الإسلامي مع غيره من البنوك في هذا المجال مثل مشروع "تبريد" داخل دولة الإمارات وغيرها كثير، وقد تحقق ما أرادته البنوك الإسلامية، بجعل عقود التمويل المشتركة مع البنوك التقليدية عقوداً إسلامية حاكمة. وقد وجدت هذ العقود ترحيباً كبيراً من البنوك التقليدية داخل الإمارات ومنطقة الخليج والدول الأوربية؛ لما رأوه من عدالة الإسلام وحرصه على تحقيق مصلحة طرفي العقد، وليس مصلحة طرف واحد كما يحدث عادة في عقود البنوك التقليدية التي هي أقرب إلى عقود الإذعان، وهو ما يحدث غالباً في العقود المبرمة بين البنوك التقليدية ومتعامليها...

وقامت هيئة الفتوى ببنك دبي الإسلامي بحصر المخالفات الشرعية في أحد هذه العقود فوجدتها قد بلغت اثنتين وسبعين مخالفة شرعية، وقد قامت الهيئة بتعديل هذه العقود الضخمة، وقبلت البنوك التقليدية المشاركة طائعة بالموافقة على التمويل طبعاً بشروط الشريعة الإسلامية الغراء ومبادئها؛ لما رأوه من تحقيق للعدل، دون محاولة نصرة طرف على آخر، أو إمضاء عقد ربوي في جوهره ومخبره، وإسلامي في شكله ومظهره .[216]

المطلب الثالث: أهداف مؤتمر تقنين المعاملات المالية الإسلامية المنعقد بإمارة الشارقة (2022م)

---

[215] ()اختلاط الحلال بالحرام في تعاملات المصارف الإسلامية: د. غسان محمد الشيخ، (ص587)، دار القلم، دمشق، (2014م).

[216] ()علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية: إسماعيل حسن، (ص15)، بحث لدورة تدريبية للعاملين ببنك دبي الإسلامي، (1986م).

التقنين: هو صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لها جامعة لإطارها في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها .[217] وهو أيضاً عبارة عن "القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون، بعد تبويبها وترتيبها وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض وفيها من غموض في مدونة واحدة، ثم إصدارها في شكل قانون تفرضه الدولة، عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريع فيها، بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع، أو العرف، أو العادة، أو القضاء، أو غير ذلك من مصادر القانون" .[218]

ولا بدّ من التأكيد على أنّ اصطلاح "التقنين" إنما يُقصد به التجميع الرسمي من جانب الدولة للنصوص التشريعية الخاصة بفرع من فروع القانون، كالقانون المدني والتجاري، والبحري ونحو ذلك[219] . وعليه فلا يمكن إغفال دور السلطة المختصة، بحيث يكون تجميع النصوص التشريعية في مجال تقنين المعاملات المالية رسمياً.

فالتقنين –إذن – هو اختيار الأحكام الشرعية في المعاملات في مكان معين وزمان معين، مع تصنيفها في فروع وترقيمها في مواد، وإصدارها من السلطة المختصة، تشريعاً يلتزم به القاضي، ويحتكم إليه المتقاضي.[220] وعلى ذلك لا يجوز أن يوصف أي تجميع لقواعد أو نصوص يقوم به أحد الفقهاء أو الهيئات العلمية بأنه تقنين.

---

[217]()جهود تقنين الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي، (ص26)، دار الفكر المعاصر، دمشق، (2014م).

[218]()تقنين الفقه الإسلامي (المبدأ والمنهج والتطبيق): د. محمد زكي عبد البر، (ص21)، إحياء التراث الإسلامي قطر، (1986م).

[219]() السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق: د. عبد الله القاضي، (ص34)، دار الكتب الجامعية بطنطا، (1989م).

[220]() في منهجية التقنين أفكار أولية: د. محمد كمال إمام، ندوة التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر، (ص421)، ندوة وزارة الأوقاف– سلطنة عمان، (ط2)، (2012م).

على أنه يُعدّ قرار الهيئة الشرعية العليا في المصرف المركزي الإماراتي باعتماد معايير (أيوفي) خطوة مهمة نحو التقنين؛ حيث بادرت الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي تحت عنوان: تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية – التطبيق واستشراف المستقبل، (أكتوبر 4 -5 / 2022م)؛ ويهدف المؤتمر إلى التعرف على معايير نجاح تقنين أحكام المعاملات المالية الاسلامية، وعرض الممارسات والتجارب المحلية والدولية المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، وأهم الإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية وحلولها، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية، وأثر التقنين على ازدهار ونمو الصناعة المالية الإسلامية .ويضم المؤتمر خبراء أكاديميين ومهنيين محلياً ودولياً ومن ذوي السبق في هذا الجانب، للتحدث حول محاور المؤتمر العلمية، والخروج بتوصيات تعود بالأثر الإيجابي على تقدم الصناعة المالية الإسلامية وازدهارها.[221]

ومن منطلق أن البنوك المركزية تمثل المرجعية العملية (القانونية) للمؤسسات المالية؛ كونها تندرج تحتها هيكلياً، وتلتزم بقراراتها رسمياً، ومن بين هذه المؤسسات البنوك الإسلامية، التي أصبحت جزءاً من النظام المصرفي في الدول التي تتبنى هذه البنوك. ولأن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) تُعدّ مرجعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فإن اعتماد البنوك المركزية لهذه المعايير وإلزام البنوك الإسلامية بها، يمكن أن يحقق الاتفاق – قدر الإمكان – وسط ما نراه من تباين – أحياناً – في الفتاوى، ذلك أن البنوك المركزية تتمتع بقوة قانونية وإلزام رسمي، بالإضافة إلى أن معايير (أيوفي) باتت تمثل مرجعاً شرعياً وعملياً لمعظم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .[222]

---

[221]() موقع الجامعة القاسمية: https://www.alqasimia.ac.ae/

[222]()اعتماد المصارف المركزية معايير أيوفي: د. إبراهيم العبيدي، الحلقة2، الرابط: https://www.aliqtisadalislami.net/

المبحث الثالث

من إشكالات التطبيق العملي للتمويل والمصرفية الإسلامية

من المعلوم أنّ عُمْر المصارف الإسلامية ما زال صغيراً، لم يكمل بعدُ أربعةَ عقود، وعُودها الفتيّ ما زال غضاً طرياً، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك بعض الأخطاء وأن تكون غير صافيةٍ عن الشبهات، وما فيها من بعض الشبهات وقليل من الأخطاء أقلّ ضرراً بكثير من حرام صريح وتام وكامل يؤدي إلى حرب من الله ورسوله، ولكن على أن تسعى هذه المصارف وتبذل أقصى ما بوسعها لتلافيها وتجاوزها، وأن نسعى جميعاً إلى تقديم العون المفيد والمقترحات المدروسة لمساعدتها [223]. ولعل هذا يفسّر ما نراه من تباين – أحياناً – في الفتاوى التي تصدر عن جهات الفتوى المختلفة، على أنّ معالجة المسائل تتحقق في ضوء مراعاة خمسة مقاصد كبرى للمعاملات المالية الإسلامية، قد وضعها علماء المقاصد بعد استقرائهم وتتبعهم لأبواب المعاملات المالية، وهذه المقاصد هي: (رواج الأموال، ووضوحها، وحفظها، وإثباتها، والعدل فيها)[224] ، ولنعرض هنا بعض النماذج التي تشير إلى ملامح من جدليات فقهية في العمل المصرفي، ضمن المطالب التالية:

المطلب الأول: تحديات النظام النقدي في القرن الـ (21 الميلادي)

يستخدم البنك المركزي في تحقيق مهامّه سواء ما تعلق منها بإدارته للسياسة النقدية أو الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي، مجموعة من الأدوات التقليدية مثل: عمليات السوق المفتوحة. إعادة خصم الأوراق النقدية– وضع سقوف الائتمان– نسب السيولة– تحديد

---

[223] ()قضايا ومشكلات في المصارف الإسلامية وحلول مقترحة: عماد عبد الرحمن بركة، (ص19)، دار النفائس، الأردن، (2015م).

[224]() رعاية مقصد العدل في عقود المعاوضات المالية (دراسة مقاصدية فقهية مقارنة بقانون المعاملات المدنية الإماراتي): جعفر علي النقبي، (ص17)، ماجستير نوقشت بجامعة الشارقة، من إصدار المنتدى الإسلامي بالشارقة، (2021م).

نسب الاحتياطي النقدي- مراقبة أسعار الصرف- مبادلة العملات الأجنبية- تحديد سعر الفائدة. هذه الأدوات يؤثر كل منها في الأخرى تأثيراً كبيراً إلا أن الأدوات الفاعلة بالدرجة الأولى هي: سعر الفائدة بأشكالها المختلفة- الخصم- الإصدار النقدي؛ وذلك كله بهدف السيطرة على عرض النقود تمهيداً للسيطرة على التضخم، ووصولاً إلى ميزان توازن المدفوعات؛ مما يؤدي إلى تحقيق نمو مطرد في الاقتصاد .[225]

ويهدف البنك المركزي من الاحتياطي القانوني إلى التأثير في قدرة البنوك على خلق النقود من خلال التحكم في حجم الائتمان الذي تستطيع أن تمنحه هذه البنوك، فكلما كانت هذه النسبة منخفضة كلما زادت قدرة البنوك على منح الائتمان وزادت قدرتها على خلق النقود، وبالتالي تساهم في زيادة العرض النقدي وإحداث الموجات التضخمية لقدرة هذه البنوك على التوسع في منح الائتمان وخلق النقود .[226]

وعندما عرض د. محمد اللجِميّ إشكالية أطروحته للماجستير نبّه على أنها تجيب عن سؤال: مدى مشروعية آليات التمويل الحديثة التي تستعملها البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية والمؤسسات النقدية عموماً، والتي تقوم كلها على خلق النقود بالأساس، وهي المتهمة اليوم من قِبَل العديد من الاقتصاديين بالتسبب في الأزمات المالية العالمية.. على أنّ توليد أو (خلْق النقود) صار اليوم عملية شائعة في العرف الاقتصادي، ويعتبر الوظيفة الأساسية للبنوك التجارية، إذْ بها يموّل الاقتصاد. والمتأمل في خلق النقود لدى البنوك يرى أنها تخلق نقوداً "من لا شيء"، وهذا أمر يتنازعه إلى اليوم روّاد الفكر الاقتصادي الحديث

---

[225] ()تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية: د. عبد الحميد البعلي، (146/4)، بحث مقدم إلى مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بدبي، (2005م).

[226] ()دراسات في التمويل الإسلامي: د. أشرف دوابه، (ص102)، دار السلام – القاهرة، (2007م).

بين مقرّ ونافٍ، وبين مؤيد لخلق النقود ويراه أساس التطور الاقتصادي، ومعارض له ويراه سبب الأزمات الاقتصادية وآخرها أزمة (2008م) .[227]

ويفرض البنك المركزي على البنوك العاملة في الدولة الاحتفاظ ببعض الأصول ذات السيولة المرتفعة حتى يسهل تحويلها إلى نقد في حال زادت حركة المسحوبات من قبل المودعين.. وبالنظر في عناصر الموجودات السائلة يتضح أنّ المصارف الإسلامية لا يمكنها شرعاً التعامل في العديد منها كالسندات والأوذونات بمختلف أنواعها؛ ومن ثم فإنّ تعميم البنوك المركزية لنسب السيولة على البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية يضع الأخيرة من الناحية المصرفية في موقف غير عادل وغير تنافسي في استخدام الأموال، إذْ تقتصر الموجودات السائلة لدى المصارف الإسلامية على النقدية والأرصدة النقدية، والتي في الغالب لا تدر عائداً باستثناء النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي.[228]

وفضلاً عما سبق؛ فإن القرن الـ (20 الميلادي) قد شهد تطوراً كبيراً في أشكال النقود، ويتواصل هذا التطور في القرن الـ (21م) لكن بوتيرة أسرع .وقد ساهمت الأزمات المتعاقبة في تسريع هذا التطور بحثاً عن حلول لها؛ ومن أهم التطورات النقدية الحاصلة: زوال ماديّة النقود. فإنّ ظهور النقود التشفيريّة يبشّر بظهور نظام نقدي عالمي جديد قد يكون بديلاً عن النقود القانونية/ المركزية وخاصة عن الدولار الأمريكي المفروض على الدول كعملة أساس في المبادلات التجارية الدولية منذ اتفاقية "برتّن وودز" (britton woods) إثر الحرب العالمية الثانية سنة (1948م).

---

[227] ()خلق النقود حقيقته وحكمه في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية: د. محمد اللجِميّ، (ص 8-9)، الدار المالكية، تونس، (2021م)، والمصرفية الإسلامية مفاهيمها وخصائها وتطبيقاتها: د. إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، دائرة الشؤون الإسلامية، دبي، (2015م).

[228] ()تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية: د. عبد الحميد البعلي، (146/4).

وهذه النقود المشفّرة وما سيتفرع عنها من أشكال جديدة للنقود، يُتوقع – مستقبلاً– أن تقضي على سلطة الدولة في إصدار النقود، وستقضي على الحواجز والحدود الجغرافية للعملة، أو قد تجعل سلطة الإصدار بجهة أمميّة محايدة تنظّم عملة عالمية واحدة تستعمل داخلياً وخارجياً على حدّ سواء. وعلى العموم فإنّ النظام النقدي العالمي سيواجه تحديات كبيرة خلال القرن (الـ 21م) يتجدد فيها طرح إشكاليات: (سلطة الإصدار النقدي– وملكية النقود– وملكية عوائد إصدار النقود– والرقابة على خلق النقود– وتحقيق العدالة في توزيع الفرص والثروات– ومنع تركيز القرار السياسي المالي بيد مجموعة صغيرة من الفاعلين الاقتصاديين– ومنع التلاعب بقيمة النقود. والحفاظ على وظائف النقود) .[229]

المطلب الثاني: حول مشكلة التورّق المصرفي المنظَّم

لقد تزايد في السنوات الأخيرة استخدام أداة مبتكرة من أدوات التمويل الحديثة، تعرف بـ "التورق المصرفي المنظّم" التي اعتبر وجودها من الناحية الشرعية قائماً على أساس ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ"التورق" في شراء السلع وبيعها، ويهدف هذا المنتج القائم على استخدامه التورق إلى تمكين عملاء البنوك من الحصول على النقد الحاضر، مقابل أكثر منه في الذمة، وذلك من خلال إبرام عقد شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير البائع بأقل من الثمن الأول.

وطُرح التورّق باعتباره أداة تمويلٍ جديدةٍ، تقوم بديلاً عن كثير من أدوات التمويل المتعارف عليها (مرابحة ومضاربة واستصناع....الخ)، حيث انتشرت هذه الأداة في دول الخليج العربي، وأصبحت تمارس بشكلٍ واسع تحت مسميات مختلفة، منها:(التورق المبارك، تورق الخير، تيسير الأهلي،....الخ)، واستغلت من قبل بعض المصارف التي بدأت في فتح فروع إسلامية؛ بقصد التحول التدريجي إلى العمل الكامل بالشريعة الإسلامية، مما جعل هذه الأداة يدول حولها الكثير من التساؤلات والاستفسارات، من حيث مشروعيتها، وفيما إذا

---

[229] ()خلق النقود: د. محمد اللحِميّ، (ص202– 203).

ساهمت في تمويل أنشطة إنتاجية للتنمية الاقتصادية، أم أنّ المصارف الإسلامية انحرفت عن هدفها وأصبحت تقدم .[230]

إنّ مقصد الشرع من ربط التمويل بالتبادل: هو أن يكون التمويل تابعاً للمبادلات الاقتصادية، أما التورّق وسائر صور العِينَة فهي على النقيض من ذلك تجعل المبادلات تابعة للتمويل، وهذا مع مناقضته لحكمة التشريع، فهو مناقض للمنطق الاقتصادي؛ لأن تكلفة التمويل لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال النشاط الاقتصادي الفعلي، والمفترض أنّ هذا النشاط يتم من خلال المبادلات والمعاملات المشروعة، فإذا انعكس الوضع وصار النشاط الاقتصادي خادماً للتمويل انعكس الهدف من النشاط الاقتصادي أصلاً .[231]

وبحسب رأي الدكتور حسين شحاته: فالتمويل بالتورّق ليس له أي مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي هي غاية المقاصد من إنشاء المؤسسات المصرفية الإسلامية؛ فالسلع الوسيطة لا تساهم في التنمية الاقتصادية الفعّالة، حيث لا تدخل في تصنيع بعض الضروريات والحاجيات التي نحن في أشد الحاجة إليها لتشغيل عجلة الصناعة والزراعة.

ومن ناحية أخرى: لا تحقق قيمة مضافة إلى الإنتاج الوطني ولاسيما في دول العالم الثالث، وتقع في قلبها معظم الدول العربية والإسلامية، فصيغ التورّق تساهم في عملية تولّد النقود، وهذا ما يعاب على صيغ التمويل التي تمارسها المصارف التقليدية، وكان مما يضاف إلى تميّز المصارف والمؤسسات المصرفية الإسلامية أنّ دورها في قضية تولد النقود قليل بالمقارنة مع المصارف التقليدية.

---

[230] ()بيع العينة والتورق دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية: د.هناء محمد الحنيطي،(ص7-8)،رسالة ماجستير ، دار كنوز إشبيليا، من إصدارات الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل- الرياض، (2012م).

[231] ()المرجع السابق: (ص293).

ومن ناحية ثالثة: لا تساهم صيغة التورق في زيادة الناتج القومي؛ لأن المسألة لا تعدو إلا أن تكون مبادلة مال بمال وأن السلعة الوسيطة معبّر فقط، ولم يترتب على ذلك كله شراء خامات، أو معدات أو آلات أو أدوات لتستخدم في زيادة القيمة المضافة والتي بدورها تزيد من الناتج القومي، فالتمويل بالتورق ليس له أي مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي هي غاية المقاصد من إنشاء المؤسسات المصرفية الإسلامية .[232]

المطلب الثالث: مشكلة الديون المتأخرة ورفع المصارف هوامش الربح خوفاً من التأخر

من أهم المشكلات والعقبات التي تعرقل بعض نشاطات المصارف الإسلامية واستثماراتها مشكلة الديون المتأخرة التي تحرم المصارف الإسلامية من الاستثمار في كثير من الفرص المتاحة لها، وذلك لحرمانها من المبالغ المدينة التي تأخر سدادها، وهذه المشكلة جعلت بعض المصارف تتخذ إجراءات، بعض هذه الإجراءات لم تكن سليمة من الإثم والحرام.

وفي المصارف التقليدية الربوية تعالج مشكلة الديون المتأخرة من خلال حساب فوائد على كل دين يتأخر سداده، بل وتزداد وتتضاعف هذه الفوائد كلما تأخر وفاء الدين. ولذلك – وحسب الظاهر– لن تتأثر هذه المصارف بهذه المتأخرات من الديون. ولكن المصارف الإسلامية لا تستطيع معالجة هذه المشكلة بهذه الطريقة، لأنها طريقة محرّمة وربا صريح لا ينكر حرمته واحد من المسلمين.

ومن الآثار السلبية لتأخر وفاء الديون: أنّ المصرف الإسلامي يُحرَم من المبالغ المدينة وعوائدها، ومن استثمارها خلال فترة التأخير، ويقلل من فرص التمويل للعملاء بسبب الخوف من التأخر في السداد حيث يقتصر إعطاء هذه الفرص لفئة من الناس لديهم ضمانات كثيرة ورهونات لا يستطيع تقديمها إلا هذه الفئة، وهذا ما يخفف من نشاط

---

[232]()التورّق المصرفي في نظر التحليل المحاسبي والتقويم الاقتصادي الإسلامي: د.حسين شحاته، الأستاذ بجامعة الأزهر، (ص23–24)، الرابط: https://www.google.com/)) بتصرف .

المصرف الإسلامي ويجعله مقتصراً على فئة من الأغنياء فقط، وهذا ما يتعارض من مقاصد إنشاء المصارف الإسلامية.

على أنّ قيام البنوك الإسلامية برفع هوامش الربح خوفاً من التأخر في السداد مما يمنع العملاء–حتى من عندهم الضمانات الكثيرة الكافية– من التعامل مع البنوك الإسلامية؛ لأن التكلفة عالية والخدمات المتاحة أقل من البنوك الربوية، بل كما يقول أحد الباحثين: صار هناك انتقاد من الكثيرين للمصارف الإسلامية:(كأنها تستغل اسم الإسلام لرفع تكلفة تمويلها). وترتياً على ذلك: تضعف المصارف الإسلامية بسبب ما تقدم عليه من منافسة المصارف الربوية التي لا توجد عندها هذه السلبيات، لأنها تحسب فوائد التأخير فلا تتأثر بذلك– حسب الظاهر .[233]

ويمكن أن تتلخص الحلول الجذرية لهذه المشكلة في: الشرط الجزائي وغرامة التأخير. أو عن طريق اشتراط التعويض المالي عن طريق التحكيم والقضاء. ومنع السفر والحبس. وقضاء القاضي دينه من ماله جبراً، وغيرها. الحلول الجزئية التي تسبق التمويل من كتابة وتوثيق الدين بشكل واضح ومفصّل، ودراسة الشخص المتقدم للبيع بالأجل أو التمويل، ودراسة الجدوى الاقتصادية، وربط المدين بما لديه من حقوق في المصرف. ومن الضروري التوسع في المضاربة والمشاركة بأنواعها وفق أسس علمية سليمة. وينبغي استحداث آليات وصيغ تعتمد على المشاركة في رأس المال، بدلاً من الصيغ الحالية القائمة في أغلبها على الديون .[234]

---

[233] ()قضايا ومشكلات في المصارف الإسلامية وحلول مقترحة: عماد عبد الرحمن بركة، (ص19–21)، بتصرف، مرجع سابق.

[234] ()المرجع السابق: (ص24–28)، بتصرف.

والمستفاد مما سبق: أنه يأتي على رأس الأولويات في دعم الاقتصاد الإسلامي، تطوير حوكمة الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية .[235]والحوكمة: "منهج قياسي رقابي عملي، يضبط الأعمال والعلاقات الخاصة بالمنشآت العامة والخاصة لحفظ الحقوق وفق ما يصدر بأنها من تشريع؛ [236] لتحقيق مقصد المنشأة بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية" [237]. وتعدّ الحوكمة من المصطلحات الحديثة الهامة، وتعنى بإدارة المنشآت المالية وغير المالية إدارة رشيدة بغية تحقيق المصالح وحماية الأطراف المرتبطة بالمنشأة كافة، وتحقيق الإفصاح والشفافية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمنشأة المالية بصفة خاصة، وضمان استقرار النظام المالي ونظام العمل في المجتمع بصفة عامة .[238]

وبالتالي فإنّ منظومة الرقابة الشرعية في الصناعة المالية، والمصارف والمؤسسات المالية، التي تشمل التدقيق الشرعي بفرعيه الداخلي والخارجي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، تُعدّ أمراً حديثاً معاصراً، بحداثة المصارف والبنوك والمؤسسات المالية، مع غياب التشريعات عند تأسيسها؛ فقد اتجهت العديد من المجتمعات من خلال تشريعات خاصة توجب تعيين مدقّقين شرعيين وهيئة فتوى ورقابة شرعية؛ للتأكد من توافق وعدم معارضة أعمال الشركة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سواء كانت صادرة من وزارة التجارة أو هيئة أسواق

---

235 ()دعم استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، (ص16).

236 ()التشريع: المقصود به القوانين والنظم والمعايير واللوائح والسياسات والقواعد، وكل ما يأخذ صفة إلزام من جهات رقابية وحكومية.

237 ()الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية: د. داود سلمان بن عيسى، (ص49)، دار البشائر الإسلامية، (2020م).

238 ()الحوكمة في المصارف الإسلامية اليمنية دراسة تطبيقية: محمد فرحان، ومحمد عبد القادر، بحث منشور ضمن إصدارات البنك الإسلامي، (مج 20، ع2، ص4)، الموقع الرسمي للبنك الإسلامي، (2014م). الرابط: http://iesjournal.org/

المال أو البنك المركزي، للمؤسسات التي ينص نظامها الأساسي على أنّ أعمالها متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .[239]

فالتدقيق الشرعي- باعتباره لقباً لمهنة مخصوصة – عرّفه بعض الباحثين بأنه: "عمليةُ فحصٍ ورصدٍ لأعمال المؤسسة، وتقويمها، وحفظها من الانحراف، وتعد هذه العملية هي الأساس لقيام هيئة الرقابة الشرعية بالشهادة المتمثلة بالتقرير الذي تصدره عن مدى التزام المؤسسة في أعمالها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية " .[240]

وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) بتاريخ (09/07/2020م)، تناولت المادة (104) حوكمة المنشآت المالية المرخصة:

1- يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت المالية المرخصة ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويحدد الشروط الواجب توفرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين كبار موظفيها؛ على ان تلتزم المنشآت المالية المرخصة المدرجة في الاسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.

2- على المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على تعيين او ترشيح اي شخص لعضوية مجالس إداراتها او تجديد عضويته، وكذلك على تعيين او تجديد عقد عمل اي من كبار موظفيها.

3- لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة رفض تعيين او ترشيح اي شخص لعضوية مجلس إدارة أية منشأة مالية مرخصة او تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين او تجديد عقد عمل اي من كبار موظفي تلك المنشأة.

---

[239] ()الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية: د. داود سلمان بن عيسى، (ص49).

[240] ()التصنيف الشرعي لمنتجات المؤسسات المالية الإسلامية ودوره في تطوير أدائها: د. منصور علي القضاة، (ص122)، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن، (2009م).

المبحث الرابع

آفاق التمويل الإسلامي المصرفي في ضوء الرقمنة والابتكار

بعد أن خَرَج المسلمون من وطأة الاحتلال المباشر في العصر الحديث واستعادوا أنفاسهم، وجدوا حولهم تقدماً اقتصادياً هائلاً، وسُوقَ نقدٍ متطورة، وحركة مالية كبيرة واسعة، ومؤسسات مالية كثيرة، وكان أبرزها البنوك، التي اعتبرت عصب الاقتصاد الحديث ومحور حركته. وبدت الحاجة شديدة إلى تمويل الصناعة والتجارة والزراعة والحِرف .[241]

وموضوع علم الاقتصاد يقوم على أمرين، أحدهما: دراسة سلوك الناس في ممارستهم للأنشطة الاقتصادية وتحليل هذا السلوك، من حيث دوافعه وأهدافه والمتغيرات المؤثرة عليه وعلاقتها ببعضها، ثم استنباط القواعد التي تحكم هذا السلوك. والأمر الثاني: أنه يقوم على استخدام المعلومات التي يمدنا بها الاقتصاد الوضعي أو دراسة ما هو كائن، ثم الأحكام الأخلاقية المستمدة من الدين والمثل العليا في المجتمع لتحديد وتأييد سياسة معينة من بين السياسات أو الطرق البديلة للممارسة الأفضل للنشاط الاقتصادي، وهذا الأمر يطلق عليه في الأدب الاقتصادي «دراسة ما يجب أن يكون» أو «النظام الاقتصادي أو الاقتصاد المعياري .[242]

وأصبحت الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى إلى العناية بمواكبة آخر التطورات التقنية الحديثة، فلا يسعنا إلا التأكيد على ضرورة التوسع في الاستخدام التقني، بعد ظهور ما يعرف بتقنيات (الذكاء الاصطناعي)، وتحليل البيانات الضخمة. ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه: "عبارة عن ذلك التيار العلمي والتقني الذي يضم الطرق والنظريات

---

[241] ()العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية: د. عبد القادر جعفر، (ص 6)، مؤتمر: المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، (31 مايو – 3 يونيو 2009م).

[242] ()الابتكار في الاقتصاد الإسلامي– الحاجة إليه وآثاره على نمط الحياة الإسلامي د. نجاة محمد المرزوقي http://ijtihadnet.net

والتقنيات التي تهدف إلى إنشاء آلات قادرة على محاكاة الذكاء البشري .[243] "ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حول صناعة التقنية المالية وعناصر الاقتصاد الرقمي

شهدت السنوات القليلة الأخيرة ثورة غير مسبوقة في التقنية المالية، غيّرت إلى حدٍّ كبير من الخارطة التقليدية للتمويل، وتحولت الكثير من المعاملات بشكل أسرع من المتوقع نحو التقانة، وطغت على الأعمال المالية التقليدية القائمة على وجود وسيط (رقابي وتشغيلي). ومع بروز صناعة التقنية المالية (الفينتك Fintech)، لم يعد بالإمكان إغفال هذا القطاع عند تحليل الصناعة المالية، تقليدية كانت أو إسلامية. وتعرّف التقنية المالية على أنها: "ابتكارات مالية باستخدام التقنية، يمكنها استحداث نماذج عمل تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة لها أثر ملموس في الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى تقديم الخدمات المالية (الاستقرار المالي 2017م)" .[244]

وأمثلة التقنية المالية أكبر من أن تحصى: فهي تبدأ من استخدام الهاتف الذكي في إتمام العمليات المصرفية (تحويل أو صرف أو دفع مثلاً)، أو في عمليات التداول والاستثمار، مروراً عبر العُملات الرقمية وليس انتهاءً بمنصات التداول الاجتماعي، ويقوم العاملون في الصناعة بتطوير تقنيات جديدة لتعطيل الأسواق. هناك إذن مجالات واستخدامات عديدة للتكنولوجيا المالية منها: الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، التمويل الجماعي، العملات المشفّرة، المدفوعات، التحويلات، الحوالات، تكنولوجيا التأمين، العقود الذكية، التقنية التنظيمية، تقنية الامتثال، سلسلة الكتل (بلوك تشين) (chain-Block) وتتداخل

---

[243] ()الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: د: شهبي قمورة، وآخران، (ص5) ملتقى دولي بالجزائر، نوفمبر (2018م).

[244] ()التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي: د. عبد الكريم أحمد قندوز، (ص11)، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات- أبو ظبي، (ع7)، (2021م).

هذه البيانات فيما بينها بشكل كبير .[245] في يناير من عام 2009م ظهرت عملة إلكترونية سميت بالBitcoin مشفّرة كليا، ومبنية في أساسها على تقنيات (البلوك شين)، في أول تطبيق لها كتكنولوجيا ستغير أسلوب عمل البنوك والقطاع المالي حول العالم. (البيتكوين) لا تحكمها أي سلطة مركزية ولا تخضع لأي قوانين مركزية.

تعريف تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين): وفقاً لشركتي IBM وForbes، فإن البلوك تشين أو (سلسلة الكتل): هو نظام لسجل إلكتروني مشترك، آني، ومشفَّر، وغير مركزي لمعالجة وتدوين المعاملات المالية، والعقود، والأصول المادية، ومعلومات سلسلة التوريد، وما إلى ذلك. ولا يوجد شخص واحد أو جهة واحدة مسؤولة عن السلسلة بأكملها، بل إنه مفتوح ويمكن للجميع في السلسلة مشاهدة تفاصيل كل سجل أو ما يعرف باسم كتلة، وتتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.

تساعد تكنولوجيا (بلوك تشين) في الحفاظ على قوائم مقاومة للتلاعب في سجلات البيانات المتنامية باستمرار، وتتيح تبادلاً آمنا للمواد القيّمة كالأموال أو الأسهم أو حقوق الوصول إلى البيانات. وخلافا لأنظمة التجارة التقليدية، لا حاجة لوسيط أو نظام تسجيل مركزي لمتابعة حركة التبادل، بل تقوم كل الجهات بالتعامل مباشرة مع بعضها البعض.

الاستراتيجيات الحكومية للتعاملات الرقمية (بلوك تشين): تبنت حكومة دولة الإمارات تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في تنفيذ المعاملات الحكومية، ولتحقيق النتائج المرجوة، أطلقت الدولة استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية. تهدف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021. كما ستساهم استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» في تحويل دبي إلى أول مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين بحلول عام 2020 وتصبح

[245] ()المرجع السابق، (ص12).

أسعد مدينة على وجه الأرض. وتقوم استراتيجية البلوك تشين على ثلاث ركائز هي: كفاءة الحكومة، وتأسيس الصناعات، والقيادة العالمية.

مجلس التعاملات الرقمية: في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة دبي للمستقبل من أجل تطبيق أحدث التقنيات والممارسات الابتكارية على مستوى العالم، أعلنت المؤسسة عن تأسيس المجلس العالمي للتعاملات الرقمية بهدف استكشاف وبحث التطبيقات الحالية والمستقبلية لها والعمل على تنظيم التعاملات الرقمية عبر منصات تكنولوجيا البلوك تشين .[246]

وتشكّل المؤسسات الإلكترونية في مجملها الاقتصاد الرقمي، وتعتبر مواقع الإنترنت وكل وسائل الاتصال الأخرى الطريقة المثلى لتحقيق تبادل الخدمات والسلع، وكذلك تحويل الأموال الكترونياً بين البائعين والمشترين، وتكمن أهمية ذلك في التجديد المستمر، والسرعة في المعاملات التجارية [247]. وتتيح شبكة الإنترنت لمختلف الشركات بالتعريف بها، والتعريف أيضاً بنشاطها وأسواقها وأهدافها وخططها ومرتكزاتها المالية، وهكذا تختصر المسافات والأزمنة، وتتحقق المصالح والأهداف بين أصحاب الشركات، بأقصر مدة وأقل تكلفة [248]. وفيما يلي مخطط يحدد عناصر الاقتصاد الرقمي:

---

[246] ()البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: الرابط// https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae

[247] ()الاستثمار بالنظم الرقمية والاقتصاد الرقمي: فريد راغب النجار، (ص17)، مؤسسة شباب الجامعة– الإسكندرية، (2004م)

[248] ()الاقتصاد الإسلامي الرقمي بين الابتكار والسعادة في نمط الحياة الإسلامي: د. بلعيدي عبد الله، (ص18)، منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي، (2018م).

عناصر الاقتصاد الرقمي

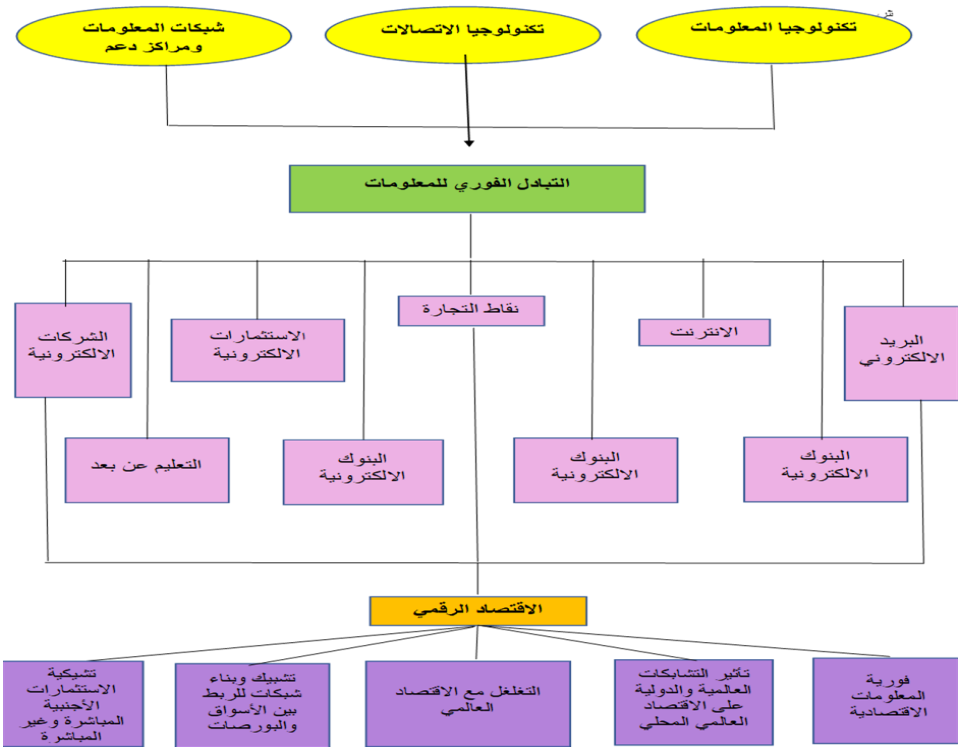

المصدر: الاستثمار بالنظم الرقمية والاقتصاد الرقمي: فريد راغب النجار، (ص16)، مؤسسة شباب الجامعة– الإسكندرية، (2004م)

وفي ضوء ما سبق يمكن أن نُدْرج هنا تعريفاً للاقتصاد الرقمي على أنه: " ذلك الاقتصاد الذي يستند على التقنية المعلوماتية الرقمية، ويوظف المعلومات والمعرفة في إدارته، بوصفها المورد الجديد للثورة، ومصدر إلهام للابتكارات الجديدة" .[249]فهو يقوم على الانترنت أو

[249] ()تنمية وتطوير المنتجات والقيمة المضافة في الاقتصاد الرقمي: بختي إبراهيم، (ص3)، بحث منشور في المؤتمر العلمي الدولي الأول حول أهمية الشفافية ونجاع الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي،

اقتصاد الويب، ويتعامل مع المعلومات الرقمية، والشركات الرقمية، والزبائن الرقميين، والمنتجات الرقمية، وكل ما له علاقة بالتكنولوجيا الرقمية.

والحاصل أنّ البنوك الإسلامية تواجه تنافسا كبيراً مع البنوك التقليدية، وبالتالي فإن العمل على دعم الابتكارات التكنولوجية وتطويرها لتحقيق المزيد من سهولة الخدمات البنكية للمتعاملين يعتبر خيارا ضروريا، والعمل من أجل تصميم هذه الابتكارات لتوائم شروط ومتطلبات المالية الإسلامية يعتبر تحديا حقيقا»، «فمن أجل المنافسة والاستمرارية تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تقديم مزيد من الدعم والاهتمام بالابتكارات سواء تلك المتعلقة بأدوات المالية الإسلامية أو تلك المتعلقة بالتسويق أو بالابتكارات التكنولوجية (250).

المطلب الثاني: أدوات التمويل الإسلامي والتمكين للتمويل الرقمي في المصارف الإسلامية بدولة الإمارات

التمويل هو عملية الحصول على مبلغ من المال، وتدبير الاحتياجات المالية من جهات مختلفة البنوك والمؤسسات المالية والشركات والأفراد واستثمارها وتوظيفها في أفضل استخدامات متاحة لها على ضوء العوائد المتوقعة والمخاطر المحيطة. والتمويل الإسلامي:

المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير- جامعة الجزائر، (2002م). http://bbekhti.online.fr/

[250]() يراجع مقال: تطوير الابتكارات في المالية الإسلامية، الإمام محمد محمود، .https://islamonline net/22002 ، وينظر بحث: مستقبل المصارف الإسلامية في ظل التقدم التكنولوجي، حسن عبد المطلب الأسرج، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالميةID/https://giem. kantakji. com/article/details/.555/. ، والابتكار في الاقتصاد الإسلامي- الحاجة إليه وآثاره على نمط الحياة الإسلامي د. نجاة محمد المرزوقي http://ijtihadnet.net/

هو العلم الذي يدرس مصادر الحصول على الأموال وتوظيفها واستخدامها واستثمارها بقصد الاسترباح أو التبرع بما يحقق منافع الفرد والمجتمع وعمارة الأرض، في إطار الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها [251]. أما عن أهم أدوات التمويل الاسلامي فتتمثل بالآتي:

– المرابحة للواعد بالشراء: حيث يقوم البنك، بناء على طلب العميل الراغب بشراء سلعة ما، بشرائها من المصدر وإعادة بيعها بالتقسيط على العميل مع مراعاة إضافة ربح البنك على السعر الكلي للبيع، لعملية المرابحة أطراف ثلاثة تكمن بالبائع والمشتري والمصرف.

– المساومة للواعد بالشراء وتعرف اختصاراً بالمساومة، وتتشابه إلى حد كبير مع المرابحة مع فارق رئيس هو أن المصرف لا يفصح عن الثمن الذي اشترى به السلعة من المصدر! يعمد المصرف إلى هذا النوع من العقود عندما يتعذر الإفصاح عن تكلفة السلعة لأي سبب كان.

– الإجارة المنتهية بالتمليك وهنا يدفع العميل مبلغاً محدداً من المال كل شهر لقاء الانتفاع بمنتج ما لمدة محددة من الزمن، وعند انتهاء المدة المتفق عليها يكون للعميل الحق في إعادة المنتج، أو تملكه من خلال سداد قيمته في السوق عند نهاية مدة الإجارة، أو أن يحصل على المنتج على سبيل الهبة بالنظر إلى ما سدده من مبالغ خلال فترة الإجارة.

– الأسهم وهي سندات تضمن لحاملها حصة محددة في أصول شركة ما ومداخيلها، ويجوز بحسب الشريعة الإسلامية الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكامها.

– الصكوك وتعد بمثابة شهادة تثبت لحاملها ملكية متساوية في أصل معين، وهي بديل شرعي للسندات المالية التي تصدرها البنوك التقليدية.

[251] ()دار التمويل الإسلامي – أبو ظبي: الرابط/ https://www.financehouse.ae/

– صناديق التمويل المشترك الإسلامية وهي وسيلة للاستثمار تتألف من وعاء مالي يجمع أموال عدد من المساهمين لغرض الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وسندات وغيرها من أدوات السوق المالية .[252]

ونستنتج من ذلك أن التمويل الإسلامي هو تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمثلاً البنك الإسلامي لا يمكنه تقاضي فوائد على القرض، ولا يمكنه أن يموّل نشاطات محرمة إسلامياً؛ إذ أنه لا يوفر الإقراض بينما يوفر عملية البيع والشراء، ومشاركة الربح والخسائر، ويجدر بالذكر أن التمويل الإسلامي يربط بين طريقة الحصول على الأموال وطريقة استخدامها، بينما يتم الفصل بينهما في التمويل التقليدي

وتزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد من شركات التمويل الإسلامي التي تقدم للجميع خدمات تمويلية وفقاً للشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا، تحت مظلة قانون التمويل الاسلامي وتُعدّ شركة (دار التمويل الإسلامي) شركة عريقة في مجال التمويل الإسلامي.[253]

ومن ناحية أخرى؛ نوقشت بعض الأطروحات العلمية في جامعة الشارقة بدولة الإمارات الاتجاه نحو دراسة موضوع (التمويل الرقمي)، وأوردت تعريفاً للتمويل الرقمي على أنه: " مجموعة عمليات تعاقدية منظمة على وجه شرعي مقبول، تتم من خلال تبادل إشعارات بين أطراف التعاقد عن بعد، وبشكل آلي عبر أجهزة أو تطبيقات مخصوصة[254] ". ويشْكُل على البعض الفرق بين الجهاز الكهربائي، والجهاز الإلكتروني، والجهاز الرقمي؟ ويمكن بيان الفرق بينهم كما يلي:

---

[252] ()أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: د. علي محمد أبو العز، (ص 105-106)، مرجع سابق.

[253] ()دار التمويل الإسلامي – أبو ظبي: الرابط/ https://www.financehouse.ae/

[254] ()التمويل الرقمي دراسة نظرية تطبيقية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية: أحمد صالح المرزوقي، (ص32)، دكتوراه من جامعة الشارقة، إصدار مركز الشارقة الإسلامي للاقتصاد والتمويل، (2019م).

الجهاز الكهربائي: هو الجهاز الذي له قدرة على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية أو حرارية ونحوها مثل المكنسة الكهربائية العادية.

الجهاز الإلكتروني: هو الجهاز الذي له القدرة على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية أو حرارية ونحوها، مع القدرة على التحكم به آلياً تحت إشراف العنصر البشري، وذلك من خلال دائرة إلكترونية، أو التحكم في درجة الحرارة ونحوها، مثل المكنسة الكهربائية ذات المؤقت والعداد.

الجهاز الرقمي: هو الجهاز الذي له القدرة على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية أو حرارية أو بيانات–مع القدرة على التعامل مع هذه البيانات قراءة وتنفيذاً– ويقوم بوظائفه بشكل آلي من دون إشراف بشري، وذلك وفق ما بُرمجت عليه، مثل المكنسة الكهربائية الروبوتية، والتي تقوم بتنظف المنزل بشكل آلي دون تدخل صاحب البيت، ومن ثم تعود لقاعدتها.

يظهر مما سبق أنّ الأجهزة الرقمية هي الأكثر تقدُّماً إذْ إنّ "المعالج" الذي تحتويه هذه الأجهزة هو بمثابة الدماغ في جسم الإنسان. وهي أجهزة لها القدرة على تحويل البيانات المفهومة (صورة، أمر بيع، أمر تنفيذ، صوت،...) إلى إلكترونيات (لغة رقمية)، ثم ترسلها عبر الإلكترونيات من مكان لآخر من دون إشراف بشري، وهي كذلك لها القدرة على استقبال الإلكترونيات (اللغة الرقمية) الواردة إليها وتحويلها إلى بيانات مفهومة (صورة، صوت، أمر بيع، أمر تنفيذ).. فلابد من وجود أجهزة قادرة على قراءة الرموز الرقمية (الأصفار والآحاد) التي تمثلها الإشعارات، ومن ثم ترجمة تلك الإشعارات إلى أوامر تنعكس في سجلات مخصصة توثق باليوم والتاريخ والوقت.[255]

والملحوظ أنّ فقهاء المصارف الإسلامية يبذلون جهداً كبيراً في سبيل إيجاد حلول تمويلية مشروعة تلائم التطور المستمر الذي يشهده قطاع الصيرفة، مساهمين بذلك في إبراز

[255] ()المرجع السابق: (ص 34– 36) بتصرف.

سعة الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحها لكل زمان ومكان. على أنّ المتابع للتنافس في عالم المصارف يلاحظ التنافس اليوم يتركز حول ابتكار منتجات تضمن سرعة حصول المتعامل على التمويل اللازم. والمصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي كذلك دخلت على خط التنافس، فبدأت تبحث عن منتجات تمويلية تلبي حاجة المتعامل خلال فترة زمنية تنافسية، وفي الوقت ذاته تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .[256]

وقدّم مصرف أبو ظبي الإسلامي لعملائه في (2012م) منتجاً تمويلياً أسماه: "التمويل الفوري"، وهو تمويل رقمي يهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم فور حاجته إليه، وذلك مع المتاجر المشاركة. وقد قام المصرف بدراسة عملائه أصحاب الرواتب الشهرية الثابتة، وحدد لكل منهم حداً تمويلياً لا يتعداه –حدّ ائتمان– بناءً على الملاءة المالية للمتعامل، ومن خلال الاتصال بمركز الاتصال يستطيع المتعامل معرفة ذلك الحدّ الممنوح له.[257]

المطلب الثالث: منهج الابتكار المتدرج في حسابات المضاربة

عُرّف الابتكار (Innovation) بتعريفات كثيرة، لعل من أفضلها القول بأنه: " الطرق أو الأساليب الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في عمل أو تطوير الأشياء والأفكار[258] . وهو عملية عقلية تعبر عن التغييرات الكمية

---

[256] ()المرجع نفسه (ص302)، بتصرف.

[257] ()المرجع نفسه: (ص261-262)، بتصرف.

[258] ()دور الابتكار والإبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات الاقتصادية والدول، «دراسة حالة دولة الإمارات»، نيفين حسن محمد، وزارة الاقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، 2016/8 م.(6)

والجذرية أو الجوهرية في التفكر، وفي الإنتاج أو المنتجات، وفي العمليات أو طرق وأساليب الأداء، وفي التنظيمات والهياكل .[259]

وعند إضافة الابتكار للاقتصاد الإسلامي، يكون المقصود به: الابتكار في القطاع الاقتصادي، من حيث قدرة المؤسسات المالية والاقتصادية على تحقيق رغبات زبائنها والمستثمرين فيها بشكل سريع وفعال مع الأخذ بالاعتبار التغيرات التي تطرأ على السوق ومواكبتها بشكل دائم، وذلك وفق النظم والأطر الإسلامية الشرعية التي تميز وسائل الابتكار وغاياته وأدواته وطرق تطبيقه، بخلاف الأنظمة الوضعية الأخرى .[260]

والابتكار المقصود ليس مجرد الاختلاف عن السائد، بل لابد أن يكون هذا الاختلاف متميزا إلى درجة تحقيقه لمستوى أفضل من الكفاءة والمثالية، ولذا فلا بد أن تكون الأدوات والمنتجات الاقتصادية المبتكرة تحقق ما لا تستطيع الأدوات والمنتجات السائدة أن تحققه .[261]

وأورد كتاب قواعد الحسابات البنكية تعريفاً للحساب من حيث الاصطلاح المصرفي على أنه: "سجل محاسبي لدى بنك مقيّم مرخص، ينشأ بموجب عقد يسمى (اتفاقية فتح الحساب)،موقعة من طرف البنك وصاحب الحساب (العميل)، وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوقٌ والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة السارية المفعول وفق الأعراف المصرفية المتبعة

---

[259] ()الابتكار في الاقتصاد الإسلامي– الحاجة إليه وآثاره على نمط الحياة الإسلامي د. نجاة محمد المرزوقي/http://ijtihadnet.net

[260] ()مقال: تطوير الابتكارات في المالية الإسلامية، الإمام محمد محمود، 9/ 7/ 2017 م، https://islamonline. net

[261] ()صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج الإسلامي، د. سامي سويلم، (ص5)، مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، رمضان 1425 هـ، ديسمبر، (2004 م).

والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في نص اتفاقية فتح الحساب والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين، وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك " .[262]

وتصاغ عقود المضاربة في المصارف الإسلامية وفق مبدأ المشاركة بين المصرف والعميل؛ وتكون الخسارة والربح جرياً على قاعدة (الغنم بالغرم)، بمعنى تحميل صاحب المال في الخسارة. وعندما تعرّض د. عيسى الحجّي لدراسة هذه المسألة انتهي إلى أنّ منتج حسابات المضاربة الاستثمارية بديلٌ شرعي مناسب وفق متغيرات الواقع المالي المصرفي؛ لإيجاد الحلول الشرعية على أساس الربحية والتشاركية لا على أساس الفائدة الربوية، وذلك بصوره وأشكاله التي عرضها كجانب تطبيقي. وأوضح في الجدول التالي أبرز أشكال ومظاهر التدرج في حسابات المضاربة الاستثمارية :[263]

المنتج المحدد لعملية التدرج / منتج حسابات المضاربة الاستثمارية	مكونات المنتج	منهج وآلية الابتكار	تقييم المنهج
الحسابات الجارية	وديعة = استثمار	التدرج	قابل للتنفيذ
حسابات التوفير	وديعة = استثمار مشترك	التدرج	قابل للتنفيذ
حسابات الودائع بالاستثمار	وديعة = استثمار مشترك	التدرج	قابل للتنفيذ

[262] ()قواعد الحسابات البنكية: موقع البنك المركزي السعودي، (ص6)، مارس 2022م) الرابط: https://www.sama.gov.sa/

[263]()منهجية البدائل الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية، دراسة تأصيلية تطبيقية: للباحث الإماراتي د. عيسى بن عبد الرحمن الحِجِيّ، (ص376)، الدار المالكية – تونس، (2022م) بتصرف.

حسابات الوكالة بالاستثمار	وديعة = استثمار	التدرج	قابل للتنفيذ
حسابات سندات المضاربة (شهادات الاستثمار)	وديعة = استثمار مشترك	التدرج	قابل للتنفيذ
حسابات الصناديق والمحافظ الاستثمارية	وديعة = استثمار مشترك	التدرج	قابل للتنفيذ

(أشكال التدرج في حسابات المضاربة الاستثمارية)

الخاتمة

والحمد لله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام على خير الأنام وبعد هذه الجولة الممتعة في مسيرة هذا البحث أقف على جملة من أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة، ويمكن إجمالها فيما يلي:

أولاً: نتائج الدراسة

أنّ المصارفُ الإسلامية تمثّلُ أهمّ وأكبر إنجازاتِ الاقتصَاد الإسلاميّ، وتستطيع هذه المصارف أن تكون ذات أهمية بالغة بالمساعدة في تكوين رأس المال والتنمية. وأنّ الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ترسّخ لجعلها المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي، وللتجارة الإلكترونية، ولصناعة المحتوى الرقمي، وللتصميم والإبداعات، والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي؛ هذه المقومات السبعة تستشرف المستقبل المالي للاقتصاد الإسلامي بشكل متكامل من خلال مجموعة من القوانين، والتنظيمات المدنية.

أنّ مواصفات النظام المصرفي الاسلامي تمثل حقيقة الأحكام الشرعية دون حيل وتلاعب، لكن الوضع الحالي ربما عليه ملاحظات عديدة. على أنّ (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية **أيوفي (AAOIFI)** تُعدّ هذه المعايير قد

أصبحت في أماكن متعددة، أشبه بقانون حاكم، تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما أنّ مجموعة من البنوك المركزية والسلطات المالية في بعض الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسمياً باعتبارها إلزامية أو إرشادية.

أنّ تجربة المصرفية الإسلامية وخصوصيتها التمويلية استطاعت أن تنافس الفائدة البنكية التقليدية، وأنّ البنوك الإسلامية في مجال المعاملات والاستثمارات المشتركة بينها وبين غيرها من البنوك، وقامت هيئة الفتوى ببنك دبي الإسلامي بحصر المخالفات الشرعية في أحد هذه العقود فوجدتها قد بلغت اثنتين وسبعين مخالفة شرعية، وقد قامت الهيئة بتعديل هذه العقود الضخمة، وقبلت البنوك التقليدية المشاركة طائعة بالموافقة على التمويل.

أنّ العمل الابتكاري والتطبيقات الذكية لها دور بارز في تنمية مجال الاقتصاد الإسلامي، وقد تبنت حكومة دولة الإمارات تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في تنفيذ المعاملات الحكومية، ولتحقيق النتائج المرجوة، أطلقت الدولة استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021م

توصيات الدراسة:

السعي نحو العمل الجاد لمواكبة آخر التطورات التقنية الحديثة وتطبيقاتها، فلا يسعنا إلا التأكيد على ضرورة التوسع في الاستخدام التقني، بعد ظهور ما يعرف بتقنيات (الذكاء الاصطناعي)، وتحليل البيانات الضخمة.

ضرورة التعمق في بحث البدائل الشرعية؛ فإنّ منتج حسابات المضاربة الاستثمارية بديلٌ شرعي مناسب وفق متغيرات الواقع المالي المصرفي؛ لإيجاد الحلول الشرعية على أساس الربحية والتشاركية لا على أساس الفائدة الربوية.

ولنعتبر بخلق النقود المصرفية على وجهٍ غير شرعي؛ فإنه يُعدّ أهم أسباب الأزمات الاقتصادية؛ بل إنّ النقود المشفّرة وما سيتفرع عنها من أشكال جديدة للنقود، يُتوقع – مستقبلاً– أن تقضي على سلطة الدولة في إصدار النقود، وستقضي على الحواجز

والحدود الجغرافية للعملة، أو قد تجعل سلطة الإصدار بجهة أمميّة محايدة تنظّم عملة عالمية واحدة

المراجع

AAOFI. Al-Ma'ayir al-Syar'iyyah al-Sadirah 'an Haiat al-Muhasabah wal-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah. Bahrain, 2017.

Abdullah, Belaidi. Al-Iqtisad al-Islamy al-Raqmy baina al-Ibtikar wal-Sa'adah fi Namt al-Hayah al-Islamy. Dubai: Muntada Fiqh al-Iqtisad, 2018.

Abu al-Izz, Ali Muhammad. Asasiyyat al-Amal al-Masrafi al-Islamy. Jordan: Dar al-Nafais, 2019.

Al-Amin, Hasan Abdullah. "Hukm al-Ta'amul al-Masrafi bi al-Fawaid". *Islamic Fiqh Academy Journal*.

Al-Ba'li, Abdul Hamid. Tandzim al-'Alaqah baina al-Masarif al-Islamiyyah wal-Bunuk al-Markaziyyah wal-Bunuk al-Taqlidiyyah. *Conference on Islamic Finance Institutions*, Dubai, 2005.

Al-Garib, Muhyiddin. Iqtisadiyyat al-Nuqud wal-Bunuk, 1972.

Al-Hattab, Kamal Taufiq. Al-'Alaqat al-Ilmiyyah wal-Nadzariyyah baina al-Iqtisad al-Islami wal-Iqtisad al-Wadh'i. *Shariah and Islamic Studies Journal Kuwait University* Vol.24, 2001.

Al-Hijji, Isa Abd al-Rahman. Manhajiyyat al-Badail al-Shar'iyyah li al-Mu'amalat al-Maliyyah wal-Masrafiyyah: Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah. Tunis: Al-Dar al-Malikiyyah, 2022.

Al-Himsyari, Mustafa. Al-A'mal al-Masrafiyyah wal-Islam. Kairo: Matbuat Majma' al-Buhus al-Islamiyyah. 1985.

Al-Hunaiti, Hana Muhammad. Bay' al-Inah wal-Tawarruq: Dirasah Tatbiqiyyah 'ala al-Masarif al-Islamiyyah. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2012.

Al-Lajimi, Muhammad. Khalq al-Nuqud Haqiqatuhu wa Hukmuhu fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Ta'siliyyah. Tunis: Al-Dar al-Malikiyyah, 2020.

Al-Marzuqi, Ahmad Salih. Al-Tamwil al-Raqmi: Dirasah Nadzariyyah Tatbiqiyyah fi Dhau Ahkam al-Syari'ah al-

Islamiyyah. Syarjah: Markas al-Syariqah al-Islami li al-Iqtisad wat-Tamwil, 2019.

Al-Marzuqi, Najah Muhammad. "Al-Ibtikar fi al-Iqtishad al-Islamy: al-Hajah ilahi wa Atsaruhu 'ala namt al-Hayah al-Islamy," http://ijtihadnet.net/

Al-Najjar, Farid Ragib. Al-Istitsmar bi al-Nudzum al-Raqmiyyah wal-Iqtisad al-Raqmiy. Aleksandria: Muassasah Syabab al-Jamiah, 2004.

Al-Naqbi, Ja'far Ali. Ri'ayat Maqsad al-'Adl fi 'Uqud al-Mu`awadhat al-Maliyyah: Dirasah Maqasidiyyah Fiqhiyyah Muqaranah bi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati. Thesis, Sharjah University, 2021.

Al-Qadi, Abdullah. Al-Siyasah al-Syar'iyyah Masdar li al-Taqnin baina al-Nadzariyyah wal-Tatbiq. Tanta: Dar al-Kutub al-Jami'iyyah, 1989.

Al-Qassar, Abdul Aziz. Da'm Istiratijiyyat Dubai Asimat al-Iqtisad al-Islami. Dubai: Department of Islamic Affairs, 2015.

Al-Qudah, Mansur Ali. Al-Tasnif al-Syar'I li Muntajat al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dauruhu fi Tatwir Ada'iha. Dissertation, Yarmuk University, 2009.

Al-Syaikh, Gassan Muhammad. *Ikhtilat al-Halal bi al-Haram fi Ta'amulat al-Masarif al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2014.

Al-Syammari, Ta'mah. Alaqat al-Bank al-Markazi bi al-Bunuk al-Islamiyyah. *Shariah and Islamic Studies Journal Kuwait University* Vol.28, 1996.

Al-Ubaidi, Ibrahim Abd al-Latif. Al-Masrafiyah al-Islamiyyah Mafahimuha wa Khasaisuha wa Tatbiqatuha. Dubai: Department of Islamic Affairs, 2015.

Al-Zuhaili, Wahbah. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2014.

Asyur, Muhammad al-Tahir. Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah. Jordan: Dar al-Nafais, 2001.

Barakah, Imad Abd al-Rahman. Qadaya wa Mushkilat fi al-Masarif al-Islamiyyah wa Hulul Muqtarahah. Jordan: Dar al-Nafais, 2015.

Da'as, Jamal. Al-Siyasah al-Naqdiyyah fi al-Nidzamain al-Islami wal-Wadh'i. Dar al-Khalduniyyah, 2007.

Dawabeh, Asyaraf. Dirasat fi al-Tamwil al-Islami. Kairo: Dar al-Salam, 2007.

Farhan, Muhammad and Muhammad Abd al-Qadir. Al-Haukamah fi al-Masarif al-Islamiyyah al-Yamaniyyah: Dirasah Tatbiqiyyah. *Islamic Bank* vol 2, http://iesjournal.org/

Isa, Daud Salman. Al-Haukamah wa Tatbiqatuha 'ala al-Tadqiq al-Syar'iyyah wal-Riqabah al-Syar'iyyah. Dar al-Basyair al-Islamyyah, 2020.

Kamil, Salih. Tatawwur al-'Amal al-Masrafi al-Islami: Masyakil wa Afaq. Jeddah: Al-Ma'had al-Islami li al-Buhus wal-Tadrib, 1979.

Khauja, Izzuddin. Al-Khadamat al-Masrafiyyah Al-Islamiyyah. Tunis: Al-Dar al-Malikiyyah, 2017.

--- . Al-Nidzam al-Masrafi al-Islami. Tunis: Al-Dar al-Malikiyyah, 2017.

Muhammad, Nifin Hasan. "Daur al-Ibtikar wal-Ibda' al-Mustamir fi Dhiman al-Markaz al-Tanafusi li al-Muassasat al-Iqtisadiyyah wal-Duwal." *Dirasat Halat Dawla al-Imarat*, 2016.

Nahar, Nayif. Al-Sayrafah al-Islamiyyah fi Daulat Qatr. Damaskus: Dar 'Aql, 2015.

Qal'aji, Muhammad Rawwas. Mu'jam Lugat al-Fuqaha. Jordan: Dar al-Nafais, 1988.

Qammurah, Syahbi. Al-Dzaka` al-Istina'i baina al-Waqi' wal-Ma'mul. Aljazair, 2018.

Qunduz, Abdul Karim Ahmad. Al-Tamwil al-Islamy wal-Numuw al-Iqtisadi. Abu Dhabi: Ma'had al-Tadrib wa Bina' al-Qudurat, 2021.

"Qawa'id al-Hisabat al-Bakniyyah", Saudi Center Bank, March 2022, https://www.sama.gov.sa/.

Suwailim, Sami. Sina'at al-Handasah al-Maliyyah: Nadzarat fi al-Manhaj al-Islami. Riyadh: Markaz al-Buhus Syarikah al-Rajihi, 2004.

Syahadah, Musa. Alaqat al-Bunuk al-Islamiyyah ma'a al-Bunuk al-Markaziyyah. *Jurisprudential Development Conference*, Oman, 1994.

Tariz, Mansur. Al-Sayrafah al-Islamiyyah: Mafhumuha wa Tatwiruha fi Aswaq al-Mal al-Alamiyyah. *Journal of Labanese Army* Vol. 250, 2006.

Ubaidi, Ibrahim Abd al-Latif. I'timad al-Masarif al-Markaziyyah Ma'ayir AAOFI Dalalat wa Tashri'at. Journal of Islamic Economy 2021. https://www.aliqtisadalislami.net/

Umar, Abdul Halim Muhammad. Al-Qawa'id al-Shar'iyyah wa Tatbiqatuha 'ala al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah. *Journal of Salih Kamil for Islamic Economy* Vol.9, 1999.

Za'ir, Muhammad Abdul Hakim. Al-Alaqat baina al-Bunuk al-Islamiyyah wal-Bunuk al-Taqlidiyyah. Proceeding of *The Role Of Islamic Banking Institutions In Investment And Development*, 2002. Sharjah: Sharjah University.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).